

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

SALAH-KAPRAH EFISIENSI APBN



Siapakah
Ghârimîn
yang Layak
Diberi Zakat?

Syiar Idul Fitri
Menghapus
Tradisi
Jahiliyah



Dr. Arim Nasim

**HANYA APBN SYARIAH
YANG PRO RAKYAT**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi April, 1-31 April 2025/ ھ 1446

Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 1)

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/musluman-bilim-insanlari-ve-dunyaya-armagan-ettikleri-buluslar>

RAZI, PENEMU CAMPAK DAN BAU (KIMIA)

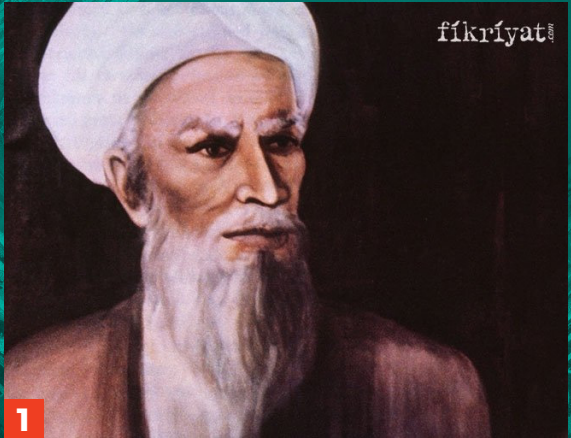
Dikenal sebagai "Calinus dunia Islam". Karya Razi menjadi sumber ilmu selama berabad-abad. Razi, yang tertarik pada kimia saat bekerja sebagai tukang emas dan kemudian beralih ke bidang kedokteran.

Ia adalah salah satu pemikir luar biasa yang hidup di zaman keemasan peradaban Islam. Ia merupakan dokter pertama yang berhasil mendiagnosis penyakit campak dan cacar dengan tepat. Karyanya tentang subjek ini, *al-Judari wa'l-hasba*, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diterbitkan dalam empat puluh edisi berbeda. Dalam karya ini, ia pertama kali menyelidiki penyebab penyakit tersebut. Dalam karyanya, ia membuat tabel mengenai definisi umum penyakit, tindakan pencegahan yang harus diambil, dan pengobatan.

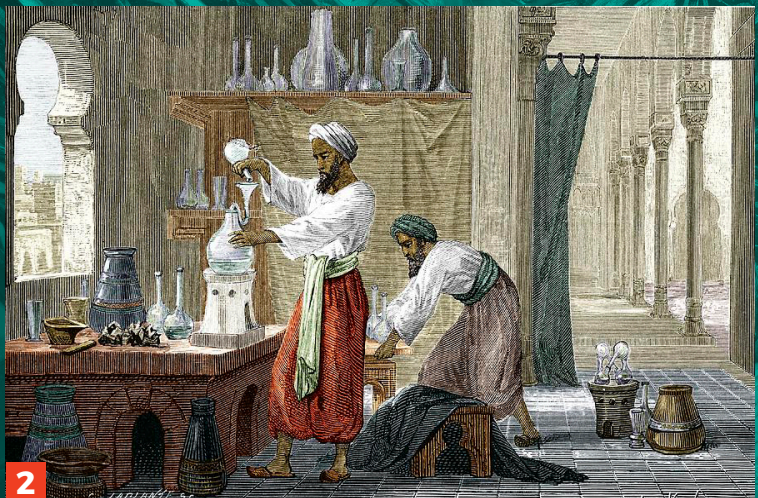
Al-Razi, yang menulis sekitar 200 buku sepanjang hidupnya, lahir pada tahun 865 di Rey, Iran. Razi merupakan dokter pertama dalam sejarah kedokteran yang memanfaatkan ilmu kimia dalam pelayanan medis.

2 Dalam karyanya *Ahlâku't-tabîb*, Razi mengingatkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam hubungan dokter-pasien dan memberikan nasihat seperti «*Tidak ada ramalan dalam pengobatan, dokter tidak dapat mengetahui segalanya, pasien tidak dapat digunakan sebagai subjek uji. Kecuali jika diperlukan, obat-obatan seder-*

Imuwan Muslim merintis jalan baru di banyak bidang seperti astronomi, fisika, kedokteran, teknik, dan kimia. Karya-karya yang ditulis oleh para sarjana diajarkan sebagai buku pelajaran di sekolah-sekolah Eropa selama berabad-abad. Mereka telah menjadi sumber daya bagi dunia ilmiah selama ratusan tahun dengan banyak penemuan, dari pemisahan atom hingga jam bandul, dari deteksi cacar hingga sistem kendali otomatis. Berikut ini adalah para ilmuwan muslim yang membentuk peradaban melalui penemuan-penemuan mereka dan ciptaan-ciptaan yang mereka hadiahkan kepada dunia.



1



2

hana harus digunakan dalam pengobatan. Dokter harus menjadi orang kepercayaan pasiennya. Dokter harus membangun dialog langsung dengan pasien."

Razi memperoleh ketenaran sebagai dokter pertama yang merawat pasiennya dengan musik melalui karyanya *et-Tibbu'r-rûhânî*. Dalam karya ini, ia secara khusus menyebutkan manfaat merawat pasien melankolis dengan membuat mereka sibuk dan terhibur.

Daftar Isi

Nafsiyah:

Syar Idul Fitri Menghapus Tradisi Jahiliyah

30

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab Jahiliyah memiliki sejumlah hari raya yang tentu khas jahiliyah. Namun, saat Islam datang dan bangsa Arab mengkonversi keyakinan mereka menjadi Muslim, mereka segera membuang segala bentuk hari raya mereka. Tak hanya itu. Bahkan mereka pun membuang segala tradisi, aturan dan sistem jahiliyah. Karena itu Perayaan Idul Fitri seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk membuang segala bentuk perayaan, tradisi, aturan/hukum dan sistem jahiliyah.

Hiwar: Hanya APBN Syariah yang Pro Rakyat

46

APBN Syariah adalah APBN dalam sistem Negara Khilafah. Penyusunan APBN Syariah ini tentu didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang digali dari al-Quran dan as-Sunnah. Keberadaan Khilafah adalah sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Karena itu APBN-nya pun akan selalu berorientasi pada bagaimana melayani berbagai kepentingan rakyat secara optimal. APBN Syariah tidak berbasis pajak atau utang, sebagaimana APBN di negara sekuler, seperti di negeri ini.

Soal-Jawab:

Siapakah Ghârimîn yang Layak Diberi Zakat?

26

Salah satu mustahiq zakat adalah *ghârimîn*. *Ghârimîn* tidak lain adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak punya kemampuan untuk membayar utang mereka. Dengan demikian tidak semua orang yang punya utang disebut *ghârimîn* dan berhak atas harta zakat. Jika demikian, apa saja kriteria sekaligus ketentuan yang menjadikan orang-orang yang berutang disebut *ghârimîn* sehingga mereka berhak mendapatkan zakat? Inilah yang dibahas dalam Rubrik *Soal-Jawab* kali ini.

Pengantar	2
Dari Redaksi: Idul Fitri dan Momentum Kemenangan Umat	3
Opini Pembaca	5
Muhasabah: Indonesia Gelap?	7
Fokus: Salah Kaprah Efisiensi APBN	9
Analisis: APBN Syariah	14
Iqtishadiyah: Menggadaikan BUMN Lewat Danantara	19
Catatan Dakwah: Mengokohkan Keyakinan Pada al-Quran	23
Soal Jawab: Siapakah "Ghârimîn" yang Layak Diberi Zakat?	26
Nafsiyah: Syiar Idul Fitri Menghapus Tradisi Jahiliyah	30
Fikih: Dalil Kulliy dan Dalil Juz'iy	33
Lintas Dunia	37
Ātsar: Siapakah Abu Bakr al-Razi?	40

Baiti Jannati: Meraih Keberkahan di Tengah Efisiensi Anggaran	42
Hiwar: Hanya APBN Syariah yang Pro Rakyat	46
Nisa': Mengatasi Beban Ekonomi Keluarga yang Makin Berat	50
Ibrah: Korupsi	54
Telaah: Mengimani Hari Kiamat	56
Tafsir: Nasib Orang yang Sangat Ingkar	60
Hadis Pilihan: Tasharruf Harta Menjelang Kematian	64
Siyasah Dakwah: Indonesia Cerah Hanya Dengan Syariah	66
Āfkar: Lantang Kritik Islam Politik Tapi Bisu Atas Kejahatan AS	70
Takrifat: Al-Bayân dan al-Mubayyan	74
Dunia Islam: Kebiadaban dan Terorisme Amerika	77
Tarikh: Islamisasi Karawang Raya (Dari Syaikh Qura Hingga Kesultanan Islam) (Bagian 3)	79

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam | Alamat:
Gedung Graha
Mampang Lt-1 - Suite
101. Jl. Mampang
Prapatan Raya
Kav. 100, Jakarta
Selatan. | e-mail:
redaksialwaie@gmail.
com | Pemimpin
Umum: M. Anwari. |
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari. | Pemimpin
Redaksi: Ibnu Faruq.
| Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah. |
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
| Layout: ishaq.
Pemasaran: Tedi |
Harga: Rp. 10.000,-
(P. Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar
P. Jawa).

Pembaca yang budiman, di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit, Pemerintah melakukan “efisiensi APBN”. Hal ini diklaim sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban keuangan negara. Di antara beban keuangan negara itu adalah pembayaran utang plus bunganya yang pada tahun 2025 ini mencapai tidak kurang dari Rp 1.300 Triliun.

Sayangnya, kebijakan efisiensi APBN ini kerap diterapkan dengan cara yang justru membebani rakyat kecil seperti pemangkasan aneka subsidi, kenaikan tarif layanan publik, hingga pembatasan anggaran sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

Ironisnya, pada saat yang sama, pemborosan dalam pengelolaan keuangan negara tetap marak terjadi. Struktur kabinet, misalnya, tetap gemuk. Ini tentu membutuhkan anggaran yang besar. Tak ada upaya Pemerintah menunda pembayaran utang, termasuk bunganya yang sangat tinggi. Beberapa pos anggaran, seperti kepolisian, juga tidak dipangkas. Yang lebih ironis, hasil efisiensi atau pemangkasan yang sejak awal digadag-gadang untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata sebagian besarnya malah untuk membiayai Danantara. Padahal Danantara sendiri masih belum jelas untuk kepentingan siapa. Apalagi belum apa-apa Pemerintahan Prabowo berencana membiayai proyek yang terkait tambang batubara, yang kini penguasaannya didominasi oleh para oligarki. Alhasil, efisiensi hanya dijadikan dalih untuk menutupi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Ini tentu berbeda dengan ketentuan Islam terkait anggaran negara (APBN). Islam memandang bahwa pengelolaan keuangan negara (APBN) harus berbasis keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang, seperti oligarki, atau tunduk pada tekanan pihak asing. Dalam sistem ekonomi Islam, APBN (Baitul Mal) disusun berdasarkan prinsip syariah yang jelas, dengan sumber pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT. Tidak ada ruang bagi manipulasi anggaran demi kepentingan segelintir pihak.

Karena itu sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa kebijakan ekonomi dalam sistem kapitalisme—termasuk dalam pengelolaan APBN—tidak akan pernah benar-benar berpihak kepada mereka. Solusi sejati hanya dapat ditemukan dalam sistem Islam yang menerapkan syariah secara *kâffah*, termasuk dalam tata kelola keuangan negara (APBN).

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

IDUL FITRI DAN MOMENTUM KEMENANGAN UMAT

Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar. Allâhu Akbar wa lilLâhil hamdu.

Takbir, tahlil dan tahmid bergema saat umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Umat Islam di seluruh dunia menyambut bahagia 1 Syawal, setelah sebulan berpuasa selama Bulan Ramadhan. Sungguh ini merupakan hari istimewa bagi umat Islam yang diberi predikat oleh Allah SWT sebagai umat terbaik. Demikian sebagaimana firman Allah SWT (yang artinya): *Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar makruf nahi mungkar, dan mengimani Allah* (TQS Ali Imran [3]: 110).

Seluruh umat Islam berharap bulan Ramadhan ini membuat umat Islam semakin bertakwa kepada Allah SWT, sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dari shaumnya orang yang beriman, *la'allakum tattaquun*. Terutama bagi para pengemban dakwah yang memperjuangkan agar hukum-hukum Allah SWT bisa ditegakkan secara total sebagai konsekuensi keimanan seorang Muslim. Mereka berharap semakin bisa istiqamah dalam perjuangannya, diberi sikap teguh dan kesabaran, meskipun menghadapi banyak ujian dan cobaan. Tak lain karena menapaki jalan perjuangan Rasulullah saw., yang juga menghadapi banyak ujian dan cobaan.

Namun, di tengah kegembiraan kaum Muslim di seluruh dunia, harus kita akui, umat Islam saat ini tidak sedang baik-baik saja. Secara

global, kondisi Palestina masih membuat umat Islam berduka dan pedih. Meskipun sudah ada gencatan senjata. Namun, entitas penjajah Yahudi tidak berhenti melanjutkan tindakan keji mereka terhadap umat Islam. Mereka melanjutkan pembunuhan bahkan genosida mereka terhadap umat Islam, penghancuran terhadap tempat-tempat pengungsian dan rumah-rumah sakit. Mereka tidak peduli apapun. Sebabnya, entitas penjajah Yahudi ini tahu, bahwa mereka didukung oleh Amerika Serikat. Mereka tahu umat Islam saat ini sedang lemah dan terpecah. Mereka merasa aman karena bisa dengan penuh mengendalikan para penguasa negeri Islam yang diam tak peduli. Mereka yakin karena tidak ada yang menggerakkan tentara-tentara kaum Muslim saat ini karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri Islam.

Sementara itu, Amerika Serikat, di bawah Trump, semakin menunjukkan sikap aslinya. Negara imperialis keji ini tidak peduli nyawa manusia. Dengan arogannya, Trump menyatakan akan membeli Gaza bagaikan properti *real-estate*, menjadikan Gaza tempat wisata yang indah, dan mengusir penduduknya. Dia meminta kepada Mesir dan Yordania untuk menampung para pengungsi. Dia juga minta para penguasa Arab, terutama Saudi, untuk membangun Gaza setelah dihancurkan oleh entitas Yahudi dengan dukungan kuat Amerika.

Negeri-negeri lain pun masih berduka. Umat berharap ada perubahan sejati setelah

tumbangnya rezim Asad. Dia adalah diktator keji yang telah membunuh dan menyebabkan lebih dari 500 ribu rakyatnya terbunuh, jutaan menjadi pengungsi. Namun, tampaknya perjuangan masih berlanjut. Penguasa baru Suriah, yang dalam tekanan kuat Barat, melakukan kompromi-kompromi. Tampak mengikuti keinginan Barat untuk menjadikan Suriah tetap sekuler agar tetap bisa dikendalikan oleh Barat. Padahal negara-negara Baratlah yang selama ini, langsung atau tidak langsung, menopang kekuasaan Bashar, dengan bantuan Iran dan para penguasa Arab lainnya.

Di dalam negeri, Indonesia muncul tagar *Indonesia Gelap*. Ini mencerminkan kondisi negeri ini yang masih memperhatikan. Ini menggambarkan ketidakadilan struktur yang berakar pada sistem politik, ekonomi dan sosial negeri ini. Kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar. Jumlah rakyat miskin masih puluhan juta. Hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak masih belum sepenuhnya terwujud. Akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas masih sulit bagi masyarakat miskin.

Proyek reklamasi dengan pengkavlingan laut di PIK, menjadi bukti persekongkolan elit politik dan para pemilik modal. Proyek ini telah mengubah ribuan hektar laut menjadi kawasan properti elit dan komersial. Tidak peduli merusak ekosistem dan merugikan masyarakat lokal. Pejabat pun menggunakan kewenangannya untuk mempermudah para pemilik modal dengan memberikan izin yang menguntungkan mereka. Ideologi kapitalis sekuler yang diadopsi Indonesia menjadi penyebab. Para kapitalis dengan oligarkinya mendominasi kebijakan ekonomi dan politik demi keuntungan mereka sendiri. Indonesia semakin dicengkeram oligarki rakus. Rakyat semakin menderita.

Indonesia semakin gelap. Apalagi setelah terbongkar kasus-kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Korupsi menggero-

goti sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kerugian negara akibat korupsi sektor energi dan pertambangan, termasuk di Pertamina, tercatat mencapai Rp 193,7 triliun (2023), yang jika dihitung selama lima tahun mencapai Rp 968,5 triliun. Sebelumnya, korupsi timah di Bangka Belitung diperkirakan merugikan negara Rp 300 triliun. Memang kasus ini terbongkar. Beberapa pelakunya dihukum. Namun, seperti sebelumnya, semua itu tidak menghentikan maraknya korupsi. Pasalnya, penyebabnya, yaitu persekongkolan pemilik modal dan elit politik, yang berakar dari ideologi kapitalisme yang korup, masih belum berubah. Padahal pemerintahan telah berganti.

Kondisi global maupun Indonesia semakin menunjukkan dua hal. *Pertama*: Kegagalan ideologi kapitalisme yang diadopsi oleh negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Ideologi ini telah melahirkan sistem yang rusak dengan penguasa yang rakus dan tidak peduli terhadap rakyat. *Kedua*, kebutuhan akan Islam sebagai ideologi yang menjadi dasar untuk mengatur manusia, masyarakat, dan negara. Persoalan-persoalan yang terjadi secara global, di negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, hanya bisa dituntaskan dengan mencampakkan ideologi kapitalisme dan para penguasa pengkhianat yang tidak amanah. Semua ini semakin menunjukkan peran penting dari dakwah Islam untuk menegakkan kembali Khilafah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah. Inilah sistem kenegaraan yang berdasarkan Islam, yang diwajibkan syariah Islam..

Kita semua memohon kepada Allah (SWT) agar menjadikan Idul Fitri ini sebagai pembuka jalan bagi *khayr wa barakah* (kebaikan dan keberkahan) bagi kaum Muslim. Dengan itu kita berhada berada dalam naungan kemuliaan, kemenangan dan kekuatan di bawah naungan Rayah (Panji) Khilafah Rasyidah, *Rayah Lâ Ilâhailâ ALLâh Muhammad Rasulullaah*. Itu bukanlah masalah besar bagi Allah.

ALLâhu Akbar! [Farid Wadji]

Opini

Pembaca

Korupsi Sumberdaya Alam

Mahfud, S.H.

Walhi Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melaporkan 47 perusahaan besar. Semuanya diduga kuat terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup dan korupsi sektor sumber daya alam. Ini bukan hanya tentang kejahatan yang terorganisir, tetapi juga tentang kegagalan total sistem hukum dan pengawasan negara.

Di balik laporan ini ada dua hal besar yang terabaikan: *Pertama*, penegakan

hukum yang lemah. *Kedua*, politik yang mengabaikan keberlanjutan hidup rakyat. Kejahatan lingkungan hidup di Indonesia bukanlah hal baru, tetapi kini semakin sistematis. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan lebih banyak sibuk memperkaya diri sendiri atau para kroninya daripada mengurus rakyat.

Para oligarki perusahaan sawit, pertambangan, kehutanan dan energi bergerak bebas. Seperti dewa-dewi yang tidak bisa disentuh. Negara pun terkesan hanya sebagai pengawas yang sibuk mendeklamasikan janji reformasi sambil mengesampingkan segala bencana ekologi yang sudah di depan mata. Menurut Walhi, kerugian negara akibat korupsi sumber daya alam ditaksir mencapai Rp 437 triliun.

Inilah yang terjadi ketika “demokrasi” dan “korupsi” menjadi satu-kesatuan. Para pejabat menandatangani izin eksploitasi alam dan memuluskan jalan bagi kartel-kartel besar. Mereka tidak hanya menghancurkan hutan. Mereka juga menghancurkan masa depan generasi yang akan datang. Melalui revisi undang-undang, seperti yang diungkap Zenzi Suhadi dari Walhi, mereka merombak tata ruang, membiarkan praktik ilegal dan koruptif terus berlangsung. Terjadi perusakan ekosistem dan penghilangan mata pencaharian rakyat kecil. Sektor pertambangan ternyata hanya membuka lubang kehancuran, baik untuk alam maupun untuk kehidupan masyarakat lokal. Walhi pun menyebutkan bencana ekologis seperti hilangnya wilayah tangkap nelayan akibat pertambangan nikel di Maluku Utara.

Akar masalah korupsi tidak lain adalah sistem yang ada tidak hanya mengakomodasi korupsi, tetapi justru menjadikan korupsi sebagai norma. Ini adalah permainan yang dilakukan oleh kartel-kartel besar yang sudah sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan untuk memanipulasi kebijakan, menciptakan produk hukum yang menguntungkan mereka dan memanfaatkan infrastruktur pemerintahan untuk menutupi jejak-jejak kejahatan mereka. Mereka tidak hanya merampas hutan, tetapi juga merampas hak rakyat atas tanah, air dan kehidupan yang layak.

Ini adalah bukti betapa bobroknnya rezim yang ada. Demokrasi telah berubah menjadi alat pembenaran untuk kepentingan segelintir elit. Sebaliknya, rakyat harus menelan pil pahit berupa

kerusakan lingkungan yang semakin parah, hilangnya keanekaragaman hayati dan kemiskinan yang semakin dalam.

Jelas, sistem ini harus diganti, atau kita akan terus kehilangan segala yang berharga? []

PHK Marak, Hidup Rakyat Makin Berat

Tartiifa



elombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Dua pabrik memutuskan menghentikan produksinya alias tutup. Akibatnya, ribuan orang buruh terancam kehilangan sumber pendapatan. Kedua perusahaan itu adalah PT

Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya juga ratusan ribu buruh ter-PHK di sektor industri tekstil, garmen dan sepatu sepanjang tahun 2024. Awal tahun 2025 ini, PT Yamaha Music Indonesia, yang memproduksi piano dan berorientasi ekspor, telah memangkas 1.100-an orang buruhnya.

Sinyal PHK di tahun ini makin menguat, terutama di pabrik-pabrik tanah air karena berbagai hal. Di antaranya: *Pertama*, efisiensi anggaran: perusahaan memotong biaya karena ekonomi global tak pasti dan adanya restrukturisasi karena perubahan pasar dan teknologi. *Kedua*, ekonomi global lesu: inflasi tinggi, suku bunga naik dan ketegangan geopolitik. *Ketiga*, permintaan konsumen dan investasi turun.

Padahal mencari pekerjaan pada saat ini bukanlah hal yang mudah. Banyak kriteria yang begitu menyulitkan, termasuk batasan usia. Di sisi lain, dalam sistem kapitalisme, buruh adalah faktor produksi yang akan dikorbankan untuk menyelamatkan perusahaan. Buruh sering dipandang sebagai komoditas yang dapat dikorbankan demi menjaga kelangsungan perusahaan dan memaksimalkan keuntungan.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan batas atas upah Rp 5 juta tidak akan menyelesaikan persoalan karena kehidupan tidak hanya berlaku selama 6 bulan saja. Itu tidak cukup untuk mengatasi tantangan finansial jangka panjang yang dihadapi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Dalam pandangan Islam, negara adalah *raa'in* (pengurus rakyat). Negara wajib mengurus rakyat, termasuk menyediakan lapangan kerja yang luas, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Apalagi Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai tanggung jawab negara dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat.

Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual kehidupan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Negara memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Penerapan sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Negara berperan penting dalam mewujudkan semua itu dengan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan penerapan zakat, mendukung distribusi kekayaan yang adil. Negara juga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. []



INDONESIA GELAP?

Muhammad Rahmat Kurnia

Indonesia Gelap. Itulah tajuk yang digemakan oleh mahasiswa meniskapi kondisi karut-marut nasional. Pada 19 Februari 2025, muncul demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Solo, Bandung, dan Surabaya. Sehari setelah itu, demo mahasiswa dengan tema sama muncul di Jakarta, Palembang dan Yogyakarta. Kebijakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat menjadi pemicu utama digelarnya aksi-aksi tersebut. Hal ini tampak jelas pada poster yang mereka bawa seperti “Makan Gratis, Pendidikan Krisis”, “RIP= Republik Indonesia Patriarki”, “Jangan Biarkan Militer Mengurusi Dapurmu!”, dan “Tolak Dwi Fungsi ABRI Gaya Oligarki”.

“Wajarlah didemo, *wong* sikapnya tidak menunjukkan pemimpin, *kok*,” ujar Mas Haryono. “Ada orang yang mengkritik kabinetnya terlalu gemuk, *eh* bilangny pakai bahasa Jawa ‘*Ndasmu*’. Sebuah ungkapan yang sangat kasar dan arogan,” tambahnya.

“Bilangnya efisiensi, faktanya ketidakpedulian kepada rakyat,” sambut Kang Eman. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dollar (AS) dalam bentuk tabungan negara,” kata Presiden Prabowo (24/2/2025). Beliau menambahkan, “Akan dialokasikan untuk dikelola Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita.”

“Jadi, bilangny efisiensi, tetapi dananya digunakan untuk investasi dan membiayai proyek nasional seperti IKN. Ketidakadilan dipertontonkan dengan telanjang,” Kang Eman berkomentar.

Realitas memang menunjukkan itu. Sekadar contoh, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkena pemangkasan sekitar Rp 8 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikstekt) dipangkas hingga Rp 14 Triliun. Artinya, investasi lebih diutamakan daripada pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok. Padahal investasi hanya dinikmati oleh segelintir orang. “Ini salah satu bentuk kezaliman atau ketidakadilan itu,” ujar Mas Haryono.

Contoh lain, Kementerian Kesehatan dipotong Rp 19 Triliun. “Lagi-lagi, kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok dinomorduakan dibandingkan dengan investasi,” tambah Mas Haryono lagi.

“Ada pagar laut 30,16 KM. Namun, tak diketahui siapa yang membuat dan membiayainya. Aneh,” Mas Haryono lagi.

“Apalagi pemerintahan yang baru berjalan 100 hari lebih sedikit ini sudah membawa bencana-bencana terhadap rakyat,” suara itu menyeruak di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di Yogya.

Dalam suatu forum saya pernah dita-

nya terkait 'Indonesia Gelap' ini. "Di dalam al-Quran kata gelap itu disebut 'zhulumaat'. Kezaliman disebut sebagai *zhulumaat yawmal kiamah* (kegelapan pada Hari Kiamat). Jadi, dalam konteks dan kondisi kekinian, saya memaknai Indonesia Gelap itu sebagai sebuah kehidupan yang di dalamnya banyak tindak kezaliman," jawab saya.

"Sebagai contoh, perampasan tanah dan laut oleh Oligarki di Proyek PIK-2 yang mencuat pada Februari 2025. Kala itu terungkap modus operandi perampasan tanah dan laut oleh oligarki terkait proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). Praktik ini diduga kuat melibatkan pengambilalihan lahan rakyat dan negara untuk kepentingan industri properti, dengan memanfaatkan oknum aparat dan pejabat pemerintah," tambah saya.

"Rezim Jokowi membuat kebijakan dan menggunakan aparat untuk menekan rakyat. Hal ini malah dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Mestinya, dengan kewenangannya saat ini, Presiden bisa menghentikan hal itu," ujar Bang Marwan Batubara.

"Di tengah orang menyerukan 'Adili Jokowi!', eh ini malah memuji-mujinya," komentar Mas Haryono. Belum lagi, para taipan justru diundang ke Istana pada 6 Maret 2025. Melalui instagram resmi Sekretariat Kabinet RI, disebutkan kedelapan konglomerat yang hadir itu adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady dan Tomy Winata. "Kenyataan ini menggambarkan rezim lama berlanjut. Wajar mahasiswa memandangnya gelap..." kata Kang Eman.

Apakah Indonesia memang gelap? "Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia," ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pan-

jaitan (19/2/2025). Lain lagi pandangan Pak Dwi, "Selama menjabat, pengalaman menunjukkan bahwa berbagai tingkatan mulai dari Mahkamah Agung hingga level bawah jika diajak bicara tentang keberpihakan kepada rakyat semuanya diam. Masalah Indonesia sulit dipecahkan karena semuanya legislatif, yudikatif, dan eksekutif sudah rusak. Mengapa mereka diam? Karena sudah dibombardir oleh *fulus*. KPK tahu? Tahu. Selama 15 tahun di MA sulit melakukan perubahan yudikatif."

Beliau menambahkan, "Otak saya sampai buntu."

Menurut dia, Indonesia saat ini gelap. Saya punya pandangan lain, "Kalau tidak ada perubahan, tetap seperti sekarang ini, sadar atau tidak, mengaku atau tidak, Indonesia memang akan tetap gelap. Namun, jika ada perubahan, Indonesia bahkan dunia akan menjadi terang-benderang. Hanya saja syarat dan ketentuan berlaku."

Apa itu? "Perubahannya harus perubahan menuju penerapan Islam secara *kāffah*. Sebabnya, cahaya itu adanya di dalam Islam," tambah saya.

Allah SWT berfirman (yang maknanya): *Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). Orang-orang yang kafir dan para pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya* (TQS al-Baqarah [2]: 257/

Kegelapan adalah tempat kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya ketika kita tak lagi punya pilihan selain bertahan dan melawan. Setelah kegelapan, fajar akan menyingsing. Begitu, kata pepatah.

Wallāhu a'lam. [].

SALAH KAPRAH EFISIENSI APBN

Dr. Julian Sigit

Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan berbagai tanggapan, terutama terkait dampaknya terhadap sektor-sektor pelayanan publik yang sangat vital. Banyak pihak mulai mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut. Pasalnya, dampak yang akan ditimbulkan dari hasil kebijakan tersebut memiliki pengaruh besar. Selain potensi kesalahpahaman dan ketidakjelasan implementasi, dampaknya terhadap sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya begitu besar.

Alasan Efisiensi versi Pemerintah

Pemerintah, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan tujuan utama mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara, mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Presiden Prabowo menekankan bahwa penghematan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap pengeluaran negara memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Presiden ingin keuangan negara lebih bersih sehingga berujung pada efisiensi APBN 2025.¹

Potensi Kesalahpahaman dan Ketidakjelasan Efisiensi

Meskipun tujuan efisiensi anggaran adalah positif, terdapat beberapa potensi kesalahpahaman dan ketidakjelasan dalam implementasinya. *Pertama:* Definisi dan Ruang Lingkup Efisiensi. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan 'pengeluaran tidak perlu' dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di berbagai kementerian dan lembaga. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Wahyudi Kumorotomo, menyatakan bahwa target efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun merupakan tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.²

Kedua: Transparansi dalam Pemotongan Anggaran. Kurangnya transparansi mengenai kriteria pemotongan anggaran dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah. Pakar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dyah Mutiarin, mengkritisi kebijakan efisiensi

Di tengah melemahnya daya beli masyarakat yang sangat signifikan, kebijakan efisiensi anggaran ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

tersebut. Dia menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang mencapai 22 persen dapat berdampak pada pelayanan publik yang bersifat dasar.³

Ketiga: Risiko Terhadap Pelayanan Publik. Pemotongan anggaran yang tidak terencana dengan baik dapat mengorbankan kualitas pelayanan publik, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi itu sendiri. Menurut laporan dari *Financial Times*, pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di tengah konsumsi yang lemah dan nilai mata uang yang rendah.⁴

Sektor-sektor dengan Anggaran Tetap atau Meningkat

Di sisi lain, beberapa kementerian dan lembaga Negara justru mempertahankan atau bahkan meningkatkan alokasi anggarannya. Di antaranya: Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 165,2 triliun. Ini kementerian dengan anggaran terbesar dalam APBN 2025 (kumparan.com). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat alokasi anggaran Polri mencapai Rp 126,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (hukumonline.com). Anggaran DPR tetap sebesar Rp 6,69 triliun tanpa pemotongan ([\[menkeu.go.id\]\(http://menkeu.go.id\)\). Badan Intelijen Negara \(BIN\) menerima alokasi anggaran sebesar Rp 7,05 triliun tanpa pemotongan. Kemenko Polhukam tetap dan tidak mengalami pemotongan anggaran dalam efisiensi APBN 2025.](http://ke-</p></div><div data-bbox=)

Semangat efisiensi ini justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Presiden Prabowo justru menambah jumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Bukankah dengan bertambahnya kementerian dan lembaga negara akan menambah pula anggarannya? Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang diprogramkan oleh Pemerintah. Lebih ironisnya, penambahan kementerian atau alat negara tersebut lebih cenderung politis; seolah-olah sekadar bagi-bagi kekuasaan, bukan didasari untuk kemaslahatan rakyat.

Kurang Transparansi dan Perhitungan Matang

Kebijakan efisiensi anggaran ini menuai kritik karena dianggap kurang transparan dan tidak didasarkan pada perhitungan yang matang. Ketiadaan penjelasan rinci mengenai dasar pemotongan anggaran menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan keadilan dalam distribusi pemotongan anggaran. Sebabnya, pemotongan anggaran yang tidak terencana dengan baik dapat mengganggu pelayanan publik dan program-program vital bagi masyarakat.

Alokasi Hasil Efisiensi: Danantara dan Program MBG

Salah satu yang menjadi tujuan dari program efisiensi anggaran adalah alokasi untuk beberapa program utama, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, sebagian besar hasil efisiensi anggaran malah diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Adapun Program Makan

Bergizi Gratis (MBG), awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, namun diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 25 triliun perbulan untuk mencapai target penerima manfaat.

Dampak Efisiensi APBN 2025

Kebijakan efisiensi APBN 2025 yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto telah menimbulkan berbagai dampak di sektor-sektor vital yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemotongan anggaran yang signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik lainnya dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup masyarakat dan justru menghambat pembangunan nasional. Sektor pendidikan, misalnya, mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar dalam kebijakan efisiensi APBN 2025. Hal ini berdampak langsung pada berbagai program dan layanan pendidikan yang sebelumnya mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah. Pemotongan anggaran ini berpotensi menyebabkan berkurangnya beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan (ADik). Padahal beasiswa tersebut merupakan instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat. Pemangkasan dana untuk penelitian dan pengembangan Pendidikan juga akan dapat menurunkan inovasi dan daya saing akademik Indonesia. Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik akan menyebabkan stagnasi dalam peningkatan kualitas pengajaran.

Menurut Prof. Agus Hermawan, pakar pendidikan dari UGM, pemangkasan anggaran dapat menurunkan mutu pendidikan nasional dan menghambat akses bagi siswa dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi⁵ (ugm.ac.id). Selain itu dengan pe-

mangkasan anggaran, pembangunan sekolah baru, rehabilitasi gedung sekolah rusak, serta peningkatan fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan akan mengalami perlambatan. Hal ini tentu berisiko menurunkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Lebih parahnya lagi, dengan berkurangnya dukungan Pemerintah, masyarakat akan menanggung biaya pendidikan yang lebih tinggi, seperti; kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, berkurangnya subsidi untuk sekolah-sekolah negeri dan naiknya untuk alat tulis dan kegiatan belajar mengajar lainnya. Akibatnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat berisiko untuk putus sekolah atau mengalami keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Pemangkasan anggaran juga dapat menghambat penelitian dan inovasi yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Di sektor ekonomi, pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada pengurangan subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat yang sangat signifikan, kebijakan efisiensi anggaran ini akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Daya beli masyarakat menurun, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Menurut laporan Bank Dunia, daya beli masyarakat Indonesia sudah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat inflasi yang meningkat, dan pemangkasan anggaran ini akan memperburuk keadaan.⁶

Efisiensi tersebut juga akan berpengaruh terhadap Penurunan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dalam infrastruktur berkurang sehingga menyebabkan perlambatan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Lapangan kerja di proyek-proyek Pemerintah jelas berkurang dan berujung pada peningkatan angka pengangguran. Kemudian pertumbuhan ekonomi

nasional bisa melambat karena belanja Pemerintah merupakan salah satu penggerak utama ekonomi saat ini. Menurut laporan *Financial Times*, pemangkasan anggaran yang signifikan tanpa strategi yang jelas dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko stagnasi ekonomi.⁷ Laporan dari *Financial Times* tersebut menyebutkan bahwa pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di tengah konsumsi yang lemah dan nilai mata uang yang rendah.⁸

Di sektor kesehatan, meskipun Pemerintah menyatakan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas, pemotongan anggaran dapat mengganggu pelayanan kesehatan, terutama jika tidak adanya strategi yang jelas untuk menjaga kualitas layanan. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dyah Mutiarin, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang mencapai 22 persen dapat berdampak pada pelayanan publik yang bersifat dasar, termasuk kesehatan.⁹

Di bidang politik, kebijakan efisiensi yang tidak transparan berpotensi meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah. Hal itu disebabkan karena masyarakat melihat kebijakan pemangkasan anggaran sebagai ketidakadilan, karena beberapa sektor seperti pertahanan dan keamanan tetap mendapatkan anggaran besar. Kritik dari masyarakat akan semakin kuat, yang dapat memperburuk polarisasi politik. Kemudian potensi meningkatnya aksi protes dan demonstrasi oleh masyarakat terutama dari kelompok mahasiswa dan pekerja. Menurut *The Economist*, kebijakan pemotongan anggaran yang dianggap tidak adil dapat membahayakan stabilitas politik karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka (*economist.com*). Selain itu, potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan elit politik sangat kentara. Menurut laporan dari Institute for Development of

Economics and Finance (INDEF), ada indikasi bahwa pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke proyek-proyek populis yang menguntungkan Pemerintah saat ini (*indef.or.id*).

Di sektor sosial, kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi besar untuk meningkatnya angka kemiskinan. Berkurangnya subsidi bagi masyarakat miskin menyebabkan peningkatan biaya hidup. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan semakin sulit dan memperburuk siklus kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan pemangkasan anggaran yang tidak dibarengi dengan kebijakan kompensasi dapat meningkatkan angka kemiskinan hingga 2-3% dalam satu tahun (*bps.go.id*). Kemudian kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), ketidakpuasan terhadap Pemerintah akibat kebijakan ekonomi yang tidak adil dapat memperburuk stabilitas sosial dan memicu perlawanan masyarakat sipil (*csis.org*).

Di sektor tata kelola Pemerintahan, pemangkasan anggaran dalam kondisi yang tidak transparan bisa menciptakan ruang bagi praktik korupsi. Penyalahgunaan anggaran yang masih tersisa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Peningkatan “uang pelicin” dalam birokrasi, karena banyak program yang dipangkas, namun masih bisa dijalankan secara tidak resmi.

Dana hasil efisiensi tidak digunakan secara jelas, seperti dalam kasus investasi Danantara yang minim transparansi, akan memicu sentimen kepercayaan publik terhadap Pemerintah semakin turun. Menurut Transparency International, kebijakan penghematan anggaran yang tidak transparan dapat memperburuk indeks persepsi korupsi suatu negara.¹⁰

Di sektor mitigasi bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan ne-

gara yang berada di *Ring of Fire*, yaitu zona cincin api Pasifik. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif dan sering mengalami gempa bumi. Ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik, seperti Lempeng Indo-Australia yang menekan Lempeng Eurasia. Akibatnya, Indonesia sering mengalami aktivitas vulkanik dan gempa bumi, seperti yang sering terjadi di Sumatra, Jawa dan Sulawesi. Pemotongan anggaran lebih dari 50% dapat mengurangi akurasi dan kecepatan peringatan dini bencana alam, yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Menurut laporan dari *The Australian*, pemotongan anggaran yang signifikan dapat mempengaruhi layanan penting seperti peringatan dini gempa bumi dan tsunami.¹¹

Di bidang infrastruktur dan transportasi, sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemotongan anggaran hingga 73,35%, atau sebesar Rp 81,38 triliun dari total pagu tahun ini sebesar Rp 110,95 triliun.¹² Kebijakan ini tentu akan dapat menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting bagi masyarakat.

Di sektor perumahan rakyat, pemotongan anggaran bisa menjadi pukulan berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berharap memiliki rumah layak. Jika pembangunan rumah untuk mereka berkurang, maka semakin banyak keluarga yang harus bertahan di tempat tinggal yang tidak layak, bahkan di permukiman kumuh yang penuh risiko kesehatan dan keselamatan. Kondisi ini bisa memperparah masalah sosial, karena jutaan orang akan kesulitan mendapatkan hunian yang layak dan nyaman untuk hidup.

Jika masalah ini dibiarkan, kesenjangan antara orang yang memiliki rumah dan yang tidak akan semakin besar. Kota-kota besar bisa dipenuhi oleh masyarakat yang terpaksa tinggal di lingkungan yang buruk karena tidak mampu membeli rumah sendiri. Pemerintah

seharusnya memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, bukan malah mengurangi anggaran untuk sektor ini. Jika tidak ada solusi yang jelas, dampaknya bisa sangat buruk bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250211133128-532-1196959/sri-mulyani-ungkap-alasan-prabowo-hemat-belanja-rp306-t-ingin-bersih>
- 2). <https://ugm.ac.id/id/berita/efisiensi-anggaran-sulit-tercapai-pakar-ugm-sebut-pemerintah-hadapi-perilaku-boros-dalam-birokrasi/>
- 3). <https://www.umy.ac.id/pakar-umy-minta-efisiensi-anggaran-dikaji-ulang>
- 4). https://www.ft.com/content/38d4d464-f3d7-4815-bd28-439b1eadbc20?utm_source=chatgpt.com
- 5). <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-pemangkasan-anggaran-berpotensi-menurunkan-mutu-pendidikan-hingga-kontraksi-ekonomi/>
- 6). https://www.worldbank.org/en/country/indonesia?utm_source=chatgpt.com
- 7). https://www.ft.com/content/38d4d464-f3d7-4815-bd28-439b1eadbc20?utm_source=chatgpt.com
- 8). <https://www.ft.com/content/38d4d464-f3d7-4815-bd28-439b1eadbc20>
- 9). <https://www.umy.ac.id/pakar-umy-minta-efisiensi-anggaran-dikaji-ulang>
- 10). <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2025-02112025070120.html>
- 11). https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TA-WEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fworld%2Fprabowo-slams-little-kings-defends-30bn-budget-cuts%2Fnews-story%2F155b042f-052400c0cb47a6b7cd6393eb&memtype=anonymous&mode=premium&v21=GRO-UPB-Segment-2-NOSCORE&V21spcbehaviour=append
- 12). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250216131620-4-611026/5-kementerian-dengan-pemangkasan-anggaran-terbesar-di-2025>



BUDGET

APBN SYARIAH

Dr. Yuana Tri Utomo

Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa kali menghimbau seluruh jajaran yang ada di pemerintahannya agar melakukan efisiensi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, dalam Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8 di Jakarta pada Oktober 2024 mengatakan bahwa APBN harus memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi yang selaras dengan tujuan syariah Islam atau *maqashid asy-syarī'ah* (kemenkeu.go.id). Pernyataan ini bisa dibaca sebagai bentuk kegelisahan. Pasalnya, kondisi pengelolaan APBN Indonesia tidak efisien dengan sejumlah problem, seperti: defisit anggaran yang terus meningkat, serapan anggaran yang buruk akibat korupsi dan pemborosan, penerimaan pajak yang selalu meleset dari target, tingginya belanja pegawai, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan sebagainya. Kondisi APBN seperti ini menunjukkan bahwa landasan pembangunan ekonomi di Indonesia menggunakan paradigma kapitalisme-demokrasi.

Sebagai contoh kasus adalah rentetan mega korupsi yang pasti merugikan negara.

Pelakunya pejabat tinggi, politikus dan pengusaha yang sampai sekarang tidak ada ujung penyelesaiannya. Dalam kasus korupsi BLBI negara dirugikan Rp 138 triliun, Korupsi BTS 4G Kemenkominfo telah merugikan negara sebesar Rp 8 triliun. Yang terbaru, skandal korupsi di PT Pertamina (Persero), subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), merugikan negara sampai Rp 193,7 triliun (*tempo.co*). Masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang bisa menjadi contoh problem pengelolaan APBN di Indonesia dan pastinya merugikan ratusan triliun bahkan kuadriliun keuangan negara. Belum lagi adanya pemborosan, kebocoran anggaran, dan sebagainya. Padahal tanggungan utang negara yang wajib dibayar pada tahun ini juga sudah antri sebesar Rp 800,33 triliun. Itu belum termasuk pembayaran bunganya. Anggaran Indonesia terjebak dalam peribahasa *besar pasak daripada tiang*, pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan jauhnya pengelolaan APBN dari kata efisiensi seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo.

Namun demikian, tulisan ini tidak ditujukan untuk itu, tetapi untuk memaparkan pengelolaan APBN sesuai syariah Islam yang hakiki. Tentunya dengan paradigma Islam dan sistem ekonomi Islam yang diimplementasikan oleh negara, yang mampu menjawab kegelisahan dalam pengelolaan APBN yang selama ini terjadi.

APBN Syariah: Kemandirian Ekonomi

Pengelolaan APBN yang mengacu pada syariah disusun secara efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. APBN sebagai instrumen utama pengelola keuangan negara tugasnya membantu negara mewujudkan pembangunan, yaitu memecahkan masalah kebutuhan hidup yang dihadapi setiap individu di masyarakat, mendorong meningkatkan taraf hidup mereka dan mengupayakan kemakmuran (Syaiikh Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, hlm. 60). APBN dalam sistem ekonomi Islam diperankan oleh Baitul Mal sebagai lembaga penyimpanan berbagai pemasukan sekaligus bertugas untuk mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan pos-posnya yang ada menurut syariah (*Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukmi wa al-Idârah*, hlm. 135).

Pos-pos pemasukan APBN Islam (Baitul Mal) telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum (2003) sebagai berikut: harta rampasan perang (*anfâl*, *ghanîmah*, *fai'* dan *khumûs*); beberapa pungutan dari tanah *kharaj* dan *jiyâh*; harta milik umum; harta milik negara; harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (*'usyr*); harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram; zakat; dsb.

Negara boleh melakukan penyitaan atas harta pejabat karena diperoleh dengan cara

haram, seperti: korupsi (*ghulûl*), hadiah, hibah dan suap (*risywah*), judi, baik langsung maupun *online* (judol), harta yang diperoleh dengan cara sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaannya, dan sebagainya. Harta-harta tersebut bisa menjadi pemasukan negara. Sumber terbesar APBN Islam adalah harta milik umum (*milkiyyah 'ammah*) sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَأَى، وَالنَّارِ»
Manusia berserikat dalam tiga hal: air, pandang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Semua SDA yang depositnya melimpah menjadi milik umum. SDA ini wajib dikelola negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, haram diserahkan ke swasta apalagi swasta asing. Bisa dibayangkan jika Indonesia serius menerapkan sistem ekonomi Islam, betapa APBN dalam pos-pos penghasilannya sangat melimpah. Triono (2014) menghitung pendapatan APBN Indonesia, jika menggunakan sistem Islam, adalah sebesar Rp 5.216,275 triliun pertahun dengan rincian dari potensi zakat Rp 217 triliun dan dari pos kepemilikan umum sebesar Rp 4.999,275 triliun. Itu belum dari harta-harta sitaan akibat penyelewengan pejabat, seperti: korupsi, suap, dan sebagainya.

Adapun untuk pos-pos pengeluaran APBN Syariah ditetapkan berdasarkan enam kaidah, yaitu:

- (1) Harta zakat menjadi hak delapan *ashnaf* sebagaimana QS at-Taubah ayat 60 (*fakir, miskin, amil, mu'alah, riqâb, gharîm, ibnu sabil, fî sabilillah*). Jika harta zakat kurang atau bahkan kosong, maka negara tidak wajib mencarikan pinjaman melainkan



APBN dalam Islam adalah hukum-hukum syariah tentang pendapatan dan pengeluaran harta negara yang ada di Baitul Mal. Sifat hukum syariah dalam hal ini adalah qath'i sehingga secara mutlak tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing pos yang ada

wajib menarik zakat dari para *muzakky* (orang-orang yang wajib zakat).

- (2) Pembelanjaan wajib untuk fakir miskin, *ibnu sabil* atau untuk jihad. Untuk ini negara dapat berutang. Untuk melunasi utang ini negara boleh menarik pajak asalakan sesuai dengan ketentuan syariah.
- (3) Kompensasi jasa untuk negara, misalnya gaji tentara, ASN, hakim, guru, dan sebagainya hukumnya wajib.
- (4) Pembelanjaan karena darurat, seperti bencana longsor, banjir bandang, tsunami, dan sebagainya hukumnya wajib.
- (5) Untuk proyek-proyek kemaslahatan vital, jika tidak ada, umat akan merasakan kesulitan—seperti: jalan raya, sekolahan, rumah sakit dan sebagainya—hukumnya wajib.
- (6) Untuk pembangunan kemaslahatan umat, namun sifatnya non-vital (sekunder).

Adapun program makan bergizi perlu ditinjau lagi terutama teknis distribusi dana untuk program ini. Dalam hal ini bisa dilaksanakan pemangkasan untuk efisiensi anggaran. Negara boleh mengambil pajak (yang sifatnya sementara dan terbatas) jika sektor-sektor penting pada pos pengeluaran di atas kurang atau bahkan kosong. Pada sektor-sektor tersebut, negara tidak boleh melakukan pemangkasan anggaran dengan alasan apapun, termasuk alasan efisiensi. Dengan skema APBN Syariah seperti di atas, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, mandiri dan tidak bergantung pada pajak, utang, maupun investasi apalagi investasi asing.

Efisiensi dan Politik Anggaran dalam Islam

APBN dalam Islam adalah hukum-hukum syariah tentang pendapatan dan pengeluaran harta negara yang ada di *Baitul Mal*. Sifat hukum syariah dalam hal ini adalah *qath'i* sehingga secara mutlak tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing pos yang ada (baik dalam pos pendapatan maupun dalam pos pengeluaran). APBN Islam telah menetapkan pos-pos pendapatan dan pos-pos pengeluarannya. APBN Islam tidak dibuat secara periodik tahunan sebagaimana APBN di negara demokrasi Kapitalisme sehingga tidak mengenal istilah devisa anggaran. APBN Islam tidak membutuhkan persetujuan DPR meskipun DPR dapat memberi masukan. Kepala negara (*Khalifah*) bisa menyusun APBN melalui hak *tabanni* (adopsi hukum syariah) dengan dibantu oleh jajaran-jajaran pejabat yang ada di sekitarnya. Alokasi dana masing-masing pos pendapatan dan pengeluaran APBN Islam diserahkan kepada pendapat dan ijtihad kepala negara.

Dalam proses penyusunan APBN Islam yang dihitung terlebih dulu adalah pos pengeluaran kemudian pos pendapatan. Pengeluaran APBN Islam dihitung berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan yang menurut syariah paling vital dan urgen, yaitu *al-hajaat adh-dharuri*, baru pengeluaran pelengkapannya. Negara menggunakan rasio-rasio ideal berdasarkan data wilayah dan kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah, serta harga pasar rata-rata saat ini. APBN Islam tidak mengacu pada asumsi dolar dan tingkat inflasi sebagai patokan sehingga tidak mengenal perubahan inflasi sehingga APBN direvisi, muncul istilah APBN-Perubahan. Pengeluaran dalam APBN Islam tidak bersifat *fixed* seperti APBN konvensional yang berkonsekuensi alokasi anggaran harus habis dan terserap. Meskipun faktanya tidak semua anggaran belanja habis dan terserap. Pada titik inilah, sering dilakukan berbagai cara agar anggaran bisa habis sehingga membuka peluang korupsi.

Alokasi APBN Islam dari masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel. Jika di tengah jalan ternyata penerimaannya kurang, dengan mudah Kepala Negara akan menggenjot penerimaan tersebut. Begitu juga dengan pemasukannya. Jika alokasi yang dianggarkan lebih, kelebihan tersebut tidak harus dihabiskan, tetapi bisa dikembalikan kepada Pemerintah pusat, atau ditahan di masing-masing daerah sebagai saldo anggaran untuk dimasukkan dalam alokasi anggaran berikutnya.

APBN Islam menganut prinsip sentralisasi. Artinya, dana dari seluruh wilayah ditarik ke Pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan berdasarkan jumlah pe-

masukannya. Jika ada daerah yang sedang membangun dan membutuhkan dana besar, sementara pemasukannya tidak sebesar yang dibutuhkan, maka negara dapat mensubsidi daerah tersebut. Dengan cara ini, tidak ada satu alokasi anggaran pun yang menguap atau tidak tepat sasaran. Pemerataan pembangunan pun bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak ada ketimpangan antardaerah.

Secara teknis jumlah kebutuhan negara bisa diperhitungkan dengan matang oleh Kepala Negara dengan dibantu oleh para aparaturnya. Program-program negara yang sifatnya tidak mendesak bisa ditangguhkan untuk melakukan efisiensi. Bahkan produksi atas SDA bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan hajat hidup masyarakat, bukan semata-mata untuk kerakusan sektor ekonomi, sehingga menjadi bisnis layaknya kapitalisme. Negara wajib memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, seperti kunjungan-kunjungan yang hanya untuk kesenangan pejabat semata, apalagi harus menginap di hotel berkelas, dan sebagainya. Prinsip efisiensi harus dilihat dari kacamata efektivitas teknis dan manajemen sehingga berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Tidak mempengaruhi pelayanan dan hak-hak rakyat. Kebutuhan APBN berdasarkan syariah Islam mutlak membutuhkan individu yang amanah dan sistem Islam.

Kesimpulan

Mengelola APBN sesuai dengan syariah memerlukan keberadaan negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh. APBN dalam Islam diperankan oleh Baitul Mal. Baitul Mal memprioritaskan pemenuhan kebutuhan *dharuri* sebagai pelaksana *ri'ayah syu-ûn al-'ummah* (mengelola urusan-urusan masyara-



Negara, dalam mengelola anggaran, menjalankan prinsip efisiensi ketika kondisi kas atau harta negara di Baitul Mal sedang menipis. Namun, negara tetap wajib memperhatikan dan memprioritaskan enam sektor wajib di atas bisa terpenuhi...

kat) dengan Islam berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Jangan sampai ada satu individu warga negara yang terlewat. Semua wajib terpenuhi dengan standar kecukupan masing-masing. Negara, dalam mengelola anggaran, menjalankan prinsip efisiensi ketika kondisi kas atau harta negara di Baitul Mal sedang menipis. Namun, negara tetap wajib memperhatikan dan memprioritaskan enam sektor wajib di atas bisa terpenuhi tanpa ada pemangkasan yang bisa membahayakan kesejahteraan rakyat. Jika dana yang ada di *Baitul Mal* tidak mencukupi, negara boleh menarik pajak (*dharibah*) akibat kondisi darurat yang diambil secara sementara dan hanya dari Muslim yang kaya saja. Sumber pemasukan negara yang berasal dari kekayaan alam, zakat, dari pungutan beberapa sektor (*jizyah, kharaj*), dan sebagainya sangat memungkinkan melimpah sehingga bisa menjamin kas di Baitul Mal selalu ada stok kekayaan. Negara harus

menyita harta hasil korupsi sebagai harta *ghulûl*. Pengeluaran yang tidak penting harus dipangkas, sementara kebocoran keuangan akibat korupsi dan suap harus ditutup dengan sistem pengawasan yang ketat dan diterapkannya sanksi yang membuat jera. Prinsip efisiensi diterapkan tanpa mengorbankan hak-hak rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBN syariah selain bertumpu pada individu yang bertakwa, amanah dan berintegritas tinggi; juga bergantung pada sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah secara *kâffah*. Penerapan prinsip-prinsip APBN tersebut dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh rakyat dan warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir *dzimmy*, bahkan menjadi rahmat seluruh alam.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Daftar Rujukan

- Abdul Qaddim Zallum. (2004). *Al-Amwal fî Daulatil Khilafah*. Dârul Ummah, Beirut, Libanon.
- Abdurrahman Al-Maliki. (2001). *As-Siyaasatu al-Iqtishodiyatu al-Mutsala*. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.
- Anonim. (2015). *Ajihizah Daulati al-Khilafah fî al-Hukmi wa al-Idaroti*. Pustaka Fikrul Mustanir, Bogor.
- Syeikh Taqyuddin An-Nabhany. (2004). *Sistem Ekonomi Islam*. Dârul Ummah, Beirut, Libanon.
- Triono, Dwi Condro. (2014). *Perbandingan Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Penerbit Hidayah, Yogyakarta.
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Relevansi-Nilai-Islam-dalam-Keuangan-Negara>
- <https://www.tempo.co/ekonomi/8-kasus-dugaan-korupsi-yang-pernah-terjadi-di-pertamina--1212613>



MENGGADAIKAN BUMN LEWAT DANANTARA

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan ini dirancang sebagai super *holding* yang menaungi sejumlah BUMN dan *holding* BUMN.

Pada tahap awal, lembaga ini mencakup BUMN dengan aset terbesar: Pertamina, PLN, Telkom, Mandiri, BRI, BNI, dan Mind ID. Modal badan ini juga berasal dari INA (*Indonesia Investment Authority*) sebesar Rp 163 triliun dan dana yang berasal dari efisiensi anggaran APBN 2025. Total aset Danantara ditargetkan mencapai US\$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.720 triliun.

Danantara mengadopsi model Sovereign Wealth Fund seperti Temasek dan Khazanah yang menjadi perusahaan *holding* atas sejumlah perusahaan. Model ini relatif berbeda dengan kebanyakan SWF di berbagai negara. Sovereign Wealth Funds (SWFs) adalah instrumen investasi yang dimiliki dan dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah (pusat atau daerah)

untuk mengelola pendapatan negara seperti yang berasal dari surplus penjualan sumber daya alam seperti minyak mentah. Dana tersebut kemudian diinvestasikan untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi penurunan pendapatan, misalnya ketika harga minyak turun (contoh: Russian National Wealth Fund), sebagai tabungan pada masa depan (contoh: Abu Dhabi Investment Authority) atau membayar pensiun (contoh: Australia Future Fund, Government Pension Fund-Global Norwegia).¹

Sementara itu, Danantara hanya menggabungkan BUMN yang sudah ada ke dalam satu *holding*. *Holding* ini nantinya akan mengelola dividen dan memberdayakan aset BUMN untuk kegiatan investasi serta mengawasi kegiatan operasional BUMN.²

Potensi Korupsi

Salah satu kekhawatiran terbesar dari pembentukan Danantara adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. UU No. 1/2025 secara kontroversial membatasi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). BPK tidak lagi dapat melakukan audit keuangan dan kinerja terhadap badan tersebut sebagaimana dilakukan terhadap BUMN sebelumnya. Peran BPK kini terbatas pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan hanya dilakukan atas permintaan DPR.

UU BUMN yang baru juga memberikan kelonggaran kepada direksi dan komisaris untuk menerapkan Business Judgment Rule (BJR), yang dapat disalahgunakan sebagai tameng untuk melindungi keputusan-keputusan yang berpotensi merugikan negara. Sebagai informasi, BJR adalah doktrin hukum yang melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang merugikan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, dan tanpa konflik kepentingan. Penerapan aturan ini bertujuan mengatasi kekhawatiran manajemen BUMN dalam mengambil keputusan strategis karena berpotensi merugi sehingga dapat dikriminalisasi. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, BJR dapat menciptakan budaya imunitas dalam pengelolaan BUMN, terutama ketika persoalan korupsi sangat marak di Indonesia. Berbagai aturan tersebut menciptakan celah yang besar dalam sistem pengawasan Danantara yang direncanakan mengelola aset jumbo. Padahal dengan pengawasan BPK yang kuat, kasus *fraud* seperti Jiwasraya, Asabri, Taspen serta korupsi BBM di Pertamina tetap terjadi dan pada akhirnya terungkap lewat audit lembaga itu.

Kekhawatiran terhadap independensi dan transparansi Danantara semakin meningkat karena badan itu diisi oleh figur yang dekat dengan Presiden Prabowo, seperti Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas dan Rosan Roeslani sebagai Ketua Badan Pelaksana, yang sebelumnya menjadi ketua tim sukses Prabowo-Gibran. Struktur kepemimpinan ini menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik dalam pengambilan keputusan inves-

tasi, berpotensi menyebabkan konflik kepentingan yang merugikan negara. Kasus IMDB di Malaysia yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak menjadi contoh bagaimana dana investasi negara dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik dan pribadi.

Risiko lain yang berpotensi terjadi pada Danantara adalah peluang privatisasi yang semakin mudah. Untuk mengakomodasi independensi Danantara, UU BUMN yang baru secara tegas memisahkan status kekayaan BUMN dari kekayaan negara. Pasal 94A huruf b mengecualikan BUMN dari ketentuan perundang-undangan terkait keuangan negara, perbendaharaan negara dan PNBP. Pemisahan ini membuka jalan bagi privatisasi BUMN tanpa kontrol publik yang memadai.

Sebelumnya, kekayaan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Karena itu kerugian bisnis otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang dapat dipidanakan. Status ini memungkinkan BPK melakukan audit penuh terhadap BUMN. Namun, UU No. 1/2025 telah memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara. Ini menyebabkan audit rutin dilakukan oleh akuntan publik, sementara wewenang BPK dibatasi. Di sisi lain, manajemen BUMN mendapatkan perlindungan hukum melalui Business Judgment Rule, yang semakin meningkatkan fleksibilitas mereka.

Dengan ketentuan ini, privatisasi aset BUMN menjadi lebih mudah, terutama bagi BUMN yang dianggap tidak sehat dan membebani kinerja Danantara. Meskipun UU mensyaratkan persetujuan DPR untuk privatisasi, tetap ada risiko bahwa aset strategis negara dapat beralih ke pihak swasta atau asing dengan mudah. Hal ini tentu mengkhawatirkan terutama bagi BUMN di sektor vital seperti energi, telekomunikasi dan pertambangan. UU memang membatasi privatisasi hanya pada BUMN yang beroperasi di sektor kompetitif dan tidak terkait langsung dengan hajat

hidup orang banyak. Namun, definisi “hajat hidup orang banyak” tidak didefinisikan secara jelas. Hal ini membuka peluang interpretasi yang dapat merugikan negara.

Risiko kerugian akibat investasi di sektor non-riil juga menghantui Danantara. Danantara berencana mengalokasikan sebagian asetnya untuk investasi di sektor riil dan portofolio, yang menghadapi berbagai risiko pasar. Fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga, dan perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi nilai investasi dan pendapatan badan tersebut. Investasi berisiko tinggi seperti hilirisasi atau energi terbarukan memang strategis untuk pembangunan jangka panjang, tetapi juga sangat rentan terhadap volatilitas pasar. Tanpa manajemen risiko yang cangguh dan diversifikasi yang tepat, Danantara berpotensi mengalami kerugian besar yang pada akhirnya dapat berdampak pada keuangan negara.

Konsentrasi aset yang terlalu besar di satu lembaga juga menciptakan risiko sistemik. Jika Danantara mengalami kesulitan keuangan atau kehilangan kepercayaan publik, dampaknya dapat meluas ke sektor perbankan, termasuk potensi *rush* di bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI. Selain itu, jika Danantara terlalu agresif dalam berinvestasi atau mengambil utang berlebihan (*over leverage*) untuk sektor yang berisiko seperti pasar modal, bisa terjadi kerugian besar yang memaksa penjualan aset secara cepat untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Alternatifnya, Pemerintah harus memberikan *bailout* kepada badan itu dalam jumlah besar sehingga belanja publik akan berkurang atau utang negara akan membengkak.

Risiko lainnya adalah potensi penurunan kontribusi BUMN untuk publik. Alokasi pendapatan Danantara yang sepenuhnya dikendalikan oleh Badan Pengelola dan Badan Pengawas menyebabkan berkurangnya intervensi langsung Pemerintah terhadap BUMN

untuk kemaslahatan publik. Ada risiko bahwa investasi Danantara lebih banyak mengalir ke sektor yang menghasilkan keuntungan besar dalam jangka pendek, sementara sektor yang tidak langsung menguntungkan tetapi penting untuk masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur non-komersial, subsidi BBM di wilayah terpencil, atau jaringan listrik terjangkau, terabaikan. Selain itu, dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini sepenuhnya dikontrol oleh Badan Pengelola Danantara, yang dapat mengurangi pemasukan negara dan mengurangi manfaat langsung bagi rakyat.

Perspektif Islam dalam Pengelolaan Baitul Mal

Dalam sistem Islam, pengelolaan kekayaan negara memiliki dasar yang sangat berbeda dari sistem kapitalisme. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Negara Khilafah menerapkan sistem ekonomi yang bersumber sepenuhnya dari dalil-dalil syariah Islam, meliputi al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qi-yas. Baitul Mal menjadi lembaga sentral yang bertanggung jawab mengelola berbagai jenis kekayaan yang dimiliki oleh umat dan negara.

Harta milik umum dalam Islam telah didefinisikan dengan jelas, mencakup tiga kategori: (1) sarana penting bagi kehidupan sehari-hari umat Muslim seperti air bersih dan energi; (2) sarana yang pembentukannya menghalangi kepemilikan individu seperti laut, sungai, danau, dan fasilitas umum; (3) barang tambang dengan deposit besar seperti minyak bumi dan gas alam.

Adapun harta milik negara antara lain tanah tak bertuan, tanah endapan sungai, *ash-shawâfi* (tanah yang dikuasai negara setelah pembebasan wilayah), serta bangunan dan balairung publik. Harta Baitul Mal lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada ijtihad Khalifah antara lain *anfâl* dan *ghanimah*

(harta rampasan perang), *fai'* (harta yang diperoleh tanpa peperangan), *kharaj*, *jizyah* (kewajiban yang dibayarkan non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan Negara Islam), *'usyur* (pungutan perdagangan).

Dalam sistem Khilafah, pengelolaan harta Baitul Mal harus sesuai dengan syariah Islam. Pengembangan harta tersebut dengan melibatkan sektor-sektor yang diharamkan, seperti perbankan ribawi, tidak diperbolehkan. Keuntungan dari perusahaan milik negara wajib dimasukkan ke Baitul Mal dan dikelola berdasarkan ijtihad Khalifah, dan haram diinvestasikan pada instrumen investasi yang melanggar syariah seperti portofolio saham dan obligasi berbasis bunga.

Harta yang menjadi milik umum tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh pihak swasta. Karena itu, harta-harta milik umum yang dikuasai oleh swasta harus dikelola oleh BUMN. Dengan itu pengelolaan aset-aset tersebut akan menghasilkan pendapatan besar yang secara langsung dapat masuk ke APBN. Karena itu penguasaan barang-barang tambang oleh swasta di negara ini bertentangan dengan Islam.

Sementara itu, harta Baitul Mal yang bukan harta milik umum dan harta zakat, seperti tanah, dapat dibagikan oleh Khalifah sesuai dengan ijtihadnya untuk kemaslahatan umat. Seluruh pengelolaan harta ini wajib dilakukan secara profesional oleh individu-individu yang memiliki ketakwaan dan kecakapan. Dengan itu kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh umat. Hal ini juga mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, Danantara, sebagai super *holding* BUMN dengan model Sovereign Wealth Fund, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dalam beberapa aspek krusial, antara lain:

- (1) Pendirian Danantara sama sekali tidak merujuk pada Islam sebagai dasar pembentukan, operasional dan investasinya;
- (2) Investasi di sektor keuangan seperti perbankan ribawi dan pasar modal (antara lain saham dan obligasi) bertentangan dengan larangan Islam terhadap transaksi yang batil termasuk riba;
- (3) Pemisahan status kekayaan BUMN dari kekayaan negara jika memudahkan privatisasi harta milik umum (*al-milkiyah al-'aammah*) bertentangan dengan Islam yang melarang privatisasi aset-aset tersebut;
- 4) Pembiaran badan itu atas penguasaan kekayaan milik umum seperti sumber daya alam seperti migas, batubara, emas dan nikel oleh swasta merupakan kemungkaran.

Alhasil, di bawah sistem kapitalisme, pengelolaan ekonomi negara termasuk kekayaan alamnya akan selalu menimbulkan problem dalam perspektif Islam. Pasalnya, sistem kapitalisme menjadi landasan Danantara, yang pengelolaannya sama sekali tidak merujuk pada aturan-aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Karena itu penerapan Islam secara paripurna dalam institusi Khilafah Islam merupakan satu-satunya metode agar pengelolaan negara ini mendapatkan keridhaan Allah SWT, serta mewujudkan rahmat bagi rakyat dan negara secara bersamaan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1). Salman Bahoo, Ilan Alon, dan Andrea Paltrinieri, "Sovereign Wealth Funds: Past, Present and Future," *International Review of Financial Analysis* 67 (2020): 101418.
- 2). UU Nomor I Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

MENGOKOHKAN KEYAKINAN PADA AL-QURAN

“Al-Quran, di dalamnya bukan hanya tidak dijumpai pertentangan ayat satu dengan yang lainnya, tetapi juga tidak dijumpai pertentangannya dengan sains modern.”

(Gary Millier, Saintis, mantan Pendeta)

++++

Tengah bulan Januari lalu, saya sempat berkunjung ke Museum Nasional Peradaban Mesir (*National Museum of Egyptian Civilization*) di Kairo, Mesir. Di Museum itu tersimpan mummy/jasad Ramses II. Jasad (mummy) itu diyakini adalah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah dalam kisah Nabi Musa as. Tubuhnya, meski tampak mengecil, relatif utuh. Bahkan wajah dan rambutnya masih terlihat sangat jelas.

Keadaan jasad Fir'aun itulah yang mengundang tanya Maurice Bucaille. Ia adalah seorang dokter bedah berkebangsaan Prancis dengan spesifikasi keahlian dalam bidang gastroentologi (pencernaan). Pada tahun 1973 ia meneliti jasad dari orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan ini dengan metode radio grafik, thorax dan endoscopy sehingga

mendapatkan rincian setiap bagian tubuh. Saat itu ia menemukan dua keanehan. *Pertama*, bagaimana bisa jasad dari orang yang sudah mati ribuan tahun lalu tetap dalam keadaan utuh. *Kedua*, banyaknya kandungan garam yang memenuhi sekujur tubuhnya sehingga dia terawetkan lebih sempurna. Artinya, mummy tersebut mati dalam keadaan tenggelam di laut.

Ketika hal itu ditanyakan kepada orang-orang di sekitarnya, ia tidak menemukan jawaban. Sampai suatu ketika ia hadir dalam seminar tentang mummy di Kairo, pertanyaan itu ia sampaikan kepada forum. Salah satu pembicara memberikan penjelasan panjang lebar seraya mengutip firman Allah SWT (yang artinya): *Pada hari ini Kami menyelamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah dirimu. Namun, kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami* (TQS Yunus [10]: 92).

Dikutip juga ayat sebelumnya (yang artinya): *Kami menyelamatkan Bani Israil melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan balatentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas (mereka). Lalu ketika Fir'aun ham-*

pir tenggelam, dia berkata, “Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan (TQS Yunus [10]: 90-91).

Hasil penelitian Bucaille ini kemudian diterbitkan dalam buku berjudul *Momies Des Pharaon: Investigations Medicales Modernes*. Buku ini menjadikan penulisnya meraih penghargaan bidang sejarah dari Prix d'histoire Academie Nationale de Medecine, Prancis.

Bucaille juga menulis buku *La Bible, le Coran et la Science* (1976) yang menjadi best-seller internasional di dunia Muslim dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di Indonesia, buku itu diterjemahkan oleh Dr. HM Rasyidi, tokoh Muhammadiyah, alumni Sorbonne University, Prancis, dengan judul: *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*. Menurut Rasyidi, Bucaille heran dengan al-Quran yang turun 14 abad lampau, namun memuat soal-soal ilmiah yang baru diketahui manusia pada abad ke 19-20. Bucaille lalu berkesimpulan bahwa al-Quran adalah wahyu Ilahi yang murni dan Nabi Muhammad saw. adalah nabi terakhir. Dari sana ia kemudian memutuskan untuk masuk Islam.

Bukan hanya Bucaille. Banyak lagi ilmuwan dan para cerdik pandai lainnya yang akhirnya juga menemukan kebenaran berkat perhatiannya pada al-Quran. Salah satunya Gary Miller. Ia adalah seorang matematikawan yang juga seorang pendeta. Maksud hati, melalui riset panjang terhadap al-Quran, ia hendak menunjukkan kelemahan al-Quran kepada jamaah di gerejanya. Apa daya, yang

ia jumpai justru kekuatan al-Quran.

Semula ia sudah senang saat dalam risetnya itu saat membaca QS an-Nisa' ayat 82. Ayat tersebut intinya mengatakan bahwa jika al-Quran ini bukan datang dari sisi Allah, pasti akan dijumpai banyak ikhtilaf atau perselisihan ayat satu sama lain. Seolah mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan al-Quran, Gary Miller terus meneliti al-Quran berharap ada banyak perselisihan itu.

Namun, setelah sekian lama meneliti al-Quran, ia tak menjumpai satu pun perselisihan itu. Bahkan ia juga tak menjumpai perselisihan ayat-ayat al-Quran dengan sains modern. Di antaranya ia menunjuk rangkaian ayat dalam QS al-Mu'minin ayat 12-14 yang menceritakan fase-fase pertumbuhan janin di rahim ibu, mulai dari *nutfah* hingga *idhamah*. Semuanya persis sama dengan yang diketahui dalam ilmu kedokteran modern. “Al-Quran, di dalamnya bukan hanya tidak dijumpai pertentangan ayat satu dengan yang lainnya, tetapi juga tidak dijumpai pertentangannya dengan sains modern,” simpulnya. Akhirnya, Gary Miller, yang berniat mau melecehkan al-Quran, malah memilih masuk Islam, dan mengubah namanya menjadi Abdul Wahid Omar.

Dari dua kisah di atas, nyatalah betapa besar pengaruh keyakinan akan kebenaran al-Quran. Mampu menghantarkan dua ilmuwan hebat di masanya ke haribaan Islam, meninggalkan agama lamanya yang mungkin telah memberikan segalanya pada dirinya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi saw. dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim bahwa dengan al-Quran Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain.

Oleh karena itu, penting bagi kita yang sudah lama menjadi Muslim untuk terus meningkatkan keyakinan akan al-Quran sebagai kalamullah. Keengganan untuk tunduk pada isi al-Quran, termasuk malas membaca dan mengkaji al-Quran, sangat boleh jadi berpangkal pada kerapuhan keyakinan itu, juga ketidakpahaman akan kemuliaan kita saat dekat dengan al-Quran.

Sabda Nabi saw. dalam hadis riwayat Imam at-Tirmidzi, bahwa siapa yang membaca satu huruf al-Quran akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang serupa. Juga disabdakan dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim, al-Quran akan datang pada Hari Kiamat kelak untuk memberikan syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabat al-Quran itu? Tentu saja yang semasa di dunia rajin membaca al-Quran.

Jika demikian, seberapa sering kita dianjurkan membaca al-Quran? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menganjurkan untuk membaca atau mengkhawatamkan al-Quran minimal sebulan sekali. Jika satu bulan 30 hari dan al-Quran 30 juz, maka kita dianjurkan untuk membaca al-Quran setidaknya satu hari satu juz. Lalu setiap kali selesai, segera memulai dari awal lagi. Inilah yang dalam hadis riwayat Tirmidzi disebut *al-hal wal murtahil*. Sebuah amalan yang sangat disukai Allah. Apa itu? Yaitu membaca al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.

Selain membaca, tentu saja yang paling utama adalah menerapkan isinya dalam kehidupan nyata. Dalam hadis riwayat Imam ath-Thabarani, Nabi saw. berpesan untuk selalu bersama al-Quran. Bahkan jika kita berhadapan dengan penguasa yang telah memisah-

Dalam hadis riwayat Imam ath-Thabarani, Nabi saw. berpesan untuk selalu bersama al-Quran. Bahkan jika kita berhadapan dengan penguasa yang telah memisahkan dari al-Quran, tetap jangan kita berpisah dari al-Quran. Apapun risikonya. Meski harus ditebus dengan kematian sekalipun.

kan dari al-Quran, tetap jangan kita berpisah dari al-Quran. Apapun risikonya. Meski harus ditebus dengan kematian sekalipun. Mengapa? Kata Nabi, mati di atas ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Diri-Nya.

++++

Meski kita tidak lagi pada bulan Ramadhan, bulan yang biasanya diidentikkan dengan al-Quran, ikhtiar untuk meningkatkan kekokohan keyakinan pada al-Quran harus tetap terus dilakukan. Kisah inspiratif Maurice Bucaille dan Gary Miller bisa menjadi contoh bagaimana keyakinan itu didapatkan.

Di atas keyakinan yang kokoh itu, kegemaran membaca dan mengkaji al-Quran insya Allah akan terus bisa ditingkatkan. Berikutnya, al-Quran diamalkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta diperjuangkan hingga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Insya Allah []



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SIAPAKAH "GHÂRIMÎN" YANG LAYAK DIBERI ZAKAT?

Soal:

Siapakah "Ghârimîn" yang disebut sebagai bagian dari "Ashnâf" delapan dan layak mendapatkan zakat? Apakah kebutuhan untuk maksiat, termasuk kategori "Ghârimîn" yang layak diberi zakat?

Jawab:

Secara harfiah, "Ghârimîn" bentuk jamak dari kata "Ghârim", yaitu orang yang berutang (*Madîn*).¹ Menurut istilah, "Ghârimîn" adalah:

الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وَقَاءِ دُيُونِهِمْ. وَقَالَ
مُجَاهِدٌ: الْغَارِمُونَ هُمْ قَوْمٌ رَكِبَتْهُمْ الدُّيُونُ مِنْ
غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا تَبْذِيرٍ

Orang yang berutang dan tidak mampu membayar utang-utang mereka. Mujahid menambahkan: Ghârim adalah orang yang memikul beban utang, bukan untuk keperluan maupun perkara yang mubazir.²

Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabîr li al-Fatawa*, menjelaskan pendapat Imam as-Syafii. Menurut Imam as-Syafii, "Ghârimîn" ini bisa dibedakan menjadi dua kategori.³

Pertama: Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi, atau kebaikan, bukan maksiat, kemudian tidak mampu mengembalikan pinjamannya, baik dengan barang (aset) maupun uang *cash*. Dia bisa diberi zakat karena status "Ghârim"-nya dan karena dia tidak mampu membayar. Kalau dia mempunyai barang (aset) maka utang-utangnya bisa dibayar dengan menggunakan asetnya. Orang ini dianggap kaya dan tidak boleh diberi zakat sehingga dia terbebas dari utang, sampai apa yang menjadi asetnya habis, dan apa yang membuat dirinya dianggap kaya tidak ada lagi. Pada saat itu, dia boleh diberi zakat.

Kedua: Orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, untuk kebaikan, sedangkan dia mempunyai aset yang digunakan untuk menanggung kewajibannya. Jika aset itu dijual akan membahayakan mereka meski kalau dijual tidak sampai membuat dirinya menjadi fakir. Orang ini boleh diberi, sebagaimana orang yang membutuhkan lainnya.⁴ Dalam kitab *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*, Imam an-Nawawi bahkan memasukkan orang ini dalam kategori orang yang berutang untuk membayar *diyât* orang yang dibunuh.⁵

Imam as-Syafii berargumen dengan menggunakan hadis Qabishah bin Mukhariq al-Hilali. Dulu orang Arab hidup bersuku-suku dan kabilah. Di antara mereka kadang terjadi konflik. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang berusaha mendamaikan kedua pi-

hak dengan memberikan sesuatu kepada para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Untuk melakukan itu, orang yang mendamaikan ini kadang harus pinjam ke sana-sini sehingga menjadi tanggungannya. Tanggungan inilah yang disebut “Hamalah”, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Qabishah. Jadi, Qabishah telah menanggung “Hamalah”, kemudian disampaikan kepada Nabi saw.

«تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَمِمٌ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُنْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ - يَا قَبِيصَةَ - سَحْتًا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا.»

Aku telah menanggung tanggungan [hamalah]. Lalu aku datang kepada Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu. Beliau kemudian bersabda, “Tunggulah sampai sedekah [zakat] itu datang kepada kami. Lalu kami akan menitahkannya untuk menyelesaikan masalahmu.” Baginda bersabda, “Wahai Qubishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Pertama, orang yang menanggung beban [hamalah]. Dia boleh

meminta sampai mendapatkannya, lalu dia menahan diri [tidak meminta-minta lagi]. Kedua, orang yang terkena wabah penyakit yang menghabiskan hartanya. Dia boleh meminta sampai mendapatkan kecukupan untuk hidupnya—atau beliau mengatakan—untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ketiga, orang yang menjadi fakir hingga tiga orang dari pemuka kaumnya memela dirinya, ‘Kesulitan telah menimpa Fulan.’ Dia ini boleh meminta sampai mampu bertahan hidup atau—beliau mengatakan—sampai kebutuhan hidupnya terpenuhi. Adapun meminta lebih dari itu, wahai Qabishah, maka statusnya haram. Orang yang melakukan itu akan memakan makanan yang haram.” (HR Muslim dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, hadis no. 1044) ⁶

Mengenai kebolehan “Ghârimin” menerima zakat telah dinyatakan di dalam nas syariah, baik al-Quran maupun Hadis Nabi saw. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk fi sabilillah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ini sebagai suatu ketetapan yang telah Allah wajikan. Allah Mahatahu lagi Mahabijaksa-

na (QS at-Taubah [9]: 60).

Juga sabda Nabi saw.:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَيْرِي إِلَّا لِخَمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا
أَوْ غَارٍ أَوْ مُشْتَرِيهَا، أَوْ عَامِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ
جَارٍ فَقِيرٍ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ أَهْدَى لَهُ»

Sedekah tidak dihalalkan bagi orang kaya, kecuali untuk lima orang: Orang yang menjadi amil zakat; orang yang *Gharim*; orang yang membeli zakat [dari yang berhak]; Mujahid yang berjuang di jalan Allah; tetangga yang miskin, lalu [zakat diterima orang kaya] untuk disedekahkan kepada dirinya, atau dihadiahkan kepadanya (HR Abu Dawud, Malik dan Baihaqi dari 'Atha' bin Yasar).

Al-Mawardi kemudian merinci mereka yang masuk kategori "*Ghârimîn*". Mereka ada dua: *Pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan pribadinya. *Kedua*, orang yang berutang untuk kepentingan orang lain.

Adapun "*Ghârimîn*" yang berutang karena kepentingan pribadinya bisa dikategorikan menjadi tiga: *Pertama*, berutang untuk kebaikan. *Kedua*, berutang untuk perkara mubadzir. *Ketiga*, berutang untuk perkara maksiat.

Untuk kategori pertama, "*Ghârimîn*" yang berutang untuk kebaikan. Contohnya seperti orang yang berutang untuk membiayai musibah yang menimpa dirinya, seperti berobat, atau biaya yang harus dikeluarkan, atau kerugian akibat muamalah, atau zakat yang diwajibkan, atau haji yang harus ditunaikan, dan kewajiban lain yang harus ditunaikan. Dia boleh diberi bagian atas nama "*Ghârimîn*" jika

Orang yang berutang untuk perkara maksiat. Jika dia tidak bertobat, sebaliknya tetap dan terus melakukan maksiat, maka orang seperti ini tidak layak diberi zakat atas nama "Ghârimîn". Karena dia tidak boleh melakukan maksiat, maka tidak boleh dibantu untuk melakukan maksiat, dengan menanggung bebannya dalam melakukan maksiat.

memang dia miskin.

Namun, jika dia kaya, maka ada kemungkinan hartanya berupa properti, atau harta yang tidak liquid, seperti emas, kertas, aset bisnis, maka dia tidak berhak diberi bagian dari "*Ghârimîn*". Sebabnya, dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuan untuk melunasi utangnya. Karena faktanya, sedikit sekali orang yang hidupnya diberi kemudahan yang terbebas dari utang. Jika dia berhak maka semua orang yang diberi kemudahan hidup akan menjadi "*Ghârimîn*".

Jika hartanya berupa properti, yang harga asetnya hanya cukup membayarnya, maka untuk memberi dia zakat sebagai

bagian dari “*Ghârimîn*”, ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang paling shahih—dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh nas dalam konteks ini, dan banyak kitab Imam as-Syafii yang lain—menyatakan tidak boleh diberi. Karena dia mampu untuk membayar utangnya, sebagaimana orang yang diberi kemudahan dengan harta yang tidak liquid tadi. *Kedua*, Imam as-Syafii menyatakan di dalam *Qawl Qadiim*-nya,⁷ sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *Al-Umm*, bahwa orang tersebut boleh diberi.⁸ Ini karena tidak mampu membayar utangnya, kecuali dengan aset propertinya tadi. Dia memang termasuk orang yang kesulitan meski mirip dengan orang yang diberi kemudahan. Karena itu dia termasuk “*Ghârimîn*”.

Kedua, “*Ghârimîn*” yang berutang untuk perkara mubadzir. Misalnya, orang menghabiskan uangnya untuk memenuhi syahwatnya, kenikmatan atau berfoya-foya dalam menjalin hubungan dengan teman, atau memberikan hadiah, bukan untuk ketaatan maupun ketakwaan, maka orang “*Ghârimîn*” seperti ini tidak boleh diberi bagian dari “*Ghârimîn*”. Untuk membayar utangnya, bisa ditaksir dari hartanya yang non-liquid, atau propertinya. Ini karena dia tidak boleh melakukan perkara mubadzir. Jika dia tidak boleh melakukan perkara mubadzir dengan hartanya sendiri, apatah lagi menggunakan harta zakat. Itu kalau dia mempunyai harta. Jika dia miskin, tidak mempunyai aset maka dia boleh diberi zakat atas nama “*Ghârimîn*”.

Ketiga, orang yang berutang untuk perkara maksiat. Jika dia tidak bertobat, sebaliknya tetap dan terus melakukan maksiat, maka orang seperti ini tidak layak diberi zakat atas

nama “*Ghârimîn*”. Karena dia tidak boleh melakukan maksiat, maka tidak boleh dibantu untuk melakukan maksiat, dengan menanggung bebannya dalam melakukan maksiat.

Jika dia telah bertobat, dan meninggalkan maksiatnya, maka dia tidak boleh diberi bagian “*Ghârimîn*”, ketika dia mempunyai harta non-liquid, atau properti. Ini karena hartanya habis untuk menutupi maksiatnya lebih baik ketimbang harus ditutupi dengan harta zakat. Mengenai kebolehan memberikan zakat kepada dia, ketika dia miskin, ada dua pendapat:

Boleh diberi, ketika dia masih menanggung utang, dan maksiatnya telah ditinggalkan.

Tidak boleh diberi, karena tanggungannya disebabkan oleh perkara maksiat.⁹

Wallâhu a’lam. []

Catatan kaki:

- 1). Ibn al-Mandzhur, *Lisan al-‘Arab*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., Juz, hal.
- 2). Wizarat al-Auqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Dar as-Shafwah, Kuwait, Cet. I, 1414 H/1994 M, Juz, XXXI, hal. 124.
- 3). Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafii, *al-Umm*, Dar al-Wafa’, Qahirah, Cet. V, 1429 H/2008 M, Juz, III, hal. 183-185.
- 4). Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir li al-Fatawa*, Juz VIII, hal. 508.
- 5). Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, ed. Muhammad Aiman as-Syablawi, Dar al-Hadits, Qahirah, 1431 H/2010 M, Juz VII, hal. 327.
- 6). Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafii, *al-Umm*, Juz, III, hal. 184.
- 7). Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz VII, hal. 327.
- 8). Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafii, *al-Umm*, Juz, III, hal. 185.
- 9). Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir li al-Fatawa*, Juz VIII, hal. 509.

Masa bagimu seluruhnya Ramadhan/wahai sosok yang shaum dan shalat malam.

Syaikh Nawawi al-Bantani pun mengingatkan salah satu dari sepuluh amal Ramadhan dalam kitabnya, *Nihāyat az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, yakni konsisten menjalankan amal-amal shalih pada Bulan Ramadhan dan melanjutkan amal-amal tersebut pada bulan-bulan berikutnya. Ini membuktikan seorang Muslim adalah hamba *Rabbani*, bukan hamba *ramadhani*.

Pertanyaannya: Apakah kaum Muslim hari ini telah menegakkan syariah Islam secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan?

Syiar Penghapus Tradisi Jahiliyah

Dulu kala syiar Idul Fitri disyariatkan untuk menggantikan syiar-syiar jahiliyah sebelum Islam tiba di Yatsrib, dari Anas r.a.:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ». قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

Rasulullah saw. tiba di Madinah (Yatsrib). Saat itu penduduk Madinah memiliki dua hari (raya) yang di dalamnya mereka bersenang-senang, Nabi saw. bertanya, "Apa dua hari (raya) ini?" Mereka menjawab, "Kami dulu bersenang-senang di dalamnya pada masa jahiliyah." Rasulullah saw. lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya untuk kalian dengan hal yang lebih baik daripada keduanya, yakni Idul Adha dan Idul Fitri." (HR Abu Dawud dan al-Hakim).

Imam al-Munawi (w. 1031 H) dalam

Syarh-nya menyebut dua hari raya tersebut adalah Hari Nawruz dan Mahrajan. Mengurai hadis ini, Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) dalam *Fath al-Bari* (II/442) menuturkan: "Dari hadis ini digali hukum tentang keharusan membenci sikap turut bergembira atas hari-hari raya kaum musyrik (baca: kaum lafir) dan sikap menyerupai mereka. Bahkan Syaikh Abu Hafsh al-Kabir al-Nasafi dari golongan Hanafiyah menyatakan: 'Siapa saja yang memberikan hadiah sebuah telur kepada seorang musyrik pada hari rayanya, sebagai bentuk pengagungan atas hari raya tersebut, sungguh ia telah kufur kepada Allah.'"

Imam Badruddin al-'Aini (w. 855 H) dalam *Syarh Sunan Abi Dawud* (IV/477) menuturkan: "Dulu kaum jahiliyah bersenang-senang selama dua hari dalam setahun. Mereka melakukan berbagai perkara yang tidak Allah ridhai. Ketika Islam hadir, Allah mengganti dua hari tersebut dengan dua hari yang menggema di dalamnya syiar takbir, tahmid dan tauhid; dengan syiar yang terang-benderang dan menggema hingga membuat dongkol kaum musyrik."

Rasulullah saw. bahkan dalam hadis yang mulia ini mengajarkan paradigma Islam, bahwa Islam hadir untuk mengatur manusia, meskipun harus dengan cara mengganti tradisi berhari raya mereka yang mendarah daging secara turun-temurun dengan Hari Raya Islam. Ini menegaskan bahwa tradisi kehidupan manusia wajib sejalan dengan syariah Ilahi, yakni syariat Allah Yang telah menciptakan manusia.

Syiar Pemersatu Dunia Islam

Tak selayaknya tatkala Idul Fitri tiba, syariah ukhuwah dan kewajiban bersatu diabaikan, diganti dengan tradisi jahiliyah berpecah-belah dalam berhari raya. Apalagi jika itu merupakan konsekuensi dari keterpecahbelahan negeri-negeri kaum Muslim dalam se-

Penyatuan awal akhir Ramadhan ini bukan hal yang mustahil ketika umat berada di bawah naungan kepemimpinan Khalifah yang satu untuk seluruh kaum Muslim sedunia.

kat-sekat *nation states* yang menjadi warisan imperialis penggagas Perjanjian *Sykes Picot* yang batil. Kemana syiar Idul Fitri yang merupakan ajaran Rasulullah saw., yang justru disyariatkan pertama kali untuk menghapuskan tradisi jahiliyah?

Ketika Islam memimpin di Yatsrib (Madinah), Islam bukan hanya menghapuskan tradisi jahiliyah dalam berhari raya. Islam pun menghapuskan permusuhan yang diwarisi dari generasi ke generasi antara suku Aus dan Khazraj hingga dikenal Hari Bu'ats. Menurut Al-Hafiz al-Baghawi: "*Hari Bu'ats adalah hari yang masyhur. Ketika itu terjadi pembantaian besar-besaran Suku Aus atas Suku Khazraj. Perang ini berlangsung selama seratus dua puluh tahun hingga Islam datang.*"

Ketika mereka masuk Islam, Islam mempersaudarakan mereka dalam ukhuwah Islamiyah. Islam bahkan menyatukan syiar mereka dalam berhari raya: Idul Fitri.

Karena itu momentum Idul Fitri sudah seharusnya menjadi momentum persatuan Dunia Islam, menjauhi perpecahan. Hal ini bisa dimulai dengan kesatuan umat ini dalam mengakhiri Bulan Ramadhan dan mengawali

I Syawal sebagaimana pesan Rasulullah saw. yang bersabda:

«صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah (ber-Idul Fitri) karena melihat hilal. Jika jika ia terhalang dari pandangan kalian, sempurnakanlah hitungan Bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR *Muttafaq 'alayh*, lafal al-Bukhari).

Kalimat *afthirû* adalah perintah mengawali Idul Fitri (hilal I Syawal) dengan rukyat hilal, yang berlaku umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Penyatuan awal akhir Ramadhan ini bukan hal yang mustahil ketika umat berada di bawah naungan kepemimpinan Khalifah yang satu untuk seluruh kaum Muslim sedunia. Al-Qadhi 'Iyadh dalam kitab *Ikmâl al-Mu'lim bi Fawâ'id Muslim* menukilkan *maqalah* al-Imam al-Maziri (w. 1141 M) ketika menjelaskan *Shahih Muslim* tentang rukyat hilal:

«إِذَا تَبَتَّ الْهَيْلَالُ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ لَزِمَ سَائِرَ الْأَمْصَارِ الرَّجُوعَ إِلَى مَا عِنْدَهُ»

Jika telah pasti adanya keputusan tentang hilal dari sosok Khalifah, wajib bagi seluruh negeri-negeri kembali pada keputusannya (Khalifah).

Al-Maziri pun merinci: "*Perbedaan antara rukyat hilal Khalifah dan selainnya, yakni saat seluruh negeri-negeri berada di bawah naungan pemerintahannya (Khalifah) sebagai satu negeri.*"

Insya Allah, kelak kaum Muslim akan hidup dalam naungan satu kepemimpinan Islam, yakni Khilafah, dan satu syiar dalam berhari raya: Idul Fitri dan Idul Adha.

Wallâhu a'lam. []

DALIL KULLIY DAN DALIL JUZ'İY

Soal:

Di dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (1/203) dinyatakan pada topik “*Al-Ijtihâd*”: “Karena ijtihad adalah istinbâth hukum dari nas, ia bisa berupa istinbâth hukum kulliy dari dalil kulliy. Misal, istinbâth (penggalan hukum) bahwa perampas dijatuhi sanksi di-istinbâth dari dalil bahwa *Asy-Syâri*’ menjadikan potong tangan sebagai hadd untuk pencurian. Bisa juga berupa istinbâth hukum juz’iy dari dalil juz’iy. Misal, istinbâth hukum ijârah dari dalil bahwa Rasul saw. pernah mempekerjakan seorang pekerja.”

Dinyatakan pula dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (3/445) pada topik “*Al-Qawâ'id al-Kulliyah*”: “Kaidah-kaidah kulliyah dan definisi syar’iyyah (*at-ta'ârif asy-syar'iyyah*) merupakan hukum kulliy. Adapun hukum syar’iy maka itu merupakan hukum juz’iy.”

Pertanyaannya: Apakah dalil kulliy dan dalil juz’iy itu? Mengapa dalil potong tangan pencuri disebut dalil kulliy, sementara dalil kebolehan ijârah disebut dalil juz’iy?

Jawab:

Pertama: Terkait dalil kulliy dan dalil juz’iy. Perkara ini telah dirinci di dalam Kitab

Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah Juz 3 bab “*Al-Qawâ'idu al-Kulliyah*”, di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 1, juga di dalam *Al-Kurâsah*. Jadi perkara ini dapat dirujuk pada kitab-kitab tersebut. Namun, untuk lebih mendekatkan (pada pemahaman), berikut jawabannya secara ringkas:

Jika dari dalil atau beberapa dalil dapat di-istinbâth kaidah syar’iyyah yang di bawahnya terderivasi hukum-hukum syariah lainnya, selain yang dinyatakan di dalam dalil atau beberapa dalil itu, dan tidak dengan jalan qiyas—yakni tanpa hukum baru itu dikiaskan pada hukum yang disebutkan di dalam nas itu, tetapi terderivasi, seperti sebagai bagian-bagian dari kaidah itu—maka ketika itu kaidah tersebut merupakan kaidah kulliyah dan hukum yang terderivasi di bawahnya merupakan hukum kulliy. Pada galibnya, di antara kaidah dan hukum syariah yang terderivasi di bawahnya itu terdapat apa yang menyerupai ‘illat (atau pada posisi ‘illat [*bi mutsâbati al-'illat*]) dan kadang berupa ‘illat yang hakiki. Dinyatakan di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz 3 bab “*Al-Qawâ'id al-Kulliyah*” halaman 455:

Maka dari itu, menjadi jelas bahwa kaidah kulliyah membuat hukum itu pada posisi ‘illat (*bi mutsâbati al-'illat*) untuk hukum kulliy karena keberadaannya sebagai sebab untuk hukum tersebut, yakni karena keberadaannya sebagai hasil darinya atau yang disusun di atasnya, atau membu-

atnya sebagai *'illat* yang hakiki (*'illat haqîqiyah*) untuk hukum *kulliy*. Kaidah itu merupakan hukum *kulliy* yang berlaku atas bagian-bagiannya. Oleh karena itu, ia berlaku atas setiap hukum yang berlaku atasnya sebagaimana berlakunya dalil yang membawanya dan tidak dikiaskan terhadapnya secara *qiyas*. Akan tetapi, bagian-bagiannya itu terderivasi di bawahnya, yakni masuk di bawah *mafhum*-nya atau *manthûq*-nya. Ini sama persis sebagaimana masuk di bawah *dalâlah* dalil. Juga ber-*istidlâl* dengannya sama seperti ber-*istidlâl* dengan dalil tersebut. Kaidah *kulliyah* diperlakukan sebagaimana perlakuan *qiyas*. Hanya saja, kaidah *kulliyah* itu bukan seperti *qiyas* sebagai dalil syariah dan tidak menjadi pokok dari ushul syariah. Kaidah *kulliyah* itu tidak lain merupakan hukum syariah yang di-*istinbâth* (dari dalil-dalil syariah) sebagaimana semua hukum syariah. Jadi kaidah *kulliyah* itu tidak menjadi dalil.

Kedua: Untuk lebih jelas, berikut dua contoh dari Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (3/454-455) yang satu pada posisi *'illat* (*bi mutsâbati al-'illat*) dan yang lainnya berupa *'illat*.

Contoh pertama: Firman Allah SWT: *Wa lâ tasubbû al-ladzîna yad'ûna min dūnillâhi fayasubullâh 'adw[an] bi ghayri 'ilm[in]* (Janganlah kalian memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan) (TQS al-An'âm [6]: 108).

Huruf *al-fâ`* pada "*fayasubbû* (karena mereka nanti memaki)" memberikan faedah bahwa makian kalian kepada berhala-berha-

Allah berfirman: “*fa yasubbûllâh* (karena mereka nanti memaki Allah)”. Lalu dari dalil ayat ini di-*istinbâth* kaidah, “*Al-Wasîlatu ilâ al-harâm harâm[un]* (Sarana yang mengantarkan pada keharaman adalah haram).

la sesembahan mereka bisa menyebabkan makian mereka kepada Allah. Ini adalah haram. Akibatnya, makian kalian terhadap berhala-berhala mereka dalam kondisi ini adalah haram. Jadi, seolah-olah itu merupakan *'illat*. Larangan memaki orang-orang kafir adalah dalil hukum. Hal itu, selain *dalâlah*-nya terhadap hukum, juga menunjukkan pada sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, yakni ketika Allah berfirman: “*fa yasubbûllâh* (karena mereka nanti memaki Allah)”. Lalu dari dalil ayat ini di-*istinbâth* kaidah, “*Al-Wasîlatu ilâ al-harâm harâm[un]* (Sarana yang mengantarkan pada keharaman adalah haram).”

Contoh kedua: Sabda Rasul saw., “*Al-Muslimûna syurakâ' [un] fi tsalâts[in]: fi al-kalaa'i wa al-mâ'i wa an-nâri* (Kaum Muslim bersekutu [memiliki hak yang sama] atas padang gembalaan, air dan api).” (HR Abu Dawud).

Namun, telah terbukti bahwa beliau menyetujui penduduk Thaif dan penduduk Madinah untuk memiliki air dengan kepemilikan

individu. Dipahami dari air yang diizinkan untuk dimiliki sebagai kepemilikan individu bahwa itu tidak ada kebutuhan komunitas di dalamnya. Maka dari itu, ‘*illat* bahwa manusia berserikat (memiliki hak yang sama) dalam ketiga jenis harta itu adalah karena keberadaan ketiganya sebagai fasilitas jamaah (umum). Jadi dalil tersebut menunjukkan hukum, juga menunjukkan ‘*illat* hukum. Artinya, dalil itu menunjukkan hukum sekaligus menunjukkan sesuatu yang lain yang merupakan sebab pensyariaan hukum tersebut. Lalu dari situ di-*istinbâth* kaidah, “*Kullu mâ kâna min marâfiq al-jamâ’ah kâna milkiyat[an] ‘âmat[an]* (Apa saja yang termasuk ke dalam fasilitas jamaah maka merupakan kepemilikan umum).”.

Setelah itu kitab tersebut menambahkan:

Dari situ menjadi jelas bahwa kaidah *kulliyah* membuat hukum itu pada posisi ‘*illat* (*bi mutsâbati al-‘illat*) untuk hukum *kulliy* karena keberadaannya sebagai sebab untuk hukum *kulliy* itu, yakni karena keberadaannya sebagai hasil untuknya atau akibat atasnya, atau membuatnya sebagai ‘*illat* yang hakiki untuk hukum *kulliy*. Jadi, kaidah merupakan hukum *kulliy* yang berlaku atas bagian-bagiannya. Oleh karena itu, ia berlaku atas setiap hukum yang sesuai atasnya, sebagaimana berlakunya dalil atas hukum yang ia datangkan, dan tidak dikiaskan terhadapnya secara *qiyas*, tetapi bagian-bagiannya itu terderivasi di bawahnya, yakni masuk di bawah *mafhum*-nya atau *manthûq*-nya. Ini sama persis sebagaimana masuk di bawah dalalah dalil. Juga ber-*istidlâl* dengannya sama seperti ber-*istidlâl* dengan dalil. Jadi kaidah *kulliyah* diperlakukan dengan perlakuan *qiyas*. Semua apa yang sesuai atasnya kaidah ter-

sebut maka mengambil hukumnya, kecuali ada nas *syar’iy* yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kaedah tersebut, maka diamalkan sesuai dengan nas dan kaidah itu diabaikan. Hal itu sebagaimana keadaan dalam *qiyas*. Jika hukumnya dinyatakan nas *syar’iy* maka yang diambil adalah nas dan *qiyas* diabaikan. Hanya saja, kaedah *kulliyah* itu tidak seperti *qiyas* sebagai dalil *syar’iy* dan bukan pokok di antara ushul syariah. Kaidah *kulliyah* itu merupakan hukum syariah yang di-*istinbâth* dari dalil-dalil syariah sebagaimana semua hukum Syariah. Jadi, ia bukan merupakan dalil. Karena itu maka apa yang sesuai atasnya dinilai sebagai percabangan (*tafrî[an]*) atasnya atau pada posisi percabangan (*bi mutsâbati at-tafrî*). Yang semisal kaidah *kulliyah* itu adalah definisi *kulliy* (*ta’riif kulliy*). Semua yang sesuai atasnya maka mengambil hukumnya, kecuali hukumnya telah dinyatakan oleh nas *syar’i* maka yang diambil adalah yang dinyatakan oleh nas.

Ketiga: Sekarang mengenai pertanyaan tentang pencurian dan *ijaraah*. Allah SWT berfirman: *Wa as-sâriqu wa as-sâriqatu fa[î] qtha’û aydiyahumâ jazâ`an bimâ kasaba nakâlan minallâhi wallâhu ‘azîzun hakîmun* (Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana) (TQS al-Maidah [5]: 38).

Dari dalil ini mungkin di-*istinbâth* kaidah *kulliyah* bahwa “*al-i’tidâ`u ‘alâ amwâli an-nâs muharramun wa ‘alayhi uqûbatun* (penyerangan terhadap harta orang adalah haram dan terhadap pelakunya dijatuhi sanksi)”. Ini karena mungkin dikatakan bahwa nas pencurian mengandung apa yang me-

...definisi (*ta'rîf*) disifati dengan *kulliy* sehingga di bawah definisi itu masuk jenis-jenis ijarah. ... Namun, dalil *ijârah* sendiri tidak disifati dengan *kulliy* sebab tidak mencakup selain topik *ijârah*. ...

nyerupai 'illat (*yusybihu al-'illat*) atau pada posisi 'illat (*bi mutsâbati al-'illat*), yaitu kaitan antara potong tangan dengan pencurian. Telah terjadi penyusunan potong tangan atas pencurian dengan huruf *al-fâ`* dan di sini itu adalah *sababiyah* (bersifat menyatakan sebab). Ada kaitan antara hukum "*faij qtha'û aydiyahumâ* (maka potonglah tangan keduanya)" dan yang mewajibkan potong tangan, yaitu pencurian dalam firman Allah: *wa as-sâriq wa as-sâriqatu* (pencuri laki-laki dan perempuan).

Potong tangan hanya berkaitan dengan pencurian. Namun, ada keterkaitan antara hukum tersebut dan sebabnya. Hal itu memungkinkan mujtahid meredaksikan hukum *kulliy* yang mencakup keadaan-keadaan yang terderivasi di bawahnya. Maka dari itu dikatakan: "*al-i'tidâ`u 'alâ amwâli an-nâs muḥarramun wa 'alayhi 'uqûbatun* (penyerangan terhadap harta orang adalah haram dan terhadap pelakunya dijatuhi sanksi)".

Di bawah hukum ini terderivasi bahwa terhadap perampas dijatuhkan sanksi, meskipun hukum perampas tidak disebutkan di

dalam ayat tersebut. Karena itu ayat tersebut memberikan faedah bahwa *hadd* pencuri adalah potong tangan, sekaligus juga memberikan faedah berdasarkan atas susunannya secara bahasa bahwa orang yang menyerang harta orang lain maka layak dijatuhi sanksi. Karena itu dalil potong tangan pencuri itu merupakan dalil *kulliy* yang memberikan faedah hukum *kulliy*.

Adapun hukum *ijârah* yang diambil, misalnya, dari: "*Anna Rasûlallâhi istâ'jara rajulan min banî ad-dili hâdiyan khirritan* (Sungguh Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan)."

Di dalamnya tidak ada sesuatu yang bersifat *kulliy* dan tidak ada penyusunan sesuatu di atas sesuatu. Namun, ia adalah dalil yang darinya diambil faedah kebolehan *ijârah*. Jadi itu merupakan dalil *juz'i* yang memberikan faedah hukum *juz'i*. Ini tentu saja berbeda dengan definisi (*ta'rîf*) *ijârah*. Sebabnya, definisi (*ta'rîf*) disifati dengan *kulliy* sehingga di bawah definisi itu masuk jenis-jenis ijarah. Jadi definisi (*ta'rîf*) dari sisi ini memiliki sifat *kulliy*. Namun, dalil *ijârah* sendiri tidak disifati dengan *kulliy* sebab tidak mencakup selain topik *ijârah*.

Semoga perkaranya telah menjadi jelas.

[Dikutip dari *Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah*, tertanggal 25 Jumadal Akhirah 1444 H - 18 Januari 2023 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/86526.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/727052175648821>



Arogansi Trump Tunjukkan Wajah AS Sebenarnya

Terjadi pertengkaran verbal Presiden Amerika Serikat Donald Trump versus Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertengkaran ini berujung pada pengusiran Zelensky dari Gedung Putih oleh Trump. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk arogansi yang mencolok untuk menunjukkan kepada seluruh dunia wajah sebenarnya kebijakan AS di dunia.

“Dengan arogansi yang mencolok ini, Trump bertindak untuk menunjukkan kepada seluruh dunia wajah sebenarnya kebijakan Amerika di dunia,” ujar aktivis Hizbut Tahrir Baher Salih sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (3/3/2025).

Kejadian tersebut, ungkap Baher, mencerminkan betapa AS siap membunuh ribuan, bahkan jutaan orang. AS pun siap menyeret rakyat, bangsa dan negara lain ke dalam perang yang mematikan dan brutal. Tentu untuk mencapai ambisi kolonial dan kepentingan materialnya.

“Betapa menyedihkan dan celaknya mereka yang mengikuti AS atau berpegang teguh pada talinya,” ujar Baher.

Pasalnya, sebut Baher, dalam pertemuan tersebut Trump menegaskan bahwa AS tidak memandang masalah konflik Ukraina-Rusia

sebagai konflik benar dan salah, atau nilai dan moral; melainkan konflik kepentingan, keuntungan, dan kolonialisme.

Buktinya, beber Baher, Trump memperlakukan masalah ini sebagai kesepakatan bisnis. AS memeras Ukraina agar menandatangani kontrak untuk penjarahan AS terhadap Ukraina senilai 500 miliar dolar dalam bentuk logam mulia dan strategis.

Pemerasan Trump terhadap Ukraina, tegas Baher, dilakukan dengan cara yang terang-terangan dan gamblang. Trump mengancam Ukraina akan kalah perang dengan Rusia. Di antaranya AS akan menghentikan dukungan militernya terhadap Ukraina. AS juga mengancam Presiden Ukraina akan kehilangan jabatannya jika AS meninggalkan dia dan negaranya.

“Trump melakukan semua itu di depan media, kamera dan mikrofon; antara menandatangani penyerahan kekayaan Ukraina ke Amerika dan menerima Ukraina menjadi koloni Amerika tanpa jaminan keamanan terhadap Rusia atau Amerika meninggalkan Ukraina di depan beruang Rusia, dengan punggung dan perut terbuka, yang siap untuk melahap Ukraina sehingga menjadi pelajaran bagi mereka yang datang setelahnya,” beber Baher.

Lihatlah, lanjut Baher, bagaimana Barat—AS dan Eropa—memerangi Rusia dengan menggunakan rakyat Ukraina, untuk mencapai kepentingan mereka. Sebaliknya, kepentingan Ukraina tidak mempunyai tempat dalam perhitungan mereka. Kalaupun ada, itu merupakan perhatian terakhir mereka.

“Bahkan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, yang merupakan penyebab perang, tidak mereka berikan kepada Ukraina meski harga yang dibayarkan oleh Ukraina adalah dengan memerangi Rusia atas nama mereka,” kata Baher.

Hal yang perlu ditegaskan juga, ujar Baher, kebodohan Presiden Ukraina menjadi pelajar-

an bagi setiap pengikutnya. Dengan kebodohan dan kepercayaannya pada rubah AS dan orang Eropa, yang tidak lebih baik dari AS.

Satu-satunya hal yang patut dipuji dari Zelensky, jelasnya, adalah sikapnya saat ini di Gedung Putih. Meskipun ia lemah dan sangat membutuhkan, ia terbangun dari komanya setelah Trump menyiramkan seember air ke wajahnya. Zelensky sadar bahwa dengan menaati Trump dan menyerah pada apa yang Trump inginkan, maka ia akan membunuh dirinya sendiri dan menuju kematiannya sendiri. Karena itu ia menolak semuanya dengan sikap yang berani meski berujung pada pengusiran dirinya dari Gedung Putih.

“Sungguh, sikapnya ini membuat kita merasakan betapa sengsaranya kita dengan keberadaan para penguasa boneka, seperti Raja Yordania. Dia duduk di kursi yang sama beberapa pekan lalu. Namun, dia duduk dengan sikap tunduk dan terhina, seperti duduknya siswa yang gagal di hadapan gurunya, yang membuat dirinya tidak bisa bangun dari rasa malu dan aibnya. Padahal Trump telah menjatuhkan air terjun di wajahnya. Hal ini membuat kami semakin menyesal dan berkata, ‘Celakalah para penguasa kami! Apakah mereka tidak bisa seperti Zelensky?!’” sebut Baher.

Menurut Baher, dunia, dan kaum Muslim khususnya, sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan mengakhiri arogansi Trump dan pemerintahannya, serta membawa rakyat dan dunia keluar dari ketidakadilan, korupsi dan kebobrokan kapitalisme.

Ia menegaskan, tidak ada yang mampu melawan AS kecuali Negara Khilafah yang akan datang. Eropa yang sedang runtuh, Rusia yang korup, maupun Cina yang *introvert* tidak akan mampu menghadapi AS dan arogansinya.

“Hanya Islam dan khalifah kaum Muslim yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, kami mengatakan kepada umat Islam, bahwa

sekaranglah saatnya untuk mengembalikan kedudukan, martabat dan kepemimpinannya,” pungkas Baher.[]

Kaum Muslim Harus Mendobrak Status Quo Teknologi

Merespon perlombaan Amerika Serikat dengan Cina dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI), Aktivis Hizbut Tahrir Zakariyah Imran menyatakan kaum Muslim harus mendobrak status quo dan merebut kembali tempat semestinya di garis depan kemajuan teknologi dengan mendirikan Negara Islam.

“Sebagai kaum Muslim, kita harus mendobrak status quo dan merebut kembali tempat kita yang semestinya di garis depan kemajuan teknologi dengan mendirikan Negara Islam,” ujarnya sebagaimana dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (22/2/2025).

Sebabnya, tegasnya, merupakan kewajiban kaum Muslim untuk memimpin dunia dalam segala bidang, sebagaimana firman Allah SWT (yang artinya): *Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan (membawa) petunjuk dan agama yang benar agar Dia unggulkan atas semua agama walaupun kaum musyrik tidak menyukai* (TQS at-Taubah [9]: 33)

Zakariyah mengingatkan, elemen kunci dalam kepemimpinan dunia adalah industri militer yang kuat, yang mencakup kemajuan teknologi yang berkelanjutan.

Ia kemudian mengutip firman Allah SWT (yang artinya): *Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, juga pasukan berkuda. Dengan persiapan itu kalian membuat gentar musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui, (tetapi) Allah mengetahui* (TQS al-Anfal [8]: 60).

“Kaum Muslim telah mendominasi industri militer selama berabad-abad, yang dengan sendirinya merupakan stimulus bagi perkem-

bangun industri secara umum. Khilafah Rasyidah akan melakukan itu lagi, dengan izin Allah SWT,” tegasnya.

Menurut dia, Khilafah Rasyidah (Kedua) akan mempersatukan negeri-negeri kaum Muslim, memanfaatkan sumber daya alamnya yang besar untuk mengembangkan teknologi maju dan modern, serta untuk mencapai kemandirian penuh.

“Khilafah Rasyidah (Kedua) akan menantang dominasi kekuatan dunia dan memastikan bahwa Islam memimpin dunia sekali lagi dengan keadilan dan kekuatan. Kepemimpinan yang kuat di bawah Khilafah bukan sekadar kebutuhan politik, tetapi juga kewajiban agama bagi kaum Muslim,” pungkasnya. []

Kirgistan: Lepas dari Penggorengan Rusia, Masuk Bara Api Cina

Merespon kunjungan resmi Presiden Kirgistan Sadyr Japarov ke Cina (4-7 Februari 2025) atas undangan Presiden Cina Xi Jinping, Aktivis Hizbut Tahrir Mumtaz Transoksania menyatakan kecenderungan Kirgistan untuk beralih ke Cina agar dapat lepas dari cengkeraman Rusia. Ini ibarat mencari perlindungan dari penggorengan dengan masuk ke dalam bara api (lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau).

“Kecenderungan Kirgistan untuk beralih ke Cina agar dapat lepas dari cengkeraman Rusia ibarat mencari perlindungan dari penggorengan dengan masuk ke dalam bara api,” ujarnya sebagaimana diberitakan *alraiah.net*, Rabu (19/2/2025).

Pasalnya, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Cina *Xinhua*, jelang kunjungannya ke Cina, Japarov berbicara tentang hubungan yang berkembang antara kedua negara. Presiden Kirgistan menunjukkan perdagangan dengan Cina melebihi 22 miliar dolar pada tahun 2024, mengalami peningkatan 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak

91% di antaranya adalah impor dan 9% adalah ekspor. Juga tentang pembangunan jalur kereta api Cina-Kirgistan-Uzbekistan yang telah dimulai. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama strategis komprehensif Kirgistan dengan Cina yang ditandatangani pada 2023.

“Kita tidak boleh terkecoh dengan memperbaiki beberapa infrastruktur dan mulai melaksanakan beberapa proyek strategis, karena proyek-proyek ini akan meningkatkan ketergantungan kita pada Cina,” ujarnya.

Ketergantungan ini, jelas Mumtaz, menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan negara dan rakyat Muslimnya. Namun, Kirgistan membuka pintunya bagi Cina dengan imbalan hibah dan pinjaman dari Cina.

Apalagi, jelasnya, Cina telah terlibat dalam penjajahan budaya terhadap kaum Muslim (Uighur) di Turkestan Timur (Xinjiang) selama beberapa dekade sebelum mulai menindas mereka.

“Oleh karena itu, kita harus menolak perjanjian-perjanjian yang merugikan kepentingan umat, dan menolak kebijakan agresif Cina di kawasan ini,” tegasnya.

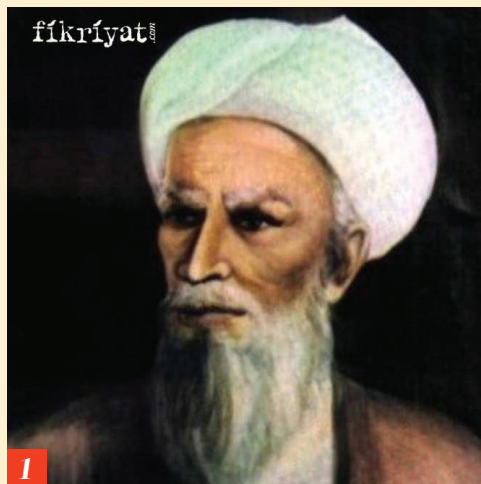
Ia juga menyadari, perlawanan ini tidak akan efektif apabila tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam. Sebabnya, perlawanan yang dilandasi oleh rasa nasionalis dan patriotisme bersifat sementara dan tidak akan mampu bertahan terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

“Kita juga harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh tipu daya Barat dan melayani kebijakannya dalam menentang kebijakan agresif Cina. Karena itu, kita tidak akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan berjuang di barisan orang-orang yang berjihad untuk menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah, melalui tegaknya Khilafah Rasyidah *‘alâ minhâj an-Nubuwwah*,” pungkasnya. [Joy dan Tim]

Siapakah Abu Bakr al-Razi?

Razi, salah satu dokter-filsuf paling sukses dalam sejarah Islam, dikenal sebagai "Galen orang Arab" karena kontribusinya yang penting bagi ilmu kedokteran setelah Hippocrates dan Galenus (Galen). Razi, yang tertarik pada kimia saat bekerja sebagai tukang emas dan kemudian beralih ke bidang kedokteran, adalah salah satu pemikir luar biasa yang hidup di zaman keemasan peradaban Islam. Jadi, apa kontribusi Razi bagi sains? Saran apa yang dia berikan kepada para dokter?

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/biografi/abu-bekir-er-razi-kimdir/NaN>



1

Razi, salah satu dokter-filsuf paling sukses dalam sejarah Islam, lahir di Rey pada tahun 865. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Razi, tetapi orang Barat memanggilnya Rhazes.

Saat Er-Razi bekerja sebagai tukang emas, profesi ini membangkitkan minatnya pada kimia dan ia melakukan eksperimen kimia di laboratorium yang didirikannya. Mata Razi rusak akibat gas dan uap yang dilepaskan selama percobaan ini, dan penyakitnya berlangsung sepanjang hidupnya. Menurut Biruni, alasan utama mengapa Razi beralih ke kedokteran setelah kimia adalah masalah pada matanya.

2

Razi adalah salah satu pemikir luar biasa yang hidup di zaman keemasan peradaban Islam. Selama perjalanan panjangnya untuk pendidikan, ia mengunjungi pusat sains dan budaya di Khurasan; Setelah memperoleh ketenaran sebagai seorang dokter, ia pergi ke Baghdad pada usia tiga puluh atas undangan Khalifah Muqtafi-Billah.

Razi berbicara tentang dirinya sebagai berikut: "Mereka yang mengenal saya tahu bahwa kecintaan saya, hasrat saya terhadap ilmu pengetahuan, dan kerja saya di jalan ini terus berlanjut tanpa henti sejak masa muda saya. Bahkan jika saya menemukan buku yang belum saya baca atau seorang ulama yang belum saya temui, saya tinggalkan semuanya dan membaca buku itu serta mengenal ulama itu, meskipun itu berarti saya akan mengalami kerugian besar. Sebagai hasil dari kerja keras saya di bidang ini, saya telah menulis lebih dari 20.000 halaman draf dalam satu tahun."



3

Selama perjalanannya untuk menyelesaikan pendidikannya, Râzî melakukan penelitian tentang pengobatan Yunani, India, Iran, dan Islam di berbagai pusat di wilayah Khurasan dan memperoleh pengetahuan medis yang belum pernah dicapai oleh dokter mana pun sejak zaman dokter paling terkenal pada masa itu, Câlînûs.

Kemudian, ketika ia kembali ke Rey, ia diangkat sebagai dokter kepala rumah sakit di sana. Ia mengemban tugas penting sebagai tabib istana dan penasihat urusan negara. Agar dapat memberikan pelayanan rutin secara bergiliran, ia menambah staf sebanyak dua puluh empat dokter spesialis di rumah sakit tersebut, yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam,



dokter spesialis penyakit luar, dokter spesialis neurologi, dokter spesialis ortopedi, dan dokter spesialis mata.



4 Di rumah sakit, pemeriksaan, diagnosis, efek obat dan seluruh perjalanan kasus dicatat dalam buku catatan. Ia dikenal sebagai dokter pertama dalam sejarah medis yang menggunakan kimia dalam pelayanan pengobatan.



5 Selama pemeriksaan, ia akan menanyakan tentang usia pasien, pola makan, penyakit yang pernah diderita, apa saja keluhannya, dan kapan mulai terasa, serta akan mencatat semua temuan beserta diagnosisnya.

Razi, dokter pertama yang mendiagnosis penyakit campak dan cacar dengan tepat, memberikan nasihat berikut: " Tidak ada ramalan dalam pengobatan, dokter tidak dapat mengetahui segalanya, pasien tidak dapat digunakan sebagai subjek uji. Kecuali jika diperlukan, obat-obatan sederhana harus digunakan dalam pengobatan. Dokter harus menjadi orang kepercayaan pasiennya. Dokter harus menjalin dialog langsung dengan pasien."



Razi memperoleh ketenaran sebagai **6** dokter pertama yang merawat pasiennya dengan musik melalui karyanya *et-Tibbu'r-rûhânî*. Dalam karya ini, ia secara khusus menyebutkan manfaat merawat pasien melankolis dengan membuat mereka sibuk dan terhibur.

Dia memberikan peringatan dan pengamatan penting tentang mendorong pasien melankolis untuk memancing, berburu, mengobrol dengan orang yang mereka cintai, berteman dengan mereka, dan bahkan mengajak mereka terlibat dalam berbagai permainan dan mendengarkan musik. Beliau menyatakan bahwa hanya dengan metode pengobatan seperti itu pasien dapat terbebas dari masalah dan kesusahannya.



Menurut Razi, seorang dokter **7** hendaknya memperlakukan pasiennya tanpa membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin, dan tidak boleh berlaku sombong atau memarahi mereka.

Seorang dokter hendaknya bertawakal kepada Allah dan memohon kesembuhan kepadaNya, dan tidak bersandar pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Dia harus mengunjungi pasiennya setiap hari, menjelaskan pola makannya setiap hari, dan memberitahukan tentang makanan dan minumannya.

MERAIH KEBERKAHAN DI TENGAH EFISIENSI ANGGARAN

Dedeh Wahidah Achmad

Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan lebaran hampir dipastikan selalu terjadi. Apalagi Ramadan tahun ini lonjakan harga bukan hanya dipengaruhi oleh faktor peningkatan permintaan akan barang, tetapi diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan oleh rezim saat ini. Tentu saja lonjakan ini akan memberikan dampak signifikan pada suasana keuangan di setiap rumah tangga.

Apa yang harus dilakukan oleh keluarga Muslim agar tetap bisa beribadah dengan tenang dan nyaman pada bulan istimewa ini sehingga tidak kehilangan keberkahannya? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama: Mengokohkan keyakinan keluarga bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Demikian sebagaimana firman-Nya (yang artinya): Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah (TQS Hud [11]: 6). Keluarga Muslim penting memiliki keyakinan yang kuat bahwa selama masih bernyawa, pasti Allah SWT akan me-

nyertakan rezeki untuk kita menjalani kehidupan ini.

Kedua: Memahami bahwa Ramadhan adalah waktu untuk mengokohkan keimanan. Juga membuktikan komitmen ketaatan dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apapun yang Dia larang demi meraih derajat takwa. Ramadhan bukanlah waktu untuk menambah anggaran, apalagi perilaku konsumtif, sekalipun ada aktivitas berbeda seperti sahur, buka puasa dan silaturahmi di momen lebaran.

Ketiga: Memahami konsep harta secara benar. Islam menetapkan bahwa harta adalah rezeki yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban dari orang yang mendapatkannya. Setiap Muslim akan ditanya dari mana harta itu diperoleh. Apakah berasal dari sumber yang halal atau didapatkan dengan cara yang diharamkan. Berikutnya juga akan diaudit tentang pembelanjanya. Apakah harta tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dari Abu Barzah al-Aslami, Nabi saw. bersabda, “*Kedua kaki seorang*

Agar tidak terjebak pada perilaku boros, yakni membelanjakan harta untuk perkara yang dilarang atau tidak dibutuhkan, maka setiap keluarga Muslim perlu menetapkan skala prioritas. Berikutnya, harus memisahkan antara keinginan dan kebutuhan.

hamba tidaklah beranjak pada Hari Kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan; ilmunya, di manakah ia amalkan; hartanya, bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan; tubuhnya, di manakah gunakan.” (HR at-Tirmidzi).

Terkait penggunaan harta, keluarga Muslim harus memahami beberapa ketentuan. Di antaranya: Tidak boleh menafkahkan harta di jalan yang haram, menghambur-hamburkan harta dan bersikap kikir. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Janganlah kalian menjadikan tangan kalian terbelenggu pada leher kalian (terlalu kikir). Jangan pula kalian terlalu mengulurkannya (terlalu boros) karena itu kalian menjadi tercela dan menyesal* (TQS al-Isra' [17]: 29).

Agar tidak terjebak pada perilaku boros, yakni membelanjakan harta untuk perkara yang dilarang atau tidak dibutuhkan, maka

setiap keluarga Muslim perlu menetapkan skala prioritas. Berikutnya, harus memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Pembelanjaan hanya difokuskan pada barang-barang yang dibutuhkan.

Keempat: Menyusun daftar barang-barang yang dibutuhkan dan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Kegiatan ini akan menyelamatkan dari dorongan membeli barang yang tidak dibutuhkan atau melakukan kegiatan yang sia-sia.

Anggaran Ketat, Infak Sunnah Tetap

Selain kebutuhan makanan, ada pos pengeluaran yang harus sengaja dianggarkan, yaitu pos untuk infak sunnah. Ramadhan adalah bulan saat Rasulullah saw. banyak memberikan infak. Dalam hadis Ibnu Abbas ra. disebutkan: *“Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan. Beliau bertambah kedermawanannya pada Bulan Ramadhan.”* (HR al-Bukhari).

Berinfak adalah kebiasaan yang harus ditumbuhkan. Jika belum menjadi kebiasaan akan terasa berat. Apalagi di tengah melonjaknya harga kebutuhan. Dianggap wajar jika suatu keluarga mengutamakan pemenuhan kebutuhannya dan tidak ada anggaran khusus untuk infak sunnah dengan alasan skala prioritas. Namun, akan berbeda, jika budaya infak sudah menjadi komitmen keluarga. Tentu kita akan tetap berinfak dalam keadaan apapun, sekalipun dalam jumlah yang tidak besar, yang penting terjaga keberlangsungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., *“Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.”* (HR al-Bukhari).

Keluarga juga harus dipahami bahwa berinfak tidak akan mengurangi harta dan tidak akan menambah kesulitan hidup. Infak justru akan membuka pintu rezeki dan keberkahan. Demikian sebagaimana firman Allah SWT (yang artinya): *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahatahu* (TQS al-Baqarah [2]: 261).

Banyak teknis untuk membudayakan infak sunnah ini. Di antaranya dengan menyediakan kotak khusus yang diletakkan di tempat tertentu dan diisi infak oleh semua anggota keluarga berdasarkan kemampuan masing-masing. Kotak ini diperuntukkan untuk membantu fakir-miskin atau untuk dikumpulkan di masjid. Bisa juga secara langsung berinfak ke kotak yang ada di masjid setiap selesai shalat tarawih.

Memberi Makan Orang Berbuka Puasa

Sekarang kegiatan buka puasa bersama bisa dilakukan sekalipun di tengah pengetatan anggaran. Ada anggapan bahwa buka bersama ini harus di tempat yang berbeda dan dengan menu makanan yang istimewa. Jika anggapan ini diikuti, akan membuat anggaran pengeluaran membengkak. Menyediakan makanan untuk yang berbuka puasa memang sangat dianjurkan dan akan berlimpah pahala. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ra., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, *“Siapa memberi makan orang yang (berbuka) puasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi paha-*

Namun yang penting diperhatikan, jangan sampai berutang ini menjadi jebakan yang menjerumuskan.

Dari Uqbah bin Amir ra., Rasulullah saw. bersabda, “Jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman.” Para Sahabat bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Itulah utang!” (HR Ahmad).

la orang yang berpuasa itu sedikit pun.” (HR at-Tirmidzi).

Salah satu pengamalan hadis tersebut bisa dilakukan dengan menyelenggarakan buka puasa bersama. Namun, apakah itu harus dilakukan dengan menu dan tempat khusus sehingga berbiaya mahal? Tentu tidak. Bisa juga dengan memasak sendiri, namun tidak kehilangan nilai kekeluargaan dan kesempatan untuk saling berbagi kebaikan.

Lebaran Memakai Baju Baru atau Baju Terbaik?

Lebaran identik dengan memakai baju

baru. Jika kondisi keuangan keluarga sedang longgar, membelikan baju untuk anggota keluarga menjadi perkara yang tidak berat. Namun, akan dipikirkan berulang ketika kondisi sulit. Di sinilah pentingnya upaya memahami keluarga, terutama anak-anak, agar bahwa yang disunnahkan itu memakai baju terbaik sekalipun tidak baru. Terkait hal ini ada atsar yang diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali ra., *“Rasulullah saw. telah memerintahkan kami pada dua hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan.”* (HR al-Baihaqi dan al-Hakim).

Bisa juga disampaikan perkataan ulama, *“Bukanlah hai raya (Id) itu bagi orang yang mengenakan (pakaian) baru. Sesungguhnya hari raya itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Setiap hari yang tiada maksiat di dalamnya itulah hari raya.”*

Antara Silaturahmi dan Jalan-Jalan

Di tengah kesibukan masing-masing anggota keluarga, lebaran dan hari libur sering dijadikan kesempatan untuk menjalin kebersamaan keluarga dengan mudik ke kampung halaman atau sekadar santai di tempat wisata. Pilihan strategis harus diambil ketika sedang dalam pengetatan. Orangtua pun harus cerdas dan bijak dalam mengkomunikasikan pilihan apapun kepada anak-anak agar rencana berjalan lancar, nyaman dan penuh keberkahan. Orangtua penting membangun kesadaran anak tentang urgensi silaturahmi dan kebaikan di baliknya. Rasulullah saw. bersabda, *“Silaturahmi dapat menambah umur, sedangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat meredam murka Allah.”* (HR ath-Thabrani).

Silaturahmi masih bisa tetap dijalin sekali-

pun secara fisik tidak bisa bertemu. Kemajuan teknologi pun bisa menjadi alternatif teknis, misalnya pertemuan via zoom atau dengan panggilan video. *Refreshing* dan *healing* pun masih bisa dilakukan sekalipun tetap di rumah, misal dengan melakukan permainan bersama, bercerita, memasak bersama, atau aktivitas bersama lainnya.

Menghindari Jebakan Utang

Berutang adalah perkara yang dibolehkan dalam Islam, bahkan bisa berpeluang mendapat pahala wajib ketika peminjam menunaikan kewajiban membayar utangnya. Namun yang penting diperhatikan, jangan sampai berutang ini menjadi jebakan yang menjerumuskan.

Dari Uqbah bin Amir ra., Rasulullah saw. bersabda, *“Jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman.”* Para Sahabat bertanya, *“Apakah itu, wahai Rasulullah?”* Rasulullah menjawab, *“Itulah utang!”* (HR Ahmad).

Jebakan utang bisa terjadi jika berutang tanpa pertimbangan tentang kadar kebutuhan dan kemampuan untuk mengembalikannya. Karena itu di tengah kesulitan keuangan, setiap keluarga tidak mengambil pinjaman kecuali untuk masalah yang urgen dan mendesak.

Penutup

Kesulitan keuangan jangan sampai melemahkan keyakinan kita. Juga tidak boleh hilang peluang meraih pahala. Kita pun harus tetap berupaya agar kondisi keluarga Muslim tidak terus dalam krisis anggaran, yakni dengan mengganti sistem yang menyengsarakan dengan sistem Islam yang menyejahterakan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Dr. Arim Nasim:

HANYA APBN SYARIAH YANG PRO RAKYAT



Pengantar:

Sebagaimana diketahui, tahun 2025 ini Pemerintah benar-benar melakukan pengetatan atau efisiensi APBN. Tujuannya, sesuai klaim Pemerintah, adalah untuk menyeimbangkan fiskal. Di antaranya tentu karena beban utang dan bunganya yang tinggi, adanya inefisiensi, selain alokasi untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Pemerintah.

Ironisnya, di lapangan efisiensi justru menysar pada sektor-sektor penting yang terkait kemaslahatan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, pembayaran bunga utang, anggaran kepolisian dan kejaksaan, dll tak terkena efisiensi. Struktur kabinet dan kelembagaan pemerintahan pun dibuat tetap gemuk (tidak efisien). Yang lebih parah, nyatanya sebagian besar dana hasil efisiensi malah digunakan untuk mendukung Program Danantara yang disinyalir bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan oligharki.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Mengapa Pemerintah tega melakukan efisiensi dengan mengorbankan kepentingan rakyat, tetapi tidak mengorbankan kepentingan elit para pejabat? Jika dikaitkan dengan pandangan Islam, bagaimana seharusnya APBN dikelola? Bolehkah, dalam APBN Syariah, dilakukan efisiensi? Jika boleh, pada sektor apa saja? Bagaimana pula cara Islam menambal kekurangan pemasukan APBN?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada Ahli Ekonomi Islam, **Dr. Arim Nasim**, dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini. Berikut hasil wawancara lengkapnya.

Rezim sekarang mengambil langkah mengefisiensi APBN. Benarkah ini langkah efektif? Ataukah ini justru mengorbankan kepentingan dan kemaslahatan rakyat?

Salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran

adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Alasan lainnya, agar anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Karena itu saya melihat alasan efisiensi anggaran bukan merupakan hasil analisis kajian yang serius. Hasilnya pun kontradiksi. Fakta-

nya, penyebab inefisiensi anggaran itu yang paling dominan adalah pengelolaan APBN ala kapitalis, korupsi atau kebocoran APBN yang rata-rata di atas 30%. Sekarang ditambah lagi dengan struktur kabinet yang gemoy (gemuk). Artinya, solusi atau langkah efisiensi anggaran tidak menghilangkan penyebabnya. Ini pasti tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Buktinya, yang menjadi korban efisiensi anggaran justru yang menyangkut hajat hidup rakyat atau kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, ada departemen yang selama ini tidak terlalu penting bagi rakyat justru anggarannya tetap. Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tercatat ada 10 kementerian dan lembaga yang terkena pemangkasan anggaran antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemendikisaintek, Kemenkes dan Kemenhub. Sebaliknya, ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran antara lain Kemenhan, Polri, Badan Gizi Nasional dan Keajaung.

Tadi dikatakan bahwa alasan Pemerintah melakukan efisiensi APBN adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Artinya, untuk mengurangi defisit anggaran dan menghindari ketergantungan berlebihan pada utang. Benarkah demikian?

Alasan itu hanya teori yang dikemukakan agar mendapat dukungan dan simpati rakyat. Fakta dan realitas kebijakannya *kan* bertolak belakang. Faktanya, sebagaimana telah disebutkan, penyebab inefisiensi anggaran itu ada pada pengelolaan APBN ala kapitalis, kebocoran atau korupsi pengelolaan APBN, dan kebijakan sumber APBN yang bertumpu pada utang dan pajak. Anehnya, tidak ada upaya serius untuk menghindari sumber pemborosan atau inefisiensi APBN. Faktanya, utang terus ditambah. Tidak ada upaya sama sekali untuk mengurangi utang. Bahkan ketika APBN 2025

harus tergerus untuk membayar bunga utang senilai Rp 552 Triliun, tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan tahun 2025 Prabowo akan menambah utang sebesar Rp 775 Triliun. Sebaliknya, korupsi malah dibiarkan, bahkan katanya akan diampuni, bukan dihukum. Pajak juga terus dinaikkan, tetapi sumber daya alam terus diliberalisasi dan diswastanisasi. Ini *kan* kebijakan yang ironis. Alhasil, antara sebab dan solusi tidak nyambung.

Alasan lain Pemerintah melakukan efisiensi APBN adalah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Artinya, Pemerintah ingin memastikan anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Benarkah demikian?

Itu *kan* alasan untuk mengelabui rakyat saja agar mendapat dukungan mereka. Namun, realitasnya *kan* berbeda. Faktanya, justru yang dipangkas itu anggaran Kemendikisaintek, Kemenkes dan Kemenhub. Bahkan janji mau menaikkan gaji guru sebagai janji kampanye pun ternyata bohong. Dosen yang demo menuntut hak tukin-nya sampai sekarang belum jelas. Sebaliknya, anggaran untuk membayar bunga utang Rp 552 Triliun tidak dipermasalahkan sama sekali. Juga tidak ada upaya agar bunga utang tersebut dihapus atau pembayaran pokok utangnya ditunda. Padahal, yang sangat tidak efisien dan efektif sehingga menjadi beban APBN itu adalah bunga utang.

Pemerintah juga mengatakan bahwa alasan melakukan efisiensi APBN adalah untuk mengurangi pemborosan dan korupsi. Artinya, Pemerintah ingin mengeliminasi belanja yang tidak efektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran?

Sulit terjadi. Pasalnya, problem korupsi di negeri ini sudah sistemik. Bukan hanya masalah anggaran. Yang dominan memicu korupsi

ini adalah pola pikir dan penegakan hukum, baik pejabat maupun pelaku dunia usaha. Selama pola pikir para pejabat dan rakyat kapitalis dan materialis maka korupsi sulit diberantas. Apalagi tidak ada penegakan hukum yang adil.

Jadi benar, ya, jika sebagian kalangan mengatakan bahwa efisiensi APBN yang dilakukan oleh Pemerintah justru salah-kaprah? Jika benar, apa indikasinya?

Benar sekali. Indikasinya tadi. Anggaran yang dikurangi itu anggaran yang berhubungan dengan kepentingan rakyat seperti sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan rakyat, infrastruktur dan sektor publik lainnya. Sebaliknya, anggaran Kemenhan, Polri dan Kejagung tetap. Ini kan jelas ironis. Apalagi kalau menurut standar Islam, anggaran yang tidak efisien dan efektif adalah membayar bunga utang yang nilainya Rp 552 Triliun atau 15,2% dari total anggaran. Belum untuk membayar pokoknya. Jelas, bayar bunga utang ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga haram.

Tadi disebutkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan rakyat, infrastruktur dan sektor publik lainnya terkena efisiensi. Lalu apa dampaknya ke depan bagi masyarakat?

Masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan layanan tersebut. Bisa juga layanan tersebut ada, tetapi masyarakat harus membayar dengan mahal. Contoh, biaya pendidikan atau UKT akan semakin mahal. Biaya kesehatan juga semakin tinggi. Luran BPJS dinaikkan. Walaupun murah, pelayanan biasanya buruk. Transportasi semakin mahal. Masyarakat juga semakin sulit untuk mendapatkan rumah. Akhirnya, rakyat semakin menderita dan sengsara.

Sebagian Masyarakat mempertanyakan, mengapa beberapa sektor yang banyak

terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, seperti Kepolisian dan Pertahanan Keamanan, Menkopolkum, MPR dan DPR, BIN dll tidak terkena efisiensi anggaran. Mengapa dan apa yang bisa dibaca dari paradoks ini?

Saya melihat ada dua. *Pertama*, semakin mengokohkan bahwa para pejabat di Indonesia semakin egois, individualis dan kapitalis-materialis. Pejabat hadir bukan untuk melayani rakyat, tetapi hanya untuk foya-foya dan memperkaya diri sendiri. Karena itu kita sering mendengar pernyataan dari mereka yang sadar, “*Kalau Anda menyaksikan negara kaya, tetapi rakyatnya hidup susah dan sengsara, sementara para pejabatnya berfoya-foya, berarti Anda sedang berada di Indonesia.*”

Kedua: Secara politik ini semakin mengokohkan kebijakan rezim sebelumnya yang korup dan represif. Dikenal dengan pola kepemimpinan populis-otoriter. Pemimpin seperti ini populis di tengah masyarakat, misalnya, dengan program makan siang gratis; tetapi otoriter kepada kelompok-kelompok kritis. Kepentingannya untuk melayani para kapitalis, pemilik modal, investor asing dan oligarki. Mereka adalah sekelompok kecil yang punya *material power* yang mengendalikan hukum dan ekonomi. Maka dari itu, untuk mempertahankan kondisi ini anggaran untuk Kepolisian dan Pertahanan Keamanan, Menkopolkum, MPR dan DPR, BIN dll tidak terkena efisiensi anggaran. Tujuannya agar semua tunduk pada kepentingan rezim.

Bagaimana APBN dalam Islam? Adakah sektor-sektor yang “wajib” dipenuhi anggarannya sebesar apapun walau dana kurang?

Dalam Islam, negara atau pemimpin hadir untuk melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri da-

lam sistem Islam atau sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin kebutuhan pokok individu: sandang, pangan dan papan; serta menjamin kebutuhan pokok masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Adapun politik luar negeri itu terealisasi dengan dakwah dan jihad. Anggaran untuk sektor-sektor tersebut itu wajib dipenuhi baik dana tersedia ataupun kurang.

Jika dana APBN kurang, bagaimana cara Islam untuk tetap memenuhi anggaran sektor-sektor yang anggarannya “wajib” terpenuhi?

Dalam sistem ekonomi Islam dan Politik APBN Islam, ketika dana untuk jaminan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan serta untuk dakwah dan jihad belum terpenuhi maka negara akan melakukan tiga langkah: *Pertama*, mengoptimalkan alokasi dari harta milik umum yang dikelola oleh negara seperti tambang migas, minerba dll. *Kedua*, kalau masih belum terpenuhi, negara melibatkan seluruh masyarakat dalam bentuk gerakan infak dan sedekah secara sukarela. *Ketiga*, kalau belum terpenuhi juga, negara menetapkan kebijakan khusus dalam bentuk *dharibah* (semacam pajak) yang hanya diambil dari orang-orang kaya yang Muslim saja, juga hanya dipungut sebesar kekurangannya, tidak boleh lebih.

Bolehkah dalam Islam mengefisienkan atau memangkas anggaran APBN untuk semua sektor?

Jika anggaran terbatas, boleh saja Kepala Negara atau Khalifah memangkas anggaran belanja, tetapi untuk sektor-sektor yang tidak terlalu penting, misalnya, membangun jalan alternatif seperti pembangunan jalan tol atau kereta cepat. Yang demikian untuk sementara ditunda. Tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan jalan mengambil utang (apalagi utang ribawi). Adapun anggaran untuk jaminan san-

dang, pangan, papan, Kesehatan, pendidikan dan keamanan serta untuk dakwah dan jihad tidak boleh dipangkas jika menyebabkan *dharar* bagi masyarakat dan negara.

Bagaimana cara Islam membuat APBN benar-benar untuk kepentingan rakyat, tidak berbasis utang ribawi dan tunduk pada kepentingan imperialis penjajah?

Caranya, negara harus mengelola APBN sesuai dengan politik ekonomi dan politik APBN yang sejalan dengan syariah Islam, sekaligus dijalankan oleh seorang khalifah yang amanah.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar bisa mempunyai negara yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT sehingga benar-benar membela kepentingan rakyat, bukan oligarki dan penjajah?

Umat Islam harus melakukan perubahan radikal (terdidik dan berakal), tanpa kekerasan. Caranya dengan melakukan dakwah secara terstruktur dan sistemik untuk mewujudkan negara yang menerapkan syariah Islam secara *kāffah* dalam institusi Negara Khilafah *Rāsyidah*. Langkah yang harus dilakukan: *Pertama*, mewujudkan kesadaran di tengah-tengah umat bahwa sistem kapitalis sekuler adalah akar masalah APBN yang tidak berpihak kepada rakyat. *Kedua*, sampaikan kepada semua elemen masyarakat, juga penguasa, bahwa solusi sistem yang akan menggantikan sistem kapitalis sekuler, adalah sistem dan politik APBN Islam. *Ketiga*, memahami dan mendukung bahkan menjadi bagian dari partai atau kelompok yang memperjuangkan itu dengan metode yang mengikuti metode dakwah Rasulullah saw. *Keempat*, mendakwahkan tokoh-tokoh politik dan Ahlul al-Quwwah untuk mendukung dan membela dakwah tersebut. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah akan terwujud negara yang kebijakan APBN-nya pro rakyat.

Wallāhu a’lam. []



MENGATASI BEBAN EKONOMI KELUARGA YANG MAKIN BERAT

Meti Astuti

Seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meninggal dunia setelah mengantri gas LPG 3 kilogram pada Senin 3 Februari 2025 (*Tempo*, 4/2/2025).

Bu Yonih diduga kelelahan setelah berjualan. Setelah itu ia masih harus mengantri gas di pangkalan. Rupanya kelelahan dan kepanasan telah membuat ia terkena *heat stroke* dan akhirnya meninggal dunia.

Almarhumah Bu Yonih bukan satu-satunya korban. Di berbagai kota antrian mengular untuk mendapatkan gas subsidi 3kg telah terjadi. Ini adalah akibat dari aturan Kementerian ESDM tentang mekanisme distribusi baru. Walau kemudian aturan itu diralat karena mendapat protes dan tekanan dari masyarakat, kisruh akibat kebijakan tersebut telah terlanjur terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya, awal tahun 2025, Pemerintah juga telah mengumumkan akan mena-

ikkan PPN menjadi 12% yang berarti naik 1 poin atau naik sebesar 9% dari beban PPN sebelumnya, yaitu 11%. Kenaikan tersebut merupakan realisasi dari rencana kenaikan berkala setelah April 2022 yang lalu PPN naik satu poin dari 10% menjadi 11 % yang berarti naik 10% dari beban PPN sebelumnya (*Pajak.go.id*). Kenaikan ini merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Memang, Pemerintah kemudian membatalkan keputusan tersebut akibat gelombang protes dan keberatan dari masyarakat. Namun, karena pembatalan diumumkan mendadak hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan kenaikan, industri belum sempat beradaptasi dan meralat harga barang dan jasa di masyarakat. Akibatnya, harga barang dan jasa sudah terlanjur naik. Padahal tanpa-gonjang ganjing isu kenaikan PPN, Indonesia sudah mengalami penurunan daya beli yang

ditunjukkan dengan deflasi berturut-turut selama 5 bulan sejak Mei hingga Oktober 2024.

Gelombang PHK Menerjang

Setelah pada awal tahun dipukul bertubi-tubi dengan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, berikutnya badai PHK menerjang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi tutup per 1 Maret 2025 dan merumahkan 10.665 karyawannya. Jatuhnya Sritex bukan yang pertama. Kinerja industri manufaktur Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Indonesia masih tertinggal dari Vietnam, Thailand dan Malaysia (*Kompas*, 27/2/2025).

Daftar Pabrik yang tutup di era pemerintahan Prabowo terus bertambah. PT Sanken akan tutup per Juni 2025. PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), perusahaan smelter asal China yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah, juga terancam tutup. Pasalnya, produksi mereka mengalami pemangkasan drastis, bahkan terancam berhenti sepenuhnya setelah perusahaan diketahui menunda pembayaran kepada pemasok energi lokal dan kesulitan memperoleh bijih nikel.

Berikutnya, PT Yamaha Music dikabarkan bakal menutup dua pabriknya di Indonesia. Diperkirakan sebanyak 1.100 karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (*MSN.com* 2/3/2025).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly Rosita, menyebut sejak UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020, belum ada pembukaan pabrik baru yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja, yang terjadi justru gelombang PHK yang terus menerjang.

Tren negatif ini sebenarnya telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk data

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari hingga Desember 2024 terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan PHK karyawan tahun 2023 yang menysasar 64.855 unit. Belum termasuk korban PHK PT Sritex. Pabrik-pabrik berikutnya juga berencana tutup di tahun ini. (*Kontan*, 9/2/2025).

Dampak PHK Bagi Keluarga

PHK yang dialami anggota keluarga tidak hanya bermakna kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian, biaya tempat tinggal bahkan kehilangan kemampuan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam skala besar, gelombang PHK dapat memicu peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Menurunnya daya beli terhadap barang dan jasa menyebabkan konsumsi rumah tangga semakin rendah. Akibatnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) yang bergantung pada konsumsi lokal juga terancam

... politik ekonomi Islam menjamin setiap anggota masyarakat bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya mulai dari makanan, pakaian dan tempat tinggal; juga menjamin pemenuhan kebutuhan kolektif masyarakat...

tutup. Dalam kondisi demikian, efek domino PHK semakin meluas, menciptakan kemiskinan baru sebagai lingkaran setan yang sulit diputus.

Belum lagi dampak lanjutan dari PHK massal adalah keputusan yang menyebar di masyarakat. Ini bisa memicu ketegangan sosial. Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil akan melakukan protes. Mereka menginisiasi demonstrasi sebagai ekspresi kekecewaan dan ketidakpercayaan pada kebijakan pemerintah.

Bukan hanya dampak ekonomi dan sosial, PHK massal telah menyebabkan fragmentasi di masyarakat sehingga mudah saling serang. Konflik horisontal mudah terjadi.

Ironisnya masyarakat yang terdampak PHK dan sulit mencari pekerjaan formal mencoba masuk ke area *Gig Workers* atau kerja serabutan. Mereka harus berhadapan dengan masyarakat lain, padahal sama-sama hanya mengais kue ekonomi yang tidak seberapa.

Belum lagi potensi meningkatnya kriminalitas seperti pencurian, perampokan hingga pembunuhan. Ini terjadi akibat tekanan bertubi-tubi terhadap kondisi ekonomi cenderung membuat masyarakat gelap mata dan melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan banyak pihak.

Politik Ekonomi Islam Menjaga Ketahanan Keluarga

Dalam kitab *Politik Ekonomi Islam* karangan Syaikh Abdurrahman al-Maliki (2001), disebutkan bahwa politik ekonomi Islam menjamin setiap anggota masyarakat bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya mulai dari makanan, pakaian dan tempat tinggal; juga menjamin pemenuhan kebutuhan kolek-

tif masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan, yang seluruhnya disediakan negara secara gratis dan berkualitas.

Dalam rangka memastikan seluruh keluarga mampu hidup di atas standar hidup layak, Negara Islam akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki dan kepala keluarga. Dengan itu tidak ada satu pun keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Baitul Mal akan digunakan secara maksimal sesuai ketentuan syariah. Di antaranya untuk menyediakan sistem pendidikan yang akan menjamin setiap anggota masyarakat memiliki *skill* dan pendidikan yang mumpuni sehingga dapat berkontribusi di tengah masyarakat. Demikian pula di sektor kesehatan. Negara hadir terdepan melakukan pelayanan mulai dari edukasi, mitigasi (tindakan preventif), pengobatan hingga mengelola dampak (tindakan kuratif) terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, tanpa memungut bayaran sedikit pun. Negara memastikan kualitas layanan, aksesibilitas dan jumlah layanan kesehatan yang mampu meng-cover semua kebutuhan masyarakat.

Dalam Negara Khilafah yang menjalankan syariah Islam, keluarga akan leluasa memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus memikirkan pengeluaran pada bidang kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pasalnya, ketiganya merupakan kebutuhan masyarakat yang ditanggung oleh negara secara penuh. Kewajiban kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga menjadi ringan karena hanya memikirkan penyediaan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jika kepala keluarga atau ahli warisnya tidak mampu, Negara akan turun tangan untuk menanggung mereka dalam santunan kepada fakir miskin.

Meski keuangan Negara sedang kosong, kewajiban untuk menanggung fakir miskin tidak boleh ditinggalkan. Hal ini akan menjadi jaminan dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, bahwa mereka tetap bisa hidup layak dan berada di atas garis kemiskinan.

Dalam Kitab *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* (2004) karangan Syaikh Abdul Qadim Zalum, Amir ke-2 Hizbut Tahrir, jika anggaran Negara sedang kosong bahkan minus, Pemerintah Khilafah telah mendapat panduan bagaimana melakukan prioritas anggaran. Negara Khilafah dapat terus membiayai berbagai penyelenggaraan negara dengan mengenakan pajak (*dharîbah*) kepada laki-laki Muslim yang kaya, dengan besaran yang telah ditargetkan. Ketika jumlah yang dibutuhkan telah terpenuhi, maka penarikan pajak dihentikan. Adapun pendanaan darurat yang harus diprioritaskan adalah: *Pertama*, pendanaan untuk jihad fî sabilillah dan keberlangsungan industri militer penopang jihad. *Kedua*, pembiayaan untuk fakir miskin sehingga tidak ada masyarakat yang kelaparan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. *Ketiga*, belanja pegawai berupa gaji pegawai, hakim, guru, nakes dan orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan umat. *Keempat*, pembiayaan kemaslahatan masyarakat seperti pembangunan rumah sakit, jembatan, universitas, saluran air, jalan raya dan semua fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. *Kelima*, terakhir pembiayaan untuk penanganan berbagai bencana alam, longsor dll.

Dalam sistem Islam, sumber-sumber ekonomi akan dikelola dan digunakan sebaik-baiknya oleh negara untuk memberikan pelayanan dan pengurusan kepada masyarakat. Tidak

Meski keuangan Negara sedang kosong, kewajiban untuk menanggung fakir miskin tidak boleh ditinggalkan. Hal ini akan menjadi jaminan dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara bahwa mereka tetap bisa hidup layak dan berada di atas garis kemiskinan.

akan terjadi masyarakat yang terlunta-lunta akibat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada oligarki dan bukan kepada kepentingan dan maslahat masyarakat. Dengan itu tidak mungkin terjadi privatisasi pada layanan publik dan penguasaan sumber ekonomi milik umat oleh swasta.

Pembangunan berjalan. Kesejahteraan juga nyata dinikmati masyarakat. Semua ini bukan berpatokan pada ukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tetapi dengan memastikan setiap individu masyarakat tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang telanjang serta tidak ada yang kepanasan dan kehujanan karena tidak punya tempat bernaung.

Keluarga-keluarga Muslim dan seluruh anggota masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara berkualitas dan gratis sebagai pemenuhan amanah kepemimpinan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



KORUPSI

Di negeri ini, korupsi seolah sudah menjadi tradisi. Menjadi budaya. Bahkan sampai ada yang berkata sinis, "Budaya Barat itu bukan budaya kita. Budaya kita itu korupsi!" Seperti bercanda, tetapi nyata menggambarkan realitas yang terjadi. Korupsi—setali tiga uang dengan suap-menyuap dan gratifikasi—sudah sangat biasa terjadi nyaris di semua lini. Dari mulai tingkat pemerintahan desa, bahkan RT, hingga ke tingkat pusat, korupsi sudah terjadi. Celakanya, semua ini seolah dimaklumi.

Yang lebih membuat miris, korupsi sekarang bukan hanya bernilai puluhan atau ratusan juta rupiah. Bahkan tidak lagi bernilai miliaran atau ratusan miliar rupiah. Korupsi sekarang sudah di angka triliunan, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun rupiah. Korupsi di PT Timah, PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Pupuk Nusantara dan banyak BUMN lainnya tidak lagi bernilai ecek-ecek. Angkanya sudah tak masuk akal. Total mencapai ribuan triliun rupiah. Sudah begitu, para pelakunya acapkali dibiarkan. Kalaupun diterangkan dan dihukum, mereka dihukum

dengan sangat ringan. Tak jarang, mereka dibebaskan dari segala dakwaan. Tak sebanding dengan kejahatannya yang sangat luar biasa dan sangat merugikan rakyat.

Tentu menjadi pertanyaan: Apa sebetulnya yang dicari oleh para koruptor? Apa yang menjadikan mereka gemar korupsi, bahkan seolah tak punya urat malu lagi? Padahal, yang mereka nikmati, sebanyak apapun, tak lebih dari secuil kenikmatan duniawi. Kenikmatan dunia, jangankan yang haram, seperti hasil korupsi, bahkan yang halal pun—di sisi Allah SWT—tak bernilai apa-apa. Jangankan hanya ratusan atau bahkan ribuan triliun rupiah, bahkan andai seorang manusia memiliki bumi dan seluruh isinya, semua itu tetap tak sebanding dengan secuil saja kenikmatan di akhirat (surga). Secuil saja kenikmatan di surga sangat tak sebanding dengan sebanyak dan berlebihan apapun dari nikmat duniawi nan abadi. Begitulah yang Allah SWT gambarkan dalam al-Quran (yang artinya): *Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit sekali, sementara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun."* (TQS an-Nisa' [4]: 77).

Imam Ibnu Katsir *rahimahullâh* dalam *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* (2/383) menjelaskan bahwa dunia itu fana (profan), sedangkan akhirat adalah kekal-abadi. Karena itu orang yang berakal pasti akan memilih sesuatu yang kekal-abadi dibandingkan dengan yang fana.

Sekali lagi, jangankan harta haram, harta halal yang amat melimpah pun tetap sedikit dibandingkan dengan kenikmatan surga. Rasulullah saw. bersabda:

«مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

Sejengkal tempat di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* (13/42) menjelaskan bahwa kenikmatan dunia, walaupun tampak besar, tidak ada nilainya dibandingkan surga yang kekal dan penuh kenikmatan. Saking kecilnya harga dunia dibandingkan akhirat, bahkan dua rakaat shalat sunnah sebelum shalat subuh jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah saw. bersabda:

«رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

Dua rakaat shalat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya (HR Muslim).

Imam Ibnu Rajab dalam *Fath al-Bâri* (6/277) menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa remehnya nikmat dunia dibandingkan dengan amal ibadah yang akan memberikan pahala dan kenikmatan yang amat besar dan kekal di akhirat.

Demikian pula sebagaimana dinyatakan oleh Abu 'Ubaid bin 'Umair *rahimahullâh*, "Sungguh dunia itu remeh di mata Allah SWT. Buktinya, Allah memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang Dia cintai ataupun yang tidak Dia cintai. Adapun iman hanya Allah berikan kepada orang yang Dia cintai." (Abu Nu'aim al-Asbahani, *Hilyah al-Awliyâ'*, 3/ 270).

Saking remehnya dunia, Allah SWT memberikan dunia (harta tahta, wanita, kekuasaan dll) kepada siapa saja; Muslim atau kafir; Mukmin atau fasik; yang taat atau tukang maksiat.

Ini pula sesungguhnya yang ditegaskan oleh Rasulullah saw. Sabda beliau, "Demi Allah. Tidaklah (nikmat) dunia dibandingkan dengan (nikmat) akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka lihatlah air yang menempel di jarinya itu." (HR Muslim).

Artinya, nikmat dunia itu seperti air yang menempel di ujung jari. Amat sedikit. Apalagi

jika dibandingkan dengan besarnya dan berlimpahnya nikmat surga di akhirat nanti.

Karena itu seorang Muslim yang cerdas sejatinya tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia yang amat sedikit, baik yang halal, apalagi yang haram, seperti hasil korupsi. Meskipun harta yang diperoleh dari korupsi tampak banyak, sejatinya itu hanyalah bagian dari nikmat dunia yang amat sedikit dan akan mendatangkan azab yang besar. Sebabnya jelas. Korupsi adalah tindakan batil yang telah Allah SWT haramkan: *Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil* (QS al-Baqarah [2]: 188).

Imam al-Qurtubi dalam *Tafsir Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (2/305) menyebutkan bahwa segala bentuk pengambilan harta secara batil, tentu termasuk korupsi, adalah haram dan pelakunya akan mendapat azab yang pedih di akhirat.

Selain itu, harus selalu disadari, bahwa dunia ini adalah tempat kesenangan (sebagai ujian), sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu* (QS al-Hadid [57]: 20).

Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn* (4/353) mengatakan bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang fana, sehingga tidak layak bagi seorang Mukmin untuk menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidupnya.

Semoga Allah SWT memberi kita hidayah dan taufik agar kita selalu diberi kesadaran untuk senantiasa lebih mengutamakan upaya untuk meraih nikmat surga yang tak terhingga dan abadi daripada nikmat dunia yang tak seberapa dan fana ini. Âmîn.

Wa mâ tawfiqillâ billâh. [Arief B. Iskandar]

MENGIMANI HARI KIAMAT

M. Taufik NT

Hari Kiamat adalah hari saat kehidupan di dunia berakhir dan kehidupan di akhirat dimulai. Hari Kiamat juga disebut Hari Akhir (*Yawm al-Ākhir*) atau *As-Sâ'ah*. Mengimani keberadaan Hari Kiamat erat kaitannya dengan mengimani keberadaan Allah SWT. Ada 19 tempat dalam al-Quran yang menyandingkan keimanan kepada Allah dengan keimanan pada Hari Akhir. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan iman pada Hari Kiamat.

Makna Mengimani Hari Kiamat

Mengimani keberadaan dan kepastian Hari Kiamat bukan sekadar meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir, namun juga mengimani Hari Kebangkitan (*Yawmul Ba'ts*). Semua yang ada di dunia akan mati, kemudian Allah SWT akan menghidupkan lagi yang mati. Allah SWT akan mengumpulkan tulang-belulang mereka yang hancur berserakan. Allah SWT akan mengembalikan jasad-jasad seperti sedia kala dan Allah mengembalikan kepada jasad-jasad itu ruhnya masing-masing. Allah SWT berfirman:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

Kemudian, sesungguhnya kalian akan

dibangkitkan (dari kubur-kubur kalian) pada Hari Kiamat (QS al-Mu'minum [23]: 16).

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾

la berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur-luluh?" Katakanlah, "la akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama." (QS Yâ sin [36]: 78-79).

Termasuk mengimani Hari Kiamat adalah keyakinan bahwa manusia akan diberi kitab (catatan amal)-nya masing-masing pada Hari Kiamat. Orang-orang Mukmin yang baik akan diberi kitabnya dari sebelah tangan kanan mereka, diberi hisab yang ringan dan diberi berbagai kenikmatan (QS al-Haaqah [69]: 19-24). Sebaliknya, orang-orang durjana akan diberi kitabnya dari sebelah tangan kiri mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهٖ، وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيهٖ، يَا لَيْتَهَا﴾

كَانَتْ الْقَاضِيَةَ، مَا أَعْنَى عَنِّي مَالِيَهُ، هَلَكَ
عَنِّي سُلْطَانِيَهُ، خُذُوهُ فَعَلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ
صَلُّوهُ ﴿

Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kirinya, dia berkata, “Duhai, alangkah baiknya kiranya aku tidak diberi kitabku (ini). Aku tidak mengetahui hisab apa terhadap diriku. Duhai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dari diriku.” (Allah berfirman), “Peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.” (QS al-Haqqah [69]: 25-31).

Mengimani Hari Kiamat juga meliputi keyakinan bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Surga adalah tempat yang diciptakan untuk orang-orang yang beriman. Sebaliknya, neraka adalah tempat orang-orang kafir dan

Mengimani keberadaan Hari Kiamat erat kaitannya dengan mengimani keberadaan Allah SWT. Ada 19 tempat dalam al-Quran yang menyandingkan keimanan kepada Allah dengan keimanan pada Hari Akhir.

orang-orang yang lebih banyak keburukannya. Allah SWT berfirman:

﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾

Tidak ada yang masuk ke dalamnya, kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu (QS al-Lail [92]: 15-17).

Akan masuk neraka orang-orang yang Allah kehendaki dari golongan kaum Muslim yang lebih banyak dosa besarnya dan kejahatannya dibandingkan dengan dosa kecil dan kebaikan-kebaikannya. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.

Termasuk meyakini keberadaan surga adalah yakin bahwa kenikmatan surga itu riil, bisa dirasakan. Para penghuni surga makan, minum, berhubungan badan, berpakaian dan bersenang-senang (QS al-Waqi'ah [56]: 17-24). Begitu juga neraka. Azabnya adalah riil dan dapat dirasakan. Ini misalnya dinyatakan dalam firman Allah SWT:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ،
أَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ، فَمَا لِيُؤْتَوْا
مِنْهَا الْبُطُونَ، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ،
فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾

Kemudian sesungguhnya kalian, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon Zaqqum, dan pohon Zaqqum itu akan memenuhi perut kalian. Sesudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Lalu kalian minum seperti unta yang sangat kehausan (QS al-Waqi'ah [56]: 51-55).

Kapan Kiamat Terjadi?

Kiamat akan terjadi. Itu adalah bagian dari keyakinan. Mengingkari Hari Kiamat berarti kafir. Hanya saja, terkait kapan Kiamat terjadi, al-Quran dan as-Sunnah yang shahih tidak menyebut hitung-hitungannya secara jelas. Adanya perhitungan sebagian ulama yang menyatakan bahwa umur umat Islam maksimal 1500 tahun, sehingga tinggal tersisa 41 tahun saja, itu hanyalah dugaan semata. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali menyatakan:

«وَمُدَّةُ الْبَاقِي مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَعْلَمُهُ
عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا يُدْكَرُ فِي
ذَلِكَ فَأَنْتُمْ هُوَ أَظُنُّونَ لَا تُفِيدُ عِلْمًا»

Adapun lamanya sisa umurnya sampai Hari Kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu dengan sebenarnya kecuali Allah SWT. Apa saja yang disebut dalam (pembahasan) yang demikian hanyalah merupakan perkiraan-perkiraan yang tidak berfaedah kepastian.

Imam as-Sakhawi (w. 902 H) juga mengomentari riwayat-riwayat yang menunjukkan hitungan kapan Kiamat terjadi:

«كُلُّ مَا وَرَدَ مِمَّا فِيهِ تَحْدِيدٌ لَوْ قَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
عَلَى التَّعْيِينِ، فَمَا أَنْ يَكُونَ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ لَا
يَنْبُتُ إِسْنَادُهُ»

Setiap riwayat yang menyebutkan batasan Hari Kiamat dengan ta'yiin (penetapan/penentuan), adakalanya tidak ada asalnya... atau tidak kuat sanadnya.

Yang lebih penting dari membahas kapan Hari Kiamat terjadi, atau kapan umat Islam akan berakhir, adalah membahas amal apa yang telah kita persiapkan untuk bekal

Sebagian orang menolak membela Palestina, menolak pula ide tentang khilafah dengan alasan, “Jika Palestina menang, atau Khilafah tegak, maka Hari Kiamat semakin dekat.” Ini adalah bentuk kekacauan berpikir, mengkontradiksikan kewajiban dengan akidah.

di Akhirat kelak. Dari Anas ra., dia berkata: Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang Kiamat. Ia berkata, “Kapan Kiamat terjadi, ya Rasulullah?” Rasul saw. berkata, “Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi Kiamat tersebut?” Laki-laki itu berkata, “Aku tidak menyiapkan apa pun kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Rasul saw. berkata, “Engkau bersama apa yang engkau cintai.” (HR Mutafaq ‘Alaih).

Kiamat, Khilafah dan Palestina

Sebagian orang menolak membela Palestina, menolak pula ide tentang khilafah dengan alasan, “Jika Palestina menang, atau Khilafah tegak, maka Hari Kiamat semakin dekat.” Ini adalah bentuk kekacauan berpikir, mengkontradiksikan kewajiban dengan akidah.

Makin dekatnya Hari Kiamat itu adalah satu kepastian, sebagaimana seseorang yang hidup akan makin dekat dengan ajalnya, tanpa memandang apa yang dia lakukan. Mene-

gakkan Khilafah adalah satu kewajiban. Begitu pula membela Palestina. Jika kewajiban ini diperjuangkan dengan ikhlas dan benar, itu akan menjadi bekal kehidupan setelah Hari Kiamat kelak. Sebaliknya, ketika seseorang enggan berupaya melaksanakan kewajiban ini, bukan berarti Hari Kiamat akan tertunda. Apa yang telah Allah gariskan tetaplah akan terjadi. Allah lalu akan memilih orang-orang lain yang akan melaksanakan kewajiban tersebut, sementara orang yang enggan akan menuai buah keengganannya tersebut pada Hari Akhir.

Pengaruh Keimanan pada Hari Kiamat

Keimanan pada Hari Kiamat, jika merasuk dalam diri seseorang dan selalu dia sadari, akan mengerem seseorang dari mengumbar hawa nafsu maksiat. Ini karena dia sadar bahwa setiap kemaksiatan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di Akhirat. Selain mengerem dari maksiyat, keimanan pada Hari Kiamat akan mendorong seseorang untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT sebagai bekal untuk kehidupan kekal abadi. Dia akan berusaha menjaga hati/sikap, perbuatan, termasuk perkataan. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ حَيْرًا
أَوْ لِيَصُمْتُ»

Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah! (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ini berarti seseorang harus berpikir serius sebelum berbicara. Dia harus memastikan bahwa apa yang akan dia ucapkan adalah hal yang baik, bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Dia tidak akan mengeluarkan ucapan yang Allah murkai. Dia tidak akan menentang

syariah-Nya, memprovokasi dakwah dan semisalnya meskipun itu menguntungkan dirinya secara materi. Dia akan mengatakan kebenaran meskipun pahit dan di bawah tekanan makhluk. Ini karena dia sadar bahwa Allah SWT lebih Perkasa dan di akhirat lebih keras siksa-Nya. Demikian sebagaimana Imam an-Nawawi, saat diancam oleh sulthan karena beliau mengkritik kebijakannya, dengan tegas menyatakan:

«وَأَمَّا أَنَا فِي نَفْسِي، فَلَا يَضُرُّنِي التَّهْدِيدُ،
وَلَا أَكْبَرُ مِنْهُ، وَلَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ مِنْ تَصِيحَةِ
السُّلْطَانِ، فَإِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَيَّ
وَعَلَى غَيْرِي، وَمَا تَرْتَبُ عَلَى الْوَاجِبِ، فَهُوَ خَيْرٌ
وَزِيَادَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى»

Adapun aku, maka ancaman itu, bahkan yang lebih besar dari ancaman tersebut, tidak akan mendatangkan madarat kepadaku, dan tidak pula menghalangi aku untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Ini karena aku yakin bahwa menasihati penguasa itu wajib bagiku dan juga wajib bagi orang lain. Sementara itu, risiko dari melaksanakan kewajiban itu adalah kebaikan dan tambahan kebaikan di sisi Allah SWT."

Keyakinan akan keberadaan Hari Kiamat dapat membuat manusia memiliki tujuan hidup yang jelas dan jauh ke depan, yakni tujuan sampai ke negeri akhirat. Hal ini akan menentukan jalan ataupun langkah apa yang akan ditempuh semasa hidup di dunia, sembari mempertimbangkan setiap risiko yang akan dia terima dari pilihan-pilihan hidupnya, baik risiko di dunia maupun risiko di akhirat. Semua itu dia pandang sebagai bekal untuk hidup di akhirat.

Wallâhu a'lam. []



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



NASIB ORANG YANG SANGAT INKAR

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ﴿٢٥﴾ مُرِيبٍ ﴿٢٦﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾﴾

Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku" (23); Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala (24); Yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu (25); Yang menyembah sembahyan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat".(26) (QS Qaf [50]: 23-26)..

Dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan tentang dua peristiwa besar yang akan dialami manusia. Di antaranya adalah kedatangan sakaratul maut dan peniupan sangkakala oleh Israfil. Kedua peristiwa akan membuat manusia benar-benar melihat Hari Kebangkitan dan Hari Pembalasan yang disampaikan kepada mereka. Jika selama di dunia ada manusia yang mengingkari semua ini, maka di Akhirat semua itu mereka saksikan langsung dengan mata-kepala sendiri.

Ayat-ayat ini masih memberitakan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Kiamat.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ﴾

Yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.

Kata «مَنَّاعٍ» merupakan bentuk *mubālaghah* dari kata «الْمَنْعُ» (mencegah, menghalangi). Maknanya adalah «كثيرُ الْمَنْعِ» (banyak mencegah, menghalangi).¹ Kata tersebut berkedudukan sebagai sifat kedua dari kata «كَفَّارٍ» yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.²

Kata «الْخَيْرِ» (kebaikan) secara bahasa pada asalnya berarti «الْعُظْفُ وَالْمَيْلُ» (kasih sayang dan kecenderungan). Dengan demikian kata «الْخَيْرِ» (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata «الشَّرِّ» (keburukan, kejahatan). Sebabnya, setiap orang merasa cenderung atau senang pada kebaikan dan berbelas kasih kepada pemiliknya.³

Menurut ar-Raghib al-Asfahani, kata *al-khayr* adalah « مَا يَرَعَبُ فِيهِ الْكُلُّ، كَالْعُقْلِ » (sesuatu yang diinginkan oleh semua orang seperti akal, keadilan, keutamaan, dan hal-hal yang bermanfaat).⁴

Dengan demikian, « مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ » berarti yang banyak menghalangi dan mencegah manusia dari kebaikan.⁵ Dalam konteks ayat ini, terdapat beberapa penafsiran. Menurut sebagian mufassir, yang dimaksud dengan *al-khayr* (kebaikan) di sini adalah Islam. Alasannya, ayat ini turun tentang Walid bin al-Mughirah ketika dia menghalangi anak-anak saudaranya dari Islam.⁶

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah harta. Artinya, yang dimaksud dengan *mannā'i li al-khayr* (sangat enggan terhadap kebaikan) adalah enggan menunaikan zakat yang diwajibkan dan setiap hak yang wajib atas hartanya. Di antara yang berpendapat demikian adalah ats-Tsa'labi, al-Wahidi, al-Baghawi, al-Khazin dan lain-lain.⁷

Pendapat tersebut juga diungkap oleh Fakhruddin ar-Razi. Maknanya: Dia sangat enggan memberikan harta yang wajib. Jika dikaitkan dengan « الْكُفْرُ » (kekufuran) maka maknanya: dia adalah orang yang mengingkari dalil-dalil keesaan Allah meskipun dalil-dalil tersebut begitu kuat dan jelas. Oleh karena itu, dia sangat keras dalam kekufurannya dan bersikap membangkang karena sia menolak perkara yang terang dan kebenaran yang jelas. Dia juga sangat kufur nikmat. Ini karena setiap kali mendapatkan nikmat, dia selalu ingkari meskipun nikmat itu banyak dan datang dari Tuhan Yang berhak disembah (Allah SWT). Dengan demikian *al-khayr* di sini bermakna harta. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۗ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾
Celakalah kaum musyrik, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat (QS Fushshilat [41]: 6-7).

Di sini Allah memulai dengan penjelasan kesyirikan, kemudian menyebutkan keengganan mereka dalam menunaikan zakat. Maka dari itu terdapat keterkaitan yang kuat jika kita memahami bahwa kata « كَفَّارٌ » berasal dari kata « الْكُفْرَانُ » (pengingkaran nikmat). Seolah-olah ayat ini menyatakan: Dia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT dan tidak memberikan sedikit pun sebagai bentuk syukur atas nikmat tersebut.⁸

Ibnu Jarir ath-Thabari memaknai perkara ini secara lebih luas, yakni, semua hak yang wajib ditunaikan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia dalam harta.⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Imam al-Qurthubi, al-Baidhawi, dan lain-lain.¹⁰

Ibnu Katsir berpendapat bahwa « مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ » adalah orang yang tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya, tidak mau berbakti, tidak mau bersilahturahmi dan tidak mau pula bersedekah.¹¹

Adapun kata « مُعْتَدٍ » (yang melanggar batas) adalah yang melanggar batas dalam membelanjakan dan mempergunakan harta hingga melampaui garis yang ditentukan.¹²

Qatadah mengatakan bahwa makna *mu'tadin* ialah orang yang melampaui batas dalam perjalanan dan urusannya.¹³

Menurut al-Qurthubi, dia adalah orang yang zalim dalam pembicaraan, perilaku dan urusannya.¹⁴

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, « مُعْتَدٍ » adalah orang yang melampaui batas atas ma-

nusia dengan lisannya melalui kata-kata kotor dan keji dan dengan tangannya melalui perbuatan kasar lagi zalim.¹⁵

Sifat lainnya adalah «مُرِيْبٍ» (yang ragu-ragu). Menurut al-Hasan dan Qatadah, *murib* adalah orang yang ragu dalam tauhid.¹⁶ Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan kata itu dengan orang yang ragu terhadap keesaan Allah SWT dan Quدرات-Nya atas segala sesuatu.¹⁷

Menurut asy-Syaukani, dia orang yang ragu terhadap kebenaran. Itu berasal dari ungkapan mereka: «أَرَابَ الرَّجُلُ» ketika «صَارَ ذَا رَيْبٍ» (dia menjadi orang memiliki keraguan).¹⁸ Wahbah az-Zuhaili menafsirkan frasa ini sebagai orang yang ragu terhadap tentang Allah SWT, agama-Nya, dan kabar-kabar-Nya.¹⁹

Menurut Ibnu Katsir, mereka tidak hanya ragu dalam urusannya, namun juga membuat ragu orang yang melihat urusannya.²⁰

Kemudian Allah SWT:

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾

Yang menyembah sesembahan yang lain beserta Allah.

Artinya, dia menyekutukan Allah sehingga dia menyembah selain Allah di samping menyembah Allah.²¹ Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Orang yang menyekutukan Allah SWT, lalu dia menyembah bersama Allah SWT sesembahan lain dari makhluk-Nya."²²

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾

Lalu lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat pedih.

Kepada orang-orang yang memiliki sifat demikian, malaikat diperintahkan untuk melamparkan mereka ke dalam neraka. "Lemparkanlah dia ke dalam azab Neraka Jahanam

Orang-orang kafir dengan segala sifat buruk mereka akan dibangkitkan pada Hari Kiamat. Semua catatan amalnya akan diserahkan kepada Allah SWT. Tak ada yang terlewat dari amal perbuatan yang mereka kerjakan.

yang sangat keras!"²³

Menurut al-Qurthubi, asy-Syaukani, dan al-Zuhaili, ini merupakan *ta'kid* (penegasan) terhadap perintah sebelumnya.²⁴

Tentang orang-orang yang memiliki sifat tersebut dimasukkan ke dalam neraka, juga diberitakan dalam hadis. Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«يَخْرُجُ عُنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ»

Akan keluar sebuah leher dari neraka pada Hari Kiamat. Dia mempunyai dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar dan lisan yang dapat berbicara. Dia berkata, "Saya ditugaskan membakar tiga kelompok, yakni semua yang keras kepala lagi penentang; semua yang beribadah bersama Allah sembah-

an yang lain; dan para penggambar (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Imam Ahmad mengatakan: telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah ibnu Hisyam; telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Firas, dari Atiyyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Ke-lak akan muncul leher dari neraka yang dapat berbicara, lalu mengatakan, "Pada hari ini aku diperintahkan untuk menangkap tiga macam orang, yaitu: tiap-tiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala; orang yang menjadikan tuhan lain beserta Allah; dan orang yang membunuh seseorang bukan karena dia telah membunuh seseorang." Lalu leher neraka itu membelit mereka dan mencampakkan mereka ke dalam luapan api neraka Jahanam."*

Demikianlah. Orang-orang kafir dengan segala sifat buruk mereka akan dibangkitkan pada Hari Kiamat. Semua catatan amalnya akan diserahkan kepada Allah SWT. Tak ada yang terlewat dari amal perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam Jahanam. Ini jelas merupakan ancaman dan peringatan keras bagi siapapun yang memiliki sifat sebagaimana diceritakan ayat ini.

Semoga kita dijauhkan dari sikap demikian.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1). Lihat Mahmud Shafi, *al-Jadwal fî I'râb al-Qur`ân*, vol. 26 (Beirut: Dar al-Rasyid, 1998), 312; al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar*, vol. 18 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 427
- 2). Lihat Syihabuddin al-Khafaji, *Inâyat al-Qâdhi wa Kifâyat al-Râdhi*, 8 (Beirut: Dar Shadir, tt), 89 Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur`ân*, vol. 4 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, tt), 1226; al-Da'as, *I'râb al-Qur`ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 258
- 3). Ibnu Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 232; Zainuddin al-

Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 99

- 4). al-Asfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 300
- 5). Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 312
- 6). Lihat al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Tawîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1998), 142; Abu al-Su'ud, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt), 131
- 7). al-Tsa'labi, *al-Kasyf wa al-Bayân 'an al-Qur`ân*, vol. 24 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 2002), 471; al-Wahidi, *al-Wajîz, fî Tafsîr al-Kitâbb al-'Azîz* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), 1024; al-Baghawi, *Ma'âlim al-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur`ân*, vol. 7 (Beirut: Dar Thayyibah 1997), 361; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 188
- 8). al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 136
- 9). al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 356
- 10). al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 16; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 141
- 11). Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 402
- 12). Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 402
- 13). Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 402
- 14). al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 15). al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 356
- 16). al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17
- 17). al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 356
- 18). al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 90
- 19). al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26, 300
- 20). Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 402
- 21). Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 402
- 22). al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 356
- 23). al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 356
- 24). al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 17; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 90; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Muniir*, vol. 26, 300

TASHARRUF HARTA MENJELANG KEMATIAN

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ
لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ»

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika (menjelang) kematian kalian sebagai tambahan dalam kebaikan kalian agar Dia menjadikan itu sebagai penyucian dalam harta kalian.

(HR ad-Daraquthni no. 4289, ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Kabir* no. 94, al-Baihaqi di dalam *Al-Khilâfiyât*).



Ibnu al-Mulaqin (w. 804 H) berke-mentar di dalam *Al-Badru al-Munîr*, “Ini adalah hadis dari Ismail bin 'Ayyasy, dari Utbah bin Humaid, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Muadz bin Jabal. Al-Qasim adalah Ibnu Abdirrahman dan pada dirinya ada kelemahan. Ismail bin Ayyasy *dha'if* dalam riwayatnya dari selain asy-Syamiyyin. Hadis ini termasuk riwayatnya dari selain mereka sebab dari Utbah bin Humaid dan dia Bashriy. Selain itu Utbah didhaifkan oleh Ahmad.”

Namun, al-Haytsami (w. 807 H) di dalam *Majma' az-Zawâ'id* mengatakan bahwa Utbah bin Humaid disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya.

Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi serupa dari Abu Hurairah, Abu ad-Darda', Abu Bakar ash-Shiddiq dan Khalid bin 'Ubaidullah as-Sulami.

Hadis Abu Hurairah ra. diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibni Mâjah* no. 2709, al-Bazzar di dalam *Musnad al-Bazar* no. 9316 dan al-Baihaqi di *Al-Khilâfiyât* dari Thalhah bin Amru al-Makkiy dari Atha' bin Abiy Rabah dari Abu Hurairah. Tentang Thalhah, az-Zaila'iy (w. 762 H) mengatakan di dalam *Nashbu ar-Râyah*: Al-Bazzar berkata: “...Dia, meski jamaah meriwayatkan dari dirinya, bukan perawi kuat.”

Ibnu al-Mulaqin berkata di dalam *Al-Badru al-Munîr*, “Mereka mendhaifkannya. Ahmad ber-

kata: *lâ syay'a* (tidak ada apa-apanya), *matrûk al-hadîts*. Al-Bazzar menilainya *layyin*. Ia berkata: bukan perawi yang *hâfîzh* (hapalannya kuat).”

Hadis Abu ad-Darda' diriwayatkan oleh Ahmad no. 27482, al-Bazar no. 4133, ath-Thabarani di dalam *Musnad asy-Syâmiyyîn* no. 1484. Ibnu al-Mulaqin berkata, “Di dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abiy Maryam dan pada dirinya ada kelemahan; mencampuradukkan hadis. Ibnu Hibban berkata: ia buruk hapalannya, tidak dijadi-kan *hujjah* jika menyendiri.”

Al-Harits bin Khalid bin Ubaidullah as-Sulami meriwayatkan dari bapaknya, bahwa Rasul saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ
أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»

Sesungguhnya Allah memberi kalian ketika (menjelang) wafat kalian sepertiga harta kalian sebagai tambahan dalam amal-amal kalian (HR ath-Thabarani di *Mu'jam al-Kabir* no. 4129, Ibnu Abiy 'Ashim di *al-Ahâd wa al-Matsâniya* no. 1385).

Al-Haytsami (w. 807 H) di dalam *Majma' az-Zawaid* menilai hadis ini *hasan*. Ibnu al-Mulaqin di dalam *Al-Badru al-Munîr* berkata, “*Isnad* hadis ini *jayyid* (baik). Namun, dinyatakan oleh Ibnu al-Atsir di dalam *Ma'rifatu ash-Shahâbah* bahwa Khalid diperselisihkan sebagai Sahabat...”

Abu Umar berkata: Isnad hadis ini tidak tegak hujjah dengannya, sebab mereka *majhûl*.”

Alhasil, semua riwayat hadis di atas tidak kosong dari penilaian lemah. Namun, tidak ada yang lemah karena mungkar atau perawinya dituduh dusta. Maka dari itu, riwayat di atas dapat menjadi *syâhid* satu sama lain sehingga hadis di atas menjadi *hasan li ghayrihi*. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) berkata di dalam *Bulûgh al-Marâm* tentang semua riwayat di atas, “Semuanya *dha’if*, tetapi sebagian mengu-
atkan sebagian yang lain.”

Alhasil, hadis ini adalah *hasan* dan sah dijadi-
kan *hujjah* dalam hukum syariah.

Sabda Rasul saw., “*Innallâh tashaddaqa ‘alaykum ‘inda wafâtikum bi tsulutsi amwâlikum*”, menurut Nuruddin as-Sindi (w. 1138 H) di dalam *Hâsyiyah as-Sindi ‘alâ Sunan ibni Mâjah*, yakni Allah telah menjadikan untuk kalian dan memberi kalian hak *tasharruf* meski ahli waris tidak ridha.”

Imam al-Munawi (w. 1031 H) menjelaskan hadis ini di dalam *Faydh al-Qadîr*, yakni memungkinkan kalian untuk melakukan *tasharruf* harta ketika itu dengan wasiat dan yang lainnya. Jadi wasiyat sepertiga harta adalah sah meski bersama dengan adanya ahli waris dan ketidaksetujuan mereka. “*Wa ja’ala dzâlika ziyâdat[an] lakum fi a’mâlikum*”. Artinya, pahala wasiat tersebut termasuk amal si mayit dan dia diberi pahala jika wasiatnya diterima.

Jadi, *tasharruf* atas harta pada waktu menjelang kematian, terutama dalam kondisi sakit (*maradh al-mawt*) baik wasiat, hibah, dan lainnya, maka boleh maksimalnya sepertiga dari harta yang dimiliki. Menurut para ulama, itu dinilai sebagai wasiat dan dijalankan pada maksimal sepertiga harta.

Hal itu ditegaskan oleh hadis dari Imran bin Hushain ra:

«أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَانًا، ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرْقَى أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا»

Seorang laki-laki memerdekakan enam orang budak miliknya ketika menjelang kematiannya. Dia tidak memiliki harta selain mereka. Lalu Rasulullah saw. memanggil mereka dan membagi mereka menjadi tiga bagian (kelompok tiap kelompok dua orang), Beliau mengundi di antara mereka lalu memerdekakan dua orang dan tetap menjadikan empat orang sebagai budak. Beliau kemudian mengatakan ucapan yang tegas untuk dirinya (HR Muslim no. 1668, Ahmad no. 19826, Abu Dawud no. 3958, Ibnu Majah no. 2345, an-Nasai no. 1958, at-Tirmidzi no. 1364 dan lainnya, ini adalah redaksi Imam Muslim).

Hadis Imran ini sekaligus menegaskan kebolehan wasiat untuk selain kerabat. Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) menyatakan di dalam *Al-Istidz-kâr*: Wasiat ini untuk mereka (6 orang budak) pada sepertiganya karena perbuatan orang yang sakit itu semuanya adalah wasiat pada sepertiganya. Rasulullah saw. memperbolehkan wasiat tersebut dengan memerdekakan sepertiga dari mereka dan mereka tidak diragukan lagi bukan kerabatnya.”

Selain itu al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* menyatakan: jika *tasharruf* seseorang berupa memerdekakan budak tidak diterapkan, seraya ada dorongan dari *asy-Syâri* atasnya, maka *tasharruf* lainnya lebih utama lagi tidak diterapkan.

Jadi seseorang dilarang menghibahkan, menghadiahkan, mewasiatkan atau melakukan *tasharruf* lainnya atas hartanya di kala menjelang kematian atau sakit menjelang maut (*maradh a-mawt*). Jika dia melakukan itu maka diterapkan pada maksimal sepertiga dari hartanya.

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

INDONESIA IAGELAP

INDONESIA CERAH HANYA
DENGAN SYARIAH**Dr. Erwin Permana**

Direktur PAKTA

Beberapa hari belakangan di tengah publik Indonesia mengalir deras opini *Indonesia Gelap*. Berbagai meme, berita pendek, *podcast* dan artikel banyak mengulas perihal opini tersebut. Opini *Indonesia Gelap* bertali-temali dengan opini *kabur aja dulu*. Kedua tagar opini tersebut digagas oleh gerakan muda dan diikuti dengan rentetan aksi mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Opini *Indonesia Gelap* tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang memang tidak sedang cerah-cemerlang. Kegelapan terjadi di berbagai lini kehidupan dan terlihat oleh mata semua orang, terutama kalangan muda. Mereka sangat kecewa lantaran negeri ini, yang seharusnya penduduknya menikmati kesejahteraan, hidup dalam penderitaan. Rezim baru, yang diharapkan mampu mengatasi kondisi rusak warisan rezim sebelumnya, ternyata sama saja. Janjinya akan mengejar korupsi hingga antartika. Yang ada malah wacana akan mengampuni koruptor. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan. Yang terjadi justru

beban masyarakat meningkat akibat kenaikan pajak. Janji lapangan pekerjaan. Yang terjadi justru PHK besar-besaran. Beberapa perusahaan yang tadinya beroperasi justru tutup seperti Sritex, Sanken, PT GNI dan Yamaha. Kemungkinan akan ada penutupan beberapa perusahaan lainnya. Belum lagi buruknya penanganan pagar laut, yang harusnya membongkar kejahatan korporasi, malah berakhir klimaks dengan hanya menjadikan satu kepala desa sebagai tersangka.

Indonesia Gelap

Seluruh mata dunia melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya raya dengan sumber daya alamnya. Kekayaan melimpah dari dasar laut, darat hingga ke dalam bumi. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang melimpah. Ini akan menjadi potensi yang sangat besar untuk menciptakan suatu peradaban tinggi jika dikelola dengan baik.

Belum lagi posisi geografis yang sangat strategis, jika dikelola dengan baik, akan menjadi potensi yang sangat menentukan arah



politik ekonomi dunia. Jika dunia menjadi satu negara maka Indonesia sangat layak menjadi ibukotanya, lantaran posisinya yang sangat strategis.

Namun, kenyataan yang terjadi justru mengelus dada. Indonesia kaya, tetapi masyarakatnya hidup penuh derita. Indonesia yang harusnya menjadi pusat peradaban dunia, justru terpinggirkan dan seperti tidak dianggap dalam kancah percaturan dunia.

Maka dari itu, harus diakui dengan jujur bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Jika diurai satu-satu maka akan mudah terlihat bahwa kegelapan terjadi hampir di semua lini. Bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan tidak sedang baik-baik saja.

Ekonomi Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang buruk. Utangnya mencapai Rp 8400 Triliun. Angka pengangguran meningkat akibat perusahaan banyak yang tutup. Ketimpangan kekayaan sangat parah. Jumlah masyarakat miskin terus meningkat. Tidak sedikit individu masyarakat yang bertempat tinggal di bawah jembatan maupun menjadi gelandangan, tanpa ada kepedulian dari negara. Beban masyarakat terus bertambah seiring dengan kenaikan tarif pajak. Nilai tukar rupiah terus melemah juga turut memperburuk kondisi perekonomian.

Politik Indonesia juga tidak pernah stabil. Senantiasa ada tensi politik panas tinggi. Jika kepercayaan merupakan modal utama untuk menciptakan politik yang stabil, sulit untuk menyelamatkan politik Indonesia. Sebabnya, para politisi maupun lembaga-lembaga politik mendapatkan kepercayaan yang paling rendah dari publik Indonesia.

Kondisi sosial juga sedang merana. Berbagai penyakit masyarakat semakin meruyak. Nikah sesama jenis semakin vulgar dilakukan dan didukung oleh tokoh agama, sedangkan negara mendiamkan. Suatu fenomena yang

tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akhlak generasi muda semakin rusak. Ini tercermin dari perilaku buruk yang marak terjadi seperti tawuran, narkoba, hamil di luar nikah, judi *online* dan lain sebagainya.

Dunia pendidikan di Indonesia juga sedang muram. Kurikulum yang berbasis sekularisme gagal menghasilkan generasi muda menjadi generasi mulia. Di ranah pendidikan tinggi kondisinya juga sama. Mulai dari profesor abal-abal, doktor abal-abal, publikasi abal-abal, ijazah abal-abal hingga kampus abal-abal. Pendidikan yang harusnya menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan generasi bahkan menjadi bagian dari industri yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

Keamanan juga di rasa jauh dari harapan, baik kemanan individual maupun komunal. Secara individual masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak aman. Kapan saja mereka dapat dirampok, dicuri, ditipu baik secara langsung maupun lewat pembajakan hand-phone. Secara komunal sangat rawan terjadi intimidasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Bahkan kajian Islam saat ini rawan diintimidasi dan dibubarkan oleh kelompok lain yang merasa paling benar.

Sebetulnya, masih sangat banyak persoalan kehidupan masyarakat yang dirasakan dan terlihat dengan kasatmata. Kosakata yang tepat untuk menggambarkan kondisi rusak di berbagai dimensi itu adalah *gelap* bahkan *gelap gulita*.

Lalu apakah solusinya adalah *kabur aja dulu*? Atau ganti lagi rezimnya? Atau adili Prabowo dan Jokowi?

Solusi yang tepat harus berasal dari identifikasi terhadap akar masalah yang tepat. Jika identifikasi akar masalah tidak tepat maka sudah pasti didapatkan solusi yang salah. Jika solusi yang diberikan salah, habis energi dan



keringat bangsa ini berputar dalam lingkaran masalah yang tiada ujungnya.

Sesungguhnya *kabur aja dulu* bukanlah solusi. Sebagai anak negeri yang baik tidak elok meninggalkan negeri ketika sedang menghadapi problematika. Anak negeri yang baik akan turut berkontribusi memberikan solusi dan berjuang untuk mengakhiri derita negeri.

Ganti rezim juga bukan solusi. Sebabnya, sudah begitu banyak rezim silih berganti, tetapi persoalan tidak teratasi. Begitu juga dengan opini adili Prabowo dan Jokowi juga tidak akan mengakhiri semua persoalan ini. Sebabnya, akan muncul rezim berikutnya dengan wajah berbeda hakikatnya sama. Siapapun yang salah memang harus dihukum. Siapapun yang jahat memang harus diadili. Namun, mengakhiri kegelapan adalah hal yang berbeda.

Untuk mengakhiri kegelapan harus dimulai dari mengatasi sumber kegelapan. Sesungguhnya yang menjadi sumber kegelapan adalah penerapan ideologi kapitalisme. Penerapan kapitalisme telah melahirkan ekonomi eksploitatif, kehidupan sosial permisif, politik pragmatis dan sistem keamanan yang destruktif. Persoalan ketimpangan, kebangkrutan negara, kemiskinan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta kehidupan yang jauh dari kenyamanan tidak lain adalah hasil dari penerapan ideologi kapitalisme dengan asas sekularisme.

Maka dari itu, solusi atas kegelapan Indonesia adalah menyingkirkan sumber kegelapan tersebut, yakni mencampakkan ideologi kapitalisme yang terbukti bangkrut dan gagal memberikan kehidupan yang baik untuk manusia.

Terang dengan Syariah

Setelah sumber kegelapan tersebut dibuang maka dunia butuh sumber cahaya. Cahaya cerah berasal dari Islam. Penerapan syariah

Islam secara *kāffah* akan melahirkan cahaya yang indah di berbagai lini kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan maupun keamanan.

Ekonomi Islam, misalnya, berbasis pada suatu filosofis yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap-tiap individu warga negara. Dengan filosofis ini maka tidak akan ada warga negara yang menjadi gelandangan, tinggal di kolong jembatan atau mati kelaparan. Berbeda dengan peradaban kapitalis yang menghasilkan kekayaan luar biasa pada segilintir orang, tetapi banyak orang yang mati kelaparan. Menurut laporan *Global Report on Food Crises 2024*, sebanyak 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut yang tinggi. Jumlah ini meningkat 24 juta orang dari tahun sebelumnya. Kemungkinan akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang.

Sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh Negara Khilafah mengatur distribusi kekayaan secara adil. Sumber kekayaan negara dalam Islam sangat banyak antara lain kepemilikan umum, wakaf, *fa'i*, *ghanimah*, *'usyur*, *jazyah*, *kharāj*, dll. Dengan kekayaan yang dimiliki maka Negara Khilafah dengan sendirinya mampu membiayai semua kebutuhan masyarakat tanpa harus berutang.

Dengan sumber kekayaan yang beragam dan banyak maka Khilafah juga tidak memungut pajak kepada masyarakat. Hukum asal pajak dalam Islam adalah haram, kecuali dalam kondisi panceklik. Jika ada penarikan pajak di musim panceklik, itu hanya atas orang Islam yang kaya saja. Pajak pun harus segera dihentikan jika masa panceklik sudah berlalu.

Sistem ekonomi Islam juga berbasis pada sistem moneter yang stabil, yakni dinar dan dirham, serta bebas dari transaksi ribawi yang terbukti menjadi alat penjajahan untuk membuat negara berkembang semakin bergantung kepada negara besar.



Sistem politik Islam berlandaskan pada ketakwaan, konsep kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab kepada Allah. Dalam Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan pelayan rakyat yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Allah secara adil. Peraturan perundangan dibuat berasal dari hukum syariah, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Bukan berasal dari keinginan pribadi, keluarga atau kelompok sang penguasa, juga bukan dari keinginan oligarki. Sebabnya, untuk berkuasa, Khalifah tidak butuh oligarki.

Dengan sistem politik seperti ini maka kondisi politik negara akan sangat kondusif dan tenang. Sebabnya, negara bebas dari berbagai intrik kepentingan dalam proses regulasi maupun kebijakan. Iklim politik yang stabil merupakan prasyarat mendasar untuk melakukan pembangunan segala bidang.

Dalam sejarah Islam, banyak contoh pemimpin yang berintegritas tinggi, seperti Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang hidup sederhana dan selalu memastikan kesejahteraan rakyatnya. Jika sistem kepemimpinan seperti ini diterapkan di Indonesia, maka bisa dipastikan Indonesia bebas dari masalah. Justru Indonesia akan dipenuhi oleh keadilan dan *rahmah*.

Adapun sistem pendidikan Islam bertujuan mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan berkontribusi bagi peradaban. Pendidikan berbasis akidah Islam akan melahirkan individu-individu yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dibangun di atas asas sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan hanya mampu menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam spiritualitas. Kecerdasan akan rawan digunakan

untuk mengeksploitasi yang berujung pada kerusakan. Daya rusak orang pintar akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang kurang pintar. Dengan penerapan pendidikan berbasis Islam, generasi mendatang akan memiliki karakter yang kuat dan mampu membawa perubahan bagi bangsa.

Sistem sosial Islam juga sangat menghormati batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Dengan batasan yang jelas maka kehidupan sosial akan menjadi teratur. Berbeda dengan ideologi kapitalis yang bebas dalam interaksi pria-wanita. Hasilnya adalah keancuran tatanan masyarakat dan keluarga.

Begitu juga dengan sistem hukum Islam. Hukum Islam mengatur sanksi yang tegas dan adil. Hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi agar mereka tidak terdorong melakukan tindakan kriminal. Saat ini hukum di Indonesia masih banyak yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang-orang kecil mudah dihukum. Sebaliknya, para koruptor dan pejabat yang melakukan kejahatan besar sering kali lolos dari jeratan hukum. Berbeda dengan hukum Islam yang menerapkan keadilan tanpa memandang status sosial.

Walhasil, dengan menerapkan syariah Islam, Indonesia akan memiliki sistem ekonomi yang adil, pemerintahan yang bersih, hukum yang tegas dan adil, serta masyarakat yang berperadaban mulia. Syariah Islam bukan hanya sekadar aturan ibadah, tetapi juga solusi nyata bagi permasalahan bangsa ini. Sudah saatnya umat Islam bangkit dan memperjuangkan penerapan syariah Islam demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera di bawah naungan ridha Allah SWT. Habis gelap terbitlah terang, habis kapitalisme-sekularisme terbitlah Islam!

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

حزب التحرير الإندونيسي، غزة، والسياسة الإسلامية العالمية: تضامن أم استغلال

حزب التحرير يعتمد على العاطفة الشعبية لتعريف شرعيته الأيديولوجية، وليس بدافع التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين

الأربعاء 2025/02/19

LANTANG KRITIK ISLAM POLITIK TAPI BISU ATAS KEJAHATAN AS

Tidak sedikit pihak mengkritik Islam politik, khususnya yang dipresentasikan oleh Hizbut Tahrir (HT). Mereka menuding Islam politik dan HT sebagai gerakan esktrémisme. Jika pelakunya orang kafir, masih bisa dimaklumi. Masalahnya, sungguh disayangkan, ada juga pelakunya dari kalangan Muslim.

Tidak terbayangkan, bagaimana bisa mereka rela menjadikan dirinya sebagai ujung tombak kaum kafir dalam memerangi Islam politik, Hizbut Tahrir dan kelompok yang mereka tuding sebagai ekstremis. Namun, anehnya orang-orang yang seperti ini tidak pernah memerangi ekstremisme dan terorisme Yahudi. Mereka tidak mengutuk tindakan entitas penjajah Zionis Yahudi yang menghancurkan Gaza, membunuh puluhan ribu warganya dan mengusir ratusan ribu lainnya. Mereka juga tidak mengecam perusakan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat. Mereka tidak mengecam terorisme Amerika Serikat di Somalia, Irak, Afganistan dan Yaman. Mereka juga tidak mengecam terorisme India di Kashmir, atau pembantaian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, serta penindasan terhadap Muslim Uighur di Turkistan Timur dan wilayah lainnya.

Sebaliknya, orang-orang seperti ini hanya sibuk memerangi Hizbut Tahrir dan dakwahnya untuk menyatukan kaum Muslim di bawah panji Islam, yakni panji Khilafah!

Meski disebut sebagai anggota lembaga Islam, artikel maupun ucapan orang seperti ini sama sekali tidak memancarkan aroma Islam. Pemikirannya tidak berangkat dari akidah Islam. Pemikirannya justru dipenuhi dengan nasionalisme sempit yang berusaha memecah-belah umat Islam ke dalam berbagai negara kecil, bukannya menyatukan mereka dalam satu entitas, yaitu Khilafah.

Pendapat mereka yang dipublikasikan juga berbau chauvinisme nasionalistik yang telah dikedam keras oleh Islam. Mereka membela demokrasi kufur serta negara republik yang tidak menerapkan hukum Allah!

Mereka pun mengadopsi sudut pandang Barat tentang isu Palestina sebagai "konflik" semata, bukan sebagai tanah Islam yang diduduki oleh Yahudi. Aneh, orang seperti ini melihat Palestina hanya sebagai isu kemanusiaan dan hak asasi manusia, tanpa dasar akidah Islam. Mereka mendukung solusi Barat (lama), yaitu pendirian negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967. Seakan-akan tanah

yang diduduki entitas penjajah Zionis Yahudi sebelum 4 Juni bukanlah tanah Islam!

Padahal, bahkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah meninggalkan solusi ini. AS kini mendorong ekspansi entitas Zionis Yahudi serta pengusiran penduduk Gaza. Namun, pihak yang menuduh Hizbut Tahrir ekstremis tidak bereaksi terhadap hal ini dan tidak mengecam ekstremisme Trump dalam menindas kaum Muslim di Palestina!

Sebaliknya, ia justru menuduh kelompok-kelompok Islam sebagai pihak yang memanfaatkan situasi untuk menuduh negara-negara Arab telah mengkhianati Palestina. Padahal sudah jelas bagi siapa pun yang memiliki akal sehat bahwa negara-negara Arab, juga negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia, semuanya telah mengabaikan perjuangan Palestina!

Contoh Kasus

Salah satu contoh kasusnya adalah sebuah artikel yang mengkritik bahkan cenderung fitnah tidak berdasar yang dilakukan oleh orang semacam ini dan dimuat pada surat kabar internasional berbahasa Arab *Al-Arab* yang terbit di London, Inggris, beberapa waktu lalu.

Artikel tersebut merupakan respon si penulis terhadap *masîrah* (aksi) akbar yang menyerukan jihad dan khilafah sebagai solusi tuntas Palestina. Aksi ini dilakukan di lebih dari 20 kota di Indonesia beberapa waktu sebelumnya.

Penulis artikel ini menuduh Hizbut Tahrir sejak dari judul hingga seluruh paragraf dalam tulisannya. Namun, sangat jelas bahwa ia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Hizbut Tahrir. Walhasil tidak sedikit kesalahannya. Berikut lima di antaranya.

Pertama: Kesalahan dalam judul utama: "Hizbut Tahrir Indonesia". Penulis seakan tidak memahami bahwa Hizbut Tahrir adalah partai bagi seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia. Atau mungkin, ia sengaja mengadopsi sudut pandang nasionalisme sempit dan menganggap bahwa Hizbut Tahrir hanyalah partai lokal.

Padahal Hizbut Tahrir adalah partai politik dengan Islam sebagai dasarnya, yang bertujuan menyatukan umat Islam dalam satu entitas politik, yaitu Khilafah, yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kedua: Kesalahan kalimat "Hizbut Tahrir mengandalkan emosi publik untuk mengukuhkan legitimasi ideologinya". Kalimat ini menunjukkan kebohongan besar. Pasalnya, Hizbut Tahrir tidak mendasarkan legitimasi ideologinya pada emosi publik, melainkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman (yang artinya): Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyerukan kebajikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (TQS Ali Imran [3]: 104).

Selain itu Rasulullah saw. telah mewajibkan umat Islam untuk melakukan *muhaasabah* (kontrol) terhadap penguasa. Karena itulah Hizbut Tahrir tidak bergerak berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan kewajiban *syar'i* dalam mendakwahkan hukum Islam dan menjelaskan status Palestina dalam perspektif syariah. Sebaliknya, sang penulis justru menuduh Hizbut Tahrir dan aktivisnya sebagai pihak yang hanya berpura-pura peduli pada Palestina. Tuduhan ini jelas merupakan fitnah tanpa dasar.

Ketiga: Tuduhan dalam kalimat, "Hizbut Tahrir berusaha menghidupkan proyek Khilafah". Penulis tampaknya tidak memahami bahwa Khilafah bukanlah sekadar "proyek"

Hizbut Tahrir, melainkan sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan. Para ulama seperti Al-Mawardi, An-Nawawi, Al-Juwayni, Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Haitami, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, al-Qurthubi, dan banyak lainnya telah menegaskan kewajiban menegakkan Khilafah. Seharusnya, penulis merujuk pada pendapat mereka sebelum menentang Khilafah secara membabi-butu.

Keempat: Tuduhan dalam kalimat, “Hizbut Tahrir menyalahgunakan isu Palestina”. Penulis menuduh bahwa Hizbut Tahrir menggunakan isu Palestina untuk menyerang demokrasi dan negara-negara nasional. Padahal Palestina bukan sekadar konflik politik biasa, melainkan tanah Islam yang wajib dibebaskan. Jika Hizbut Tahrir menekankan pentingnya jihad dan khilafah sebagai solusi untuk membebaskan Palestina, hal itu justru sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, sang penulis malah membela solusi negara dua wilayah yang jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap hak umat Islam atas Palestina. Bahkan ia tidak mengutuk pengkhianatan para penguasa Muslim yang menjalin hubungan dengan entitas penjajah Zionis Yahudi.

Kelima: Tuduhan dalam kalimat, “Hizbut Tahrir memiliki agenda khusus”. Penulis menuduh Hizbut Tahrir memiliki agenda. Seakan-akan memiliki agenda adalah sesuatu yang salah. Padahal setiap kelompok, termasuk negara dan individu, pasti memiliki agenda. Yang lebih penting adalah apakah agenda itu sesuai dengan Islam atau tidak. Agenda Hizbut Tahrir sangat jelas: menghapus sistem kufur dan menegakkan Khilafah Islamiah. Mengapa ini dianggap sebagai kesalahan?

Dari lima poin tersebut dapat disimpulkan, artikel yang ditulis di surat kabar *Al-Arab* ini adalah serangan sistematis terhadap Hizbut Tahrir dan Khilafah. Ia mencerminkan sudut pandang sekuler dan nasionalistik yang bertentangan dengan Islam.

Bagi siapa pun yang mencari kata “Hizbut Tahrir” di kolom pencarian situs Surat Kabar Al-Arab, ia akan menemukan puluhan artikel, laporan dan berita yang menyerang Hizbut Tahrir serta konsep Khilafah. Hal itu wajar saja terjadi jika melihat konteks sejarah yang melatarbelakangi kelahiran surat kabar tersebut.

Penulisnya tidak memahami esensi Khilafah, jihad, dan solusi Islam untuk Palestina. Sebaliknya, ia lebih sibuk membela demokrasi kufur dan penguasa yang berkhianat terhadap Islam. Maka dari itu, sudah jelas bahwa artikel ini adalah bagian dari kampanye untuk menghalangi kembalinya Islam sebagai sistem kehidupan.

Al-Arab

Pertanyaan pun muncul, mengapa artikel busuk semacam itu bisa dimuat di Surat Kabar *Al-Arab*, yang dikira sebagian pembaca sebagai surat kabar yang menjadi media publikasi dunia Arab (yang notabene negeri Islam) dan syiar Islam? Pertanyaan tersebut mengandung ekspektasi yang terlalu tinggi. Pasalnya, sejatinya surat kabar tersebut memainkan peran utama dalam memerangi Islam politik dan segala sesuatu yang terkait dengannya.

Bagi siapa pun yang mencari kata “Hizbut Tahrir” di kolom pencarian situs Surat Kabar *Al-Arab*, ia akan menemukan puluhan artikel, laporan dan berita yang menyerang Hizbut Tahrir serta konsep Khilafah.

Hal itu wajar saja terjadi jika melihat konteks sejarah yang melatarbelakangi kelahiran surat kabar tersebut. Pada saat Liga Arab mengadakan Konferensi Menteri Penerangan tahun 1961, merekomendasikan proyek pendirian Lembaga Penerangan dan Informasi Arab di Eropa. Kemudian proyek tersebut dibentuk dengan berbagai hal yang berhubungan dengan media dan proyek tersebut ditugaskan kepada Komisi Informasi di Liga Arab yang terdiri dari berbagai tokoh media dari berbagai negara anggota termasuk dari Libya.

Menindaklanjuti Komisi Informasi di Liga Arab, Libya yang dipresentasikan Menteri Penerangan dan Kebudayaan Haji Ahmed Salihin menerbitkan *Al-Arab* sebagai surat kabar berbahasa Arab yang terbit secara internasional dari London, Inggris pada 1977.

Seperti diketahui, Liga Arab sendiri merupakan lembaga perkumpulan negara-negara bangsa Arab yang berdiri di atas puing-puing Khilafah Utsmani. Liga Arab didirikan oleh beberapa negeri Arab yang *bughat* (memberontak) terhadap Khilafah ketika Perang Dunia I berlangsung. Alih-alih mendukung Ibukota Istanbul untuk berjihad melawan Inggris dan sekutunya, para *bughat* ini malah mengikuti instruksi Inggris dan sekutu untuk melepaskan diri dari Khilafah Utsmani. Dalam catatan sejarah, peristiwa *bughat* tersebut dikenal dengan istilah Pemberontakan Arab 1916. Maka dari itu, tidak aneh jika Liga Arab memusuhi ajaran Islam di bidang pemerintahan, yakni Khilafah, dan para pengemban dakwahnya, terutama Hizbut Tahrir.

Begitu juga dengan Libya. Meskipun bukan termasuk anggota Pemberontakan Arab 1916 dan bukan pendiri, tetapi sekadar anggota Liga Arab, Libya juga memiliki rasa permusuhan yang sama terhadap Hizbut Tahrir. Apalagi sejak 1978, Hizbut Tahrir Libya secara lantang melakukan *nahyi mungkar* terhadap

penguasa Libya Muammar Qaddafi yang ingkar sunah. Qaddafi meyakini semua hadis itu palsu (*mawdhū'*), tidak ada yang merupakan wahyu Allah SWT. Karena itu dia tidak mau menerapkan hukum yang terkandung dalam hadis. Sebagai gantinya ia menerapkan sosialisme.

Pada 1983, tiga belas aktivis HT Libya yang paling lantang pun ditahan dan diintimidasi di dalam penjara. Namun, mereka tetap teguh dengan pendiriannya. Tidak sedikit pun goyah dan meninggalkan prinsipnya untuk terus berjuang menegakkan Khilafah Islam, yang menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukumnya.

Qaddafi kian berang. Ia mengancam akan memenjarakan mereka seumur hidup. Mereka tidak goyah. Bahkan dengan lantang Muhammad Muhazhab Havan (aktivis HT Libya) menjawab, "Sungguh dipenjara seumur hidup itu merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi saya."

Mendengar itu, Qaddafi pun memutuskan untuk menghukum mati mereka. Mereka pun dieksekusi mati dengan cara digantung di sekolah-sekolah dan universitas. Itu dilakukan di depan para guru, dosen, murid dan mahasiswa, serta di depan keluarga dan anak-anak mereka.

Meski rezim para penguasa anggota Liga Arab silih berganti, sikap mereka tetap sama: memusuhi Khilafah ajaran Islam dan para pengemban dakwahnya. Maka dari itu, tidak aneh media-media massa yang diterbitkan Liga Arab ini memainkan peran utama dalam memerangi Islam politik dan segala sesuatu yang terkait dengannya. [Joko Prasetyo/Dari berbagai sumber dan sumber utamanya adalah artikel, "*Surat Kabar Al-Arab Memimpin Kampanye Memusuhi Khilafah dan Hizbut Tahrir*," karya Khalifah Muhammad, Aktivis Hizbut Tahrir Yordania]

AL-BAYÂN DAN AL-MUBAYYAN

الْبَيَانُ وَالْمُبَيِّنُ

Badrudin az-Zarkasyi (w. 794 H) menyatakan di *Bahru al-Muḥīth fī Ushūl al-Fiqhī: Al-bayân* secara bahasa merupakan isim mashdar dari *bayyana* jika *uzhḥira* (ditampakkan). Dikatakan *bayyana bayānan wa tibyanan* seperti *kallama yu-kallimu kalāman wa taklīman*. Ibnu al-Furak mengatakan di kitabnya: *al-bayân* adalah *musytaq* (turunan) dari *al-baynu* dan itu adalah *al-firāq* (perpisahan). *Al-bayân* disamakan dengannya sebab *al-bayân* menjelaskan sesuatu dan menghilangkan ketidajelasannya. Abu Bakar ar-Razi berkata: disebut *bayānan* karena terpisahnya dari makna-makna yang samar/kabur dan tidak jelas karenanya.

Adapun secara istilah, para ulama khususnya ulama ushul berbeda pendapat tentang batasan atau pengertian *al-bayân*. Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *al-Mustashfā fī ‘Ilmi al-Ushūl* menjelaskan: “Ketahuilah bahwa *al-bayân* adalah ungkapan tentang perkara yang berkaitan dengan *at-ta’rif* (pengenalan) dan *al-i’lām* (pemberitahuan), dan melainkan *al-i’lām* itu terjadi dengan dalil, dan dalil itu menghasilkan ilmu (pengetahuan). Jadi di sini ada tiga hal: *i’lāmun* (pembe-

ritahuan), dalil yang dengannya terjadi pemberitahuan dan pengetahuan yang diperoleh dari dalil. Diantara orang ada yang menjadikannya ungkapan tentang pengenalan (*at-ta’rif*), ia berkata tentang batasannya: bahwa *al-bayân* adalah *ikhrāju asy-syay`i min hayyizi al-isykāl ilā hayyizi at-tajalliy* -mengeluarkan sesuatu dari daerah samar (tidak jelas) ke daerah jelas-. Dan diantara mereka orang yang menjadikannya ungkapan tentang apa yang dengannya tercapai pengetahuan dalam apa yang memerlukan pengetahuan, yang saya maksudkan adalah perkara yang bukan *dharūriy*, dan itu adalah *ad-dalīl*. Ia berkata tentang batasannya: bahwa *al-bayân* adalah dalil, yang dengan shahihnya penalaran padanya mengantarkan kepada pengetahuan dengan apa yang didalilinya, dan itu adalah pilihan al-Qadhi (Abu Bakar al-Baqilani). Dan dari mereka ada yang menjadikannya ungkapan tentang pengetahuan itu sendiri dan itu adalah kejelasan sesuatu, seolah menurutnya *al-bayân* dan *at-tabayyun* adalah sama”.

Imam al-Amidi (w. 631 H) di *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* setelah memaparkan seperti pemaparan imam al-Ghazali kemudian menyatakan: Abu Bakar ash-Shayrafiy — termasuk ashshab asy-syafi’iy— dan lainnya mengatakan: *al-bayân* adalah *at-ta’rif* (pengenalan), dan diungkapkan bahwa *al-bayân huwa ikhrāju asy-syay`i ‘an hayyizi al-isykāl ilā hayyizi al-wudhūh wa at-tajalliy* (*al-bayân* adalah mengeluarkan sesuatu dari daerah kesamaran ke daerah kejelasan dan kegamblangan). Dan Abu Abdillah al-Bashriy dan lainnya berpendapat bahwa *al-bayân* adalah pengetahuan yang diperoleh dari dalil. Dan al-Qadhi Abu Bakar (al-Baqilaniy), al-Ghazali, dan mayoritas ashshab kami dan mayoritas muktazilah seperti al-Juba’iy, Abu Hasyim dan Abu al-Husain al-Bashriy dan selain mereka berpendapat bahwa *al-bayân*



adalah *ad-dalīl*, dan itu yang terpilih.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyatakan di *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir*, “dan diperselisihkan tentang *al-bayân*. Dikatakan (pertama): *al-bayân* adalah dalil, dan itu adalah apa yang dengan shahihnya penalaran padanya sampai ke ‘ilmu (keyakinan) atau *zhann* (dugaan kuat). Dan dikatakan (kedua): *al-bayân* adalah mengeluarkan sesuatu dari daerah kesamaran ke daerah kejelasan. Dan dikatakan (ketiga): *al-bayân* adalah apa yang menunjukkan yang diinginkan dengan apa yang independen dalam *dalâlah* atas yang diinginkan tersebut. Dan dikatakan, dua batasan ini (kedua dan ketiga) khusus dengan *al-mujmal*”.

Ketiga batasan itu belum menyeluruh dan masih kurang. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa, “batasan *al-bayân* adalah mengeluarkan sesuatu dari daerah ketidakjelasan ke daerah kejelasan, itu adalah satu bentuk dari *al-bayân* dan itu *bayân al-mujmal* saja.... Betul semua yang tidak memberi faedah ilmu atau *zhann* yang *zhâhir* maka itu adalah *mujmal* dan bukan *bayân*, melainkan dia memerlukan *al-bayân*”.

Sementara dalil sendiri ada yang *mujmal*, dan itu jelas bukan *al-bayân*. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari penjelasan dalil baik *al-‘ilmu* (yakin) atau *azh-zhann* (dugaan kuat) maka itu adalah hasilnya.

Jadi seperti dikatakan oleh al-‘Abdari yang dikutip oleh az-Zarkasyi, bahwa yang *shawâb* bahwa *al-bayân* merupakan gabungan dari ketiga batasan itu. Hanya saja, yang menjadi pokoknya adalah dalil, yakni dalil yang telah jelas *dalâlah* atau maknanya, sehingga dapat memberi penjelasan atas kesamaran atau ketidakjelasan dalil lainnya dan menghasilkan *al-‘ilmu* (keyakinan) atau dugaan kuat atas *dalâlah* atau maknanya.

Hanya saja yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang dalil yang *al-mujmal* dan penjelasan untuk *al-mujmal*. Pembahasan ini sangat diperlukan sebab dalil *al-mujmal* itu, karena ketidakjelasan *dalâlah*-nya atau karena mengandung lebih dari satu *dalâlah* atau makna dan tidak ada keistimewaan yang satu atas yang lain, maka beramal dengan dalil yang *al-mujmal* itu tidak dapat dilakukan. Padahal asal pada dalil itu adalah diamalkan, bukan diabaikan. Di situlah perlu pembahasan tentang batasan dalil-dalil yang menjelaskan dalil-dalil yang *al-mujmal*. Dan dalil-dalil seperti itu dalam istilah para ulama ushul disebut sebagai *al-bayân*.

Dalam hal ini al-‘allamah asy-syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan di *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* juz 3: Firman Allah SWT ﴿وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ﴾ -dan dirikanlah *shalat*- adalah *mujmal*. Dan apa yang diriwayatkan dari Rasul saw bahwa Beliau mengenalkan *shalat* dengan perbuatan Beliau yang mana Beliau bersabda: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي» -*Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat*- (HR al-Bukhari) merupakan penjelasan (*bayân*) untuk *mujmal* ini. Dan firman Allah SWT ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ -Dan tunaikanlah *zakat*- adalah *mujmal*. Dan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah saw seputar *zakat* jenis-jenis yang dizakati adalah penjelasan untuk *mujmal* tersebut. Rasulullah saw bersabda:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَعُ صَفَائِحٍ مِنْ نَارٍ»

“Tidaklah pemilik emas dan tidak pula pemilik perak yang tidak menunaikan haknya kecuali jika Hari Kiamat dilapisi dengan lapisan dari api neraka” (HR Muslim).



Dan surat yang ditulis oleh Abu Bakar ra. untuk Anas ra. ketika mengutusnnya ke Bahrain:

«هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ
ثم بين زكاة الإبل»

“Ini adalah kefardhuan zakat yang difardhukan oleh Rasulullah saw terhadap kaum Muslim dan yang diperintahkan Allah SWT kepada Rasulullah saw ... -kemudian ia menjelaskan zakat unta-“ (HR al-Bukhari).....

Dan apa yang ada di hadis Abu Burdah dari Abu Musa ra. dan Mu'adz bin Jabal ra.:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيِّ»

“Rasulullah saw mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan manusia perkara agama mereka, maka Beliau memerintahkan mereka agar mereka tidak mengambil zakat kecuali ari empat jenis ini: gandum, jelay, kurma dan kismis” (HR al-Hakim dan ia menshahihkannya).

Semua ini merupakan penjelasan untuk mujmal tersebut. Atas dasar itu *al-bayân* adalah dalil yang menjelaskan *al-mujmal*”, demikian penjelasan al-‘allamah asy-syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.

Dengan demikian, *al-bayân* adalah dalil yang telah jelas *dalâlah* atau maknanya, yang menjelaskan dalil yang *al-mujmal*.

Al-Mubayyan

Imam al-Amidi (w. 631 H) di *al-Ihkâm fi*

Ushûl al-Ahkâm dan al-‘allamah asy-syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* juz 3 menyatakan: “Adapun *al-Mubayyan*, maka yang dimaksudkan adalah seruan sejak awal yang sudah mencukupi dengan dirinya sendiri tidak membutuhkan penjelasan. Dan kadang yang dimaksudkan adalah apa yang memerlukan penjelasan dan penjelasannya telah dinyatakan atasnya. Hal itu seperti lafal *al-mujmal* jika telah dijelaskan yang diinginkan darinya, lafal umum setelah *takhshîsh*, lafal mutlak setelah *taqyîd* dan *fi’il* jika dikaitkan dengannya apa yang menunjukkan arah yang dimaksudkan, dan lainnya”.

Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H) menjelaskan di *Bahru al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqhi: Al-mubayyan* disebutkan atas seruan yang memerlukan penjelasan dan penjelasannya telah dinyatakan atasnya. Dan juga disebutkan untuk seruan sejak awal yang mencukupi tidak memerlukan penjelasan. Dan itu kadang menunjukkan menurut ketetapan bahasa dan itu adalah *an-nashshu* dan *azh-zhâhir* atau menurut makna seperti *al-mafhûm* dan apa yang ditunjukkan oleh nas melalui penetapan ‘illat semisal «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَائِفِ» atau melalui akal semisal: perintah dengan sesuatu merupakan perintah dengan apa yang perintah itu tidak sempurna kecuali dengannya. Dan dalil yang dengannya tercapai penjelasan disebut *mutsbitun*.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan *al-mubayyan* adalah dalil yang sudah *mubayyan* (dijelaskan) sejak awal, yakni sejak awal sudah jelas *dalâlah* atau maknanya, sehingga tidak perlu penjelasan. Dan dalil demikian adalah *al-bayân*. Dan *al-mubayyan* juga adalah dalil yang *al-mujmal* yang dijelaskan oleh dalil yang *al-bayân*.

Wallâh a’lam wa ahkam. []



KEBIADABAN DAN TERORISME AMERIKA

Al-Ustadz Baha al-Husaini

Sejak awal berdirinya, Amerika Serikat tidak lain hanyalah negara yang dibangun di atas genosida, perbudakan dan kolonialisme. Sejarah menjadi saksi bahwa negara ini didirikan di atas darah jutaan penduduk asli yang dibantai dengan cara paling kejam. Negara ini juga memperbudak jutaan orang Afrika, lalu berubah menjadi kekaisaran kolonial yang tidak pernah berhenti memicu perang di berbagai belahan dunia demi kepentingannya.

Terorisme Amerika Sepanjang Sejarah

Selama beberapa dekade terakhir, AS telah mempraktikkan kebijakan biadab yang merenggut nyawa jutaan orang, tetapi tetap bersikeras menampilkan diri sebagai “pelindung demokrasi dan hak asasi manusia.” Di antara kejahatan yang paling menonjol adalah:

Perang Dunia: Kaum Muslim tidak memiliki peran dalam memicu Perang Dunia I dan II. Amerika dan Eropalah yang justru menjadi pihak yang menghancurkan dunia dan membunuh jutaan orang.

Bom Nuklir: Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mene-

waskan ratusan ribu warga Jepang yang tidak bersalah.

Genosida terhadap Penduduk Asli: Lebih dari 100 juta penduduk asli Amerika terbunuh dalam genosida yang mengerikan.

Perbudakan dan Eksploitasi Masyarakat: Lebih dari 180 juta orang Afrika diculik dan diperbudak. Sebagian besar meninggal sebelum mencapai tanah penjajah kulit putih.

Perang Modern: Amerika menginvasi Afghanistan dan Irak, menghancurkan Libya, Suriah dan Yaman. Akibatnya, jutaan orang terbunuh, dan jutaan lainnya mengungsi. AS pun terus mempersenjatai entitas Yahudi untuk membunuh dan mengusir warga Palestina.

Standar Ganda Amerika

Meskipun telah melakukan berbagai kejahatan ini, Amerika berusaha mengeksport citranya sebagai “pembela kebebasan” ke dunia, sembari menerapkan kebijakan standar ganda dalam menangani isu-isu internasional:

Ketika Amerika menginvasi suatu negara, itu disebut sebagai “pembebasan.” Namun, ketika masyarakat Muslim melawan perbudakan, mereka dilabeli sebagai “teroris.”

Ketika entitas Yahudi membunuh anak-anak dan perempuan, Amerika menyebut itu sebagai “hak Israel untuk membela diri.” Namun, ketika Palestina mempertahankan tanah mereka, mereka justru diklasifikasikan sebagai “teroris.”

Ketika Amerika mendukung rezim diktator bonekanya, itu disebut sebagai “melindungi stabilitas.” Namun, ketika kaum Muslim memberontak melawan ketidakadilan, mereka dituduh melakukan “ekstremisme dan terorisme.”

Solusi Syar’i yang Harus Ditegakkan oleh Umat

Realitas kaum Muslim saat ini merupakan konsekuensi logis dari ketundukan mereka pada hegemoni Amerika dan Barat, juga karena penerimaan mereka terhadap sistem-sistem fungsional yang berada di bawah kendali Amerika dan Barat. Sistem ini memerintah dengan selain apa yang telah diwahyukan Allah dan menghalangi umat dari pembebasan. Solusinya bukanlah dengan mengemis atau mengadu kepada lembaga internasional, melainkan dengan mengambil sikap praktis sesuai dengan perintah Islam:

1. Menyadari Realitas Konflik.

Masalah ini bukan sekadar persoalan pendudukan atau ketidakadilan politik. Lebih dari itu, ini adalah konflik antara Islam dan musuh-musuhnya yang ingin menghancurkannya serta mencegah umat mendapatkan kembali kekuatannya.

2. Menggulingkan Rezim Boneka.

Rezim-rezim ini tidak lain hanyalah alat kolonial untuk melindungi kepentingan Amerika dan Barat. Umat tidak akan bisa terbebas kecuali dengan menggulingkan mereka dan menegakkan sistem Islam.

3. Mobilisasi Tentara.

Kewajiban tentara saat ini adalah me-

nolong umat, bukan melindungi para tiran. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾

Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama maka wajib kalian menolong mereka (QS al-Anfal [8]: 72).

4. Menegakkan Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah.

Tidak ada jalan keluar bagi umat kecuali dengan menegakkan Negara Islam yang berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Negara ini akan mempersatukan kaum Muslim di bawah Panji Islam serta membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan.

Sudah saatnya umat Islam bangkit dari tidur panjangnya. Saatnya mereka menyadari bahwa solusinya bukanlah tunduk kepada Amerika atau mencari kompromi dengan musuh-musuh Islam, melainkan kembali pada Islam sebagai sistem dan pemerintahan. Jalan sudah jelas: tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali dengan mendirikan Negara Islam (Khilafah Islam) yang akan memerintah berdasarkan wahyu Allah, yang akan memimpin kita dalam menghapuskan kezaliman, dan yang akan membebaskan negeri-negeri kita dari pengaruh kolonial.

Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

[Sumber: *alraiah.net*, 5 Maret 2025].

ISLAMISASI KARAWANG RAYA

(Dari Syaikh Qura Hingga Kesultanan Islam) (Bagian 3)

Ahmad Abdurrahman al-Khaddami

Memang benar, Islamisasi pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh Mataram Islam. Hal ini karena sebagian besar Karawang merupakan bawahan Keraton Sumedanglarang yang tunduk pada Mataram sejak era Susuhunan Agung Hanayrakusuma. Pada masa tersebut sebagian Tatar Sunda—yakni wilayah yang dipimpin Cirebon, Sumedang, Galuh, Cikundul, Ukur, Sukapura dan Banyumasan—tunduk pada Mataram Islam. Dengan pemberian gelar melalui Syarif Makkah maka terjalin hubungan struktural Khilafah Utsmaniyah dengan Tatar Sunda bagian Timur meliputi Cirebon, Priangan dan Banyumasan melalui Sultan Agung Mataram. Bendera Mataram yang mengandung simbol “Bulan Sabit” menjadi bukti penguat hubungan dengan Khilafah Utsmaniyah.

Peran utama Sultan Agung Mataram ialah mengoptimalkan islamisasi sampai ke pedesaan dan pedalaman hingga terjadi jalinan erat antara Islam dengan adat/budaya yang tak tepisahkan. Peranan sang Sultan tercermin dalam gelarnya, yakni “*Senapati ing Alaga*

Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah”. Menjadi hal aneh atau menyalahi adat/budaya jika ditemukan pribumi kafir di wilayah Cirebon, Priangan, Banyumasan dan Tanah Jawi secara umum. Peran Penghulu/Qadhi dan lembaga Kauman dapat ditemukan di berbagai pelosok daerah. Apalagi di lingkungan Keraton Mataram yang dipimpin langsung Sultan Agung, Amir Khilafah sekaligus Ulama, murid Panembahan Ratu, cucu Sunan Gunung Jati. Tuduhan adanya sinkretisme Islam dengan adat/budaya lama terbantah dengan banyaknya naskah-naskah Islam di pustaka Keraton serta para ningrat dan abdi dalem yang memiliki sanad keilmuan hingga ke Hijaz dan Mesir.

Naskah *Kempalan Kitab-Kitab Islam*, nisbah Pangeran Cakraningrat Ngayogyakarta, dapat menjadi sandaran informasi terkait penyebaran karya-karya Ulama “Arab” bukan hanya di Cirebon dan Priangan saja, namun wilayah Mataram secara umum. Demikian pula naskah *Serat Tajusalatin*, nisbah Ratu Kencana Surakarta, erat kaitannya dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Meskipun nas-

kah-naskah tersebut disusun setelah masa sang Sultan, ini menunjukkan keberhasilan islamisasi sebelum Mataram dipecah-belah oleh kafir Belanda. Sikap Sultan Agung terhadap kafir penjajah Belanda juga sangat jelas, yakni jihad fi sabilillah. Beliau bahkan pada masa sebelumnya telah menyerang Batavia 2 (dua) kali, meskipun belum berhasil membebaskan Jaketra/Jayakarta dari penjajahan kafir *harbi*. Setidaknya pengepungan tersebut menyebabkan penguasa Batavia tewas karena wabah. Peran Karawang Raya dalam menopang penyerbuan Batavia sangatlah penting.

Pengembangan ekonomi dan pertanian serta tata-kota islami termasuk di antara bentuk peranan sang Sultan dalam melakukan *ri'ayah* terhadap rakyat. Tata kota yang dimaksud ialah penempatan Masjid Agung, kantor pemerintahan dan alun-alun dalam kesatuan lingkungan. Ini menggambarkan hubungan baik antara ulama, *umara* dan umat. Susunan demikian pernah terwujud pada masa Adipati Singaperbangsa saat memerintah Karawang Raya di dekat Masjid Agung Karawang. Dikatakan, susunan demikian meniru penataan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Jika pun demikian, ini semakin menguatkan bukti hubungan keilmuan antara Sultan Agung dengan sang guru, Panembahan Ratu.

Sumber utama islamisasi era ini ialah *Piagam Kuningan Kandang sapi*, yakni suatu piagam dari Susuhunan Agung Hanyakrakusuma untuk Pangeran Rangga Gede dari Sumedanglarang. Piagam ini ditemukan di Parakan Sapi, Karawang (kini sudah menjadi bagian dari Danau Jatiluhur). Piagam ini bermula dari kerjasama antara Banten dan sebagian me-

nak Sumedanglarang yang kemudian berhasil menguasai wilayah Udug-Udug, Karawang. Dinukil dari naskah Kasumedangan, *Sejarah Sumedang* sebagai berikut:

Kemudian Pangeran Aria Suriadiwangsa meminta pertolongan kepada Sultan Banten Abul Mafakhir Mahmud Abdur Kadir karena Sultan Banten itu adalah juga cucu Pangeran Girilaya. Kemudian Sultan Banten memerintahkan rakyatnya untuk mendirikan perkampungan di wilayah Karawang. Hal ini telah mengemparkan orang-orang Belanda yang pada waktu itu berada di Batawi. Semua kejadian di Pasundan itu menyebabkan kemarahan Susuhunan sehingga Pangeran Rangga Gede dipanggil ke Mataram dan ditempatkan, diasingkan di kampung Gajahmati.

Penguasa Mataram yang telah diakui oleh Galuh dan Sumedang merespon dengan mengirim pasukan Aria Wirasaba Surengrana. Sebagai persiapan menghadapi Banten di Udug-Udug, Aria Wirasaba membentuk 3 (tiga) desa, yakni Waringinpitu (kini Telukjambe), Parakansapi (kini menjadi bagian Danau Jatiluhur) dan Adiarsa. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melampirkan tugas kepada Susuhunan Agung Mataram sehingga dinilai tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal terlaksana. Aria Wirasaba selanjutnya lebih fokus menjadikan Karawang menjadi “lumbung padi” sebagai persiapan rencana Susuhunan Agung menyerang Kafir Belanda di Batavia, di samping mencetak prajurit perang. [Bersambung]

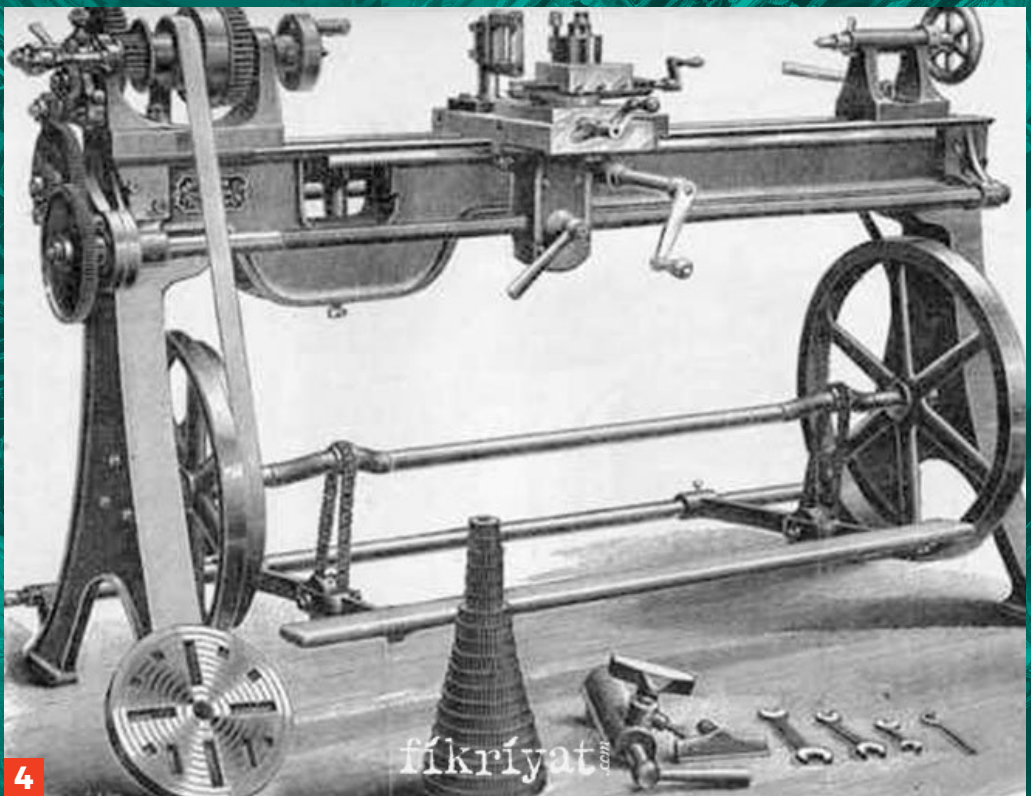
Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 1)



IBNI KARAKA, PENEMU MESIN BUBUT PERTAMA (INSINYUR)

3 **3** Ibnu Karaka, ilmuwan Muslim yang membangun mesin bubut pertama sembilan ratus tahun yang lalu, hidup pada paruh kedua abad ke-11. Ilmuwan Muslim, yang kehidupannya hanya sedikit diketahui orang, dikenal sangat cerdas.

Dia membangun mesin bubut pertama di dunia di lahan seluas 25 meter persegi di Kairo. Ibnu Karaka membela gagasan bahwa semakin besar dan berkualitas tinggi alat, semakin mudah pekerjaannya dan semakin baik hasilnya. Sistem dan mekanisme yang sama yang ia ciptakan masih digunakan dengan teknologi saat ini.



4 **4** Mesin bubut digunakan untuk memotong kayu atau barang logam sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Saat ini, banyak produk, mulai dari bahan mainan hingga mesin, dibentuk pada alat tenun ini.

Ilmuwan Muslim dan Penemuan yang Mereka Berikan Kepada Dunia (Bagian 1)



5

AHMET BIN MUSA, PENEMU SISTEM KONTROL OTOMATIS (TEKNIK SISTEM)

5 Ahmet bin Musa, salah satu pelopor rekayasa sistem dan sibernetika, juga menghasilkan karya di bidang astronomi. Lahir di Baghdad pada tahun 803. Saudara-saudara dan ayah Ahmed bin Musa juga adalah ilmuwan.

Ia mengambil pelajaran dari Yahya bin Abu Mansur, astronom Khalifah, dan mempelajari ilmu-ilmu pada masanya dengan baik. Bersama saudaranya, ia menghitung terbit dan terbenamnya bintang-bintang penting setiap hari dan menerapkannya pada instrumen bintang ciptaannya. Perangkat ini terbuat dari tembaga, dioperasikan dengan tenaga air, dan dapat menampilkan gambar dan nama bintang secara rinci tanpa campur tangan siapa pun.

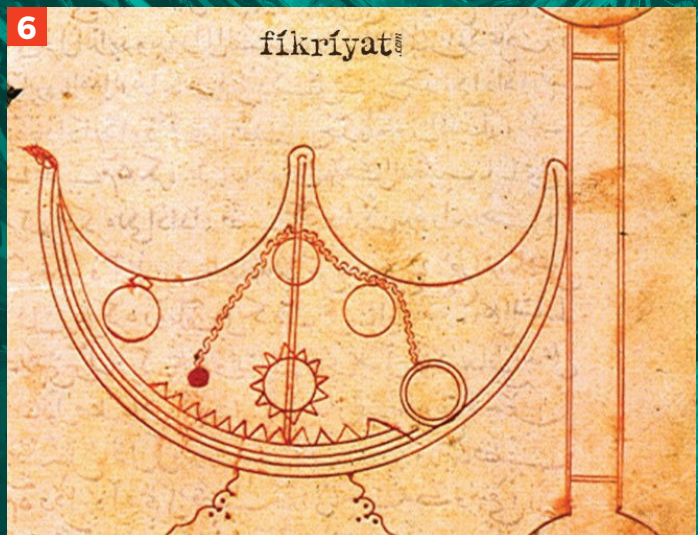
Spesialis di bidang mekanika, Ahmet bin Musa menggambar desain beberapa perangkat otomatis yang dapat bekerja sendiri. Perangkat yang dibuatnya di bidang otomasi mampu memenuhi kebutuhan banyak orang.

Beberapa perangkat penting yang ditemukan oleh Ahmed bin Musa adalah:

6

1. Lampu yang otomatis padam saat sumbu terbakar, minyak yang otomatis mengalir ke reservoir dan tidak padam meskipun tertiuap angin.
2. Kendi dan wadah mandi yang dapat menuangkan air dalam jumlah yang diinginkan pada interval tertentu, dicampur atau terpisah sesuai kebutuhan,
3. Baskom air yang dikontrol secara otomatis di mana ternak kecil dapat minum air,
4. Perangkat yang digunakan untuk menyiram kebun dan ladang dan yang bersiul untuk mengumumkan akhir irigasi,
5. Wadah yang mengukur berat relatif cairan, Wadah yang terisi air segera setelah dikosongkan,

6



6. Air mancur yang terus-menerus menyemburkan air dalam angka yang berbeda,
7. Botol yang dapat menuangkan air yang dicampur atau terpisah sesuai kebutuhan.